

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**



BPKAD



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu, Kode Pos 94111
Telepon (0451) 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id, Website : www.sultengprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 15 April 2026

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIRO ORGANISASI</p> <p>NENG ELLY, SH, MM Pembina Utama Muda Nip. 19730601 199503 2 002</p>	
--	--	--



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812
P A L U

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 000 / 18 02 / BPKAD /

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara denga mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I SulaweI Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I SulaweI Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


Drs. AWALUDIN, MM
Pembina Utama Madya

Nip. 19660306 199803 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan gambaran mengenai ketercapaian kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan memuaskan dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 970.240.626.787,04,- atau 74,86% dari anggaran sebesar Rp. 1.296.099.853.338,39,- dan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. keberhasilan capaian kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 merupakan upaya dari semua unsur BPKAD dan *Stakeholder* terkait. Capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kinerja BPKAD di tahun-tahun mendatang semakin meningkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap memacu pelaksanaan pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan lebih efektif untuk di tahun-tahun berikutnya agar dapat mencapai target. Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam Rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah.

Penyusunan LKIP ini mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja yang transparan, Objektif dan berorientasi pada hasil, dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini telah diupayakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kami berharap LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palu, 15 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. AWALUDIN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19660306 199803 1 011

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis/Permasalahan	19
1.4. Tindak Lanjut LHE Akip	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Renstra Perangkat Daerah	23
2.2. Struktur Program dan Kegiatan	28
2.3. Indikator Kinerja Utama	32
2.4. Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja	38
3.2 Realisasi Anggaran	81
3.3 Inovasi	88
3.4 Penghargaan	89
BAB IV PENUTUP	90
4.1. Kesimpulan	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Diagram Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	15
Tabel 1.2	Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025	16
Tabel 1.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	19
Tabel 1.4	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	22
Tabel 2.1	Cascading Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	24
Tabel 2.2	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	32
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Renstra (2021-2026)	40
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Renstra (2025-2029)	40
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025 Renstra (2021–2026)	44
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025 Renstra (2025–2029)	45
Tabel 3.5	Capaian Ipkd Perdimensi	47
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Hasil Pengukuran IPA	48
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Hasil Opini BPK-RI	49
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra Renstra (2021–2026)	50

Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra Renstra (2025–2029)	51
Tabel 3.10	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (IPKD)	52
Tabel 3.11	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (WTP)	54
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta	56
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
Tabel 3.14	Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian	62
Tabel 3.15	Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	18
-----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL DAN PERUBAHAN TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD merupakan perangkat daerah yang dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka, telah terjadi perubahan nomenklatur sehingga terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan penggabungan dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Kas Daerah dan Bagian Aset Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Permempnan RB no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap perangkat daerah wajib menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan Kinerja BPKAD adalah dokumen akuntabilitas tahunan yang menyajikan pencapaian Target Strategis, Realisasi Anggaran, Efektivitas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Selain itu, Laporan Kinerja BPKAD ini mengacu pada Renstra BPKAD tahun 2025 – 2030 dimana dalam Renstra BPKAD tersebut telah

menetapkan rencana kinerja BPKAD selama 5 Tahun berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 1 (Satu) Sub Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
- 2. Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
 - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;
 - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi

Jabatan;

- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

3. Bidang Anggaran

- 1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
 - f. penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.
2. Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
 - e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
 - g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusun Anggaran;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

(2) Sub Bidang Manajemen Anggaran

1. Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.

2. Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen Anggaran;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan DPRD Provinsi;
 - d. melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;
 - f. menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;
 - g. melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
 - h. melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - i. melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - j. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran.

4. Bidang Akuntansi

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen

dan Evaluasi Pertanggungjawaban.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan Akuntansi Pelaporan;
 - d. menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah serta rancangan kebijakan lain yang berkaitan dengan penguatan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta

- melaksanakan sosialisasi;
- e. melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik Pendapatan, Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya atas Pelaksanaan APBD setiap bulan;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang terkait dengan akun Laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebelum Penyusunan Laporan;
 - g. melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, Semesteran dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap akhir tahun;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan Sistem Prosedur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - i. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan hasil koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Sub Bidang Akuntansi Manajemen

1. Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi

Manajemen;

- c. melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan Akuntansi Manajemen serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama dengan DPRD;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- e. melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran termasuk Badan Layanan Umum Daerah secara berkala sebagai bahan Penyusunan Laporan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan meminta Laporan Keuangan setiap akhir tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Kepegawaian, pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan BKD, Perangkat Daerah dan Bidang Perbendaharaan;
- h. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap dan persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengan Bidang Aset sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. menyiapkan data capaian kinerja dan indikator Pembangunan, pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta lembaga lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang Akuntansi Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Akuntansi Manajemen.

5. Bidang Perbendaharaan

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak Langsung dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;
- d. melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas Belanja Tidak Langsung;
- e. melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. melakukan administrasi penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

(2) Sub Bidang Belanja Langsung

1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja langsung;
 - b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;

- d. melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- e. melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas belanja langsung;
- f. melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D);
- g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Langsung;

6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

- 1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah

- 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.
- 2. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - b. menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan Dan Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait antara lain penyusunan kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penetapan status Barang Milik Daerah;
 - d. melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
 - e. melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
 - f. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, dan

- menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan barang, Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan barang;
- g. melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan Laporan mutasi barang;
 - h. melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - i. melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

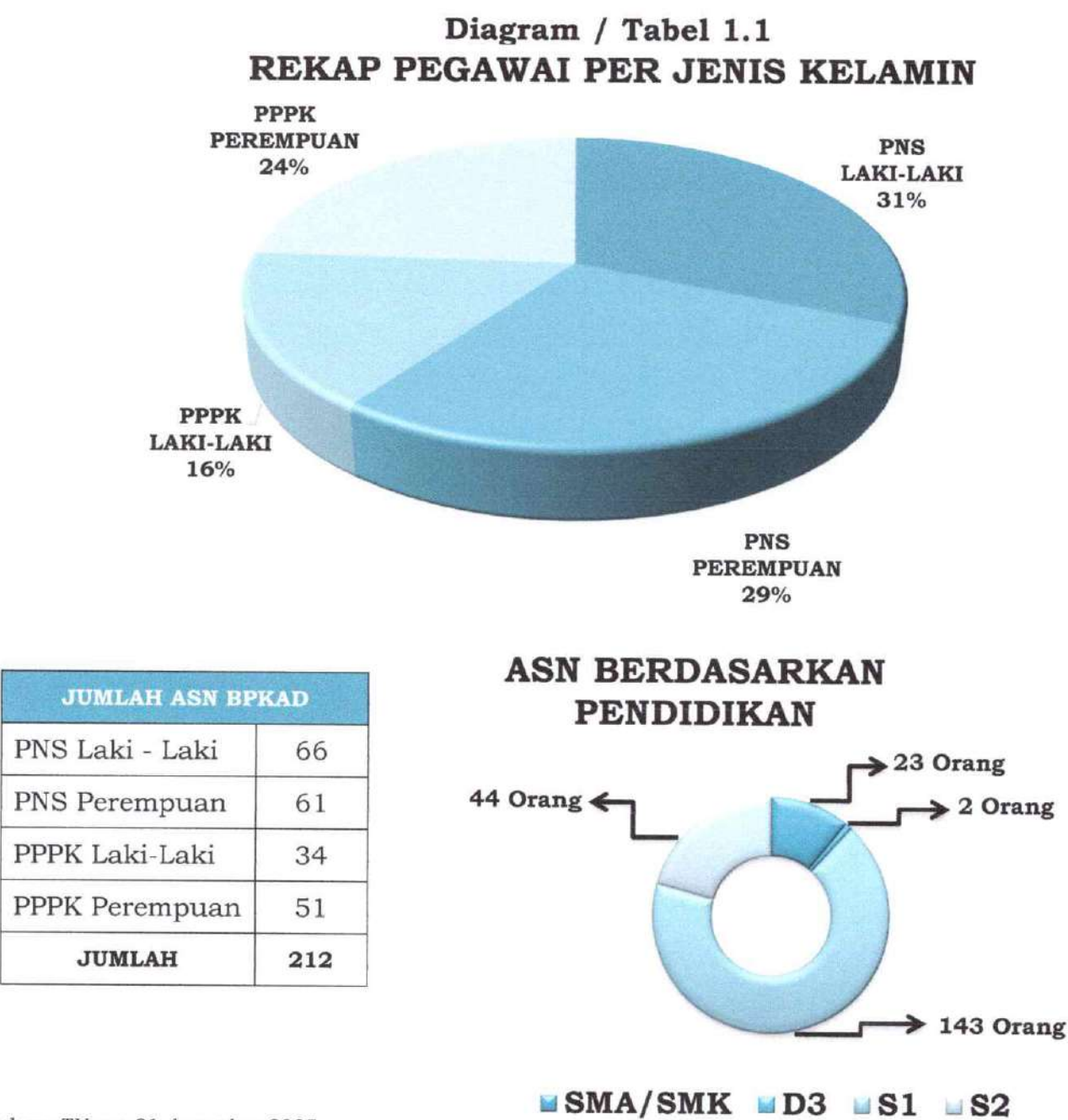
(2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

- 1. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- 2. Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
 - d. menghimpun bahan dan data, menganalisa serta menyelenggarakan kegiatan koordinasi penghapusan/ perubahan status hukum Aset Daerah;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
 - f. melakukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.

1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 212 orang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber daya Aparatur dapat dilihat pada Diagram berikut :



Sumber : TU per 31 desember 2025

1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana bagi aparaturnya BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

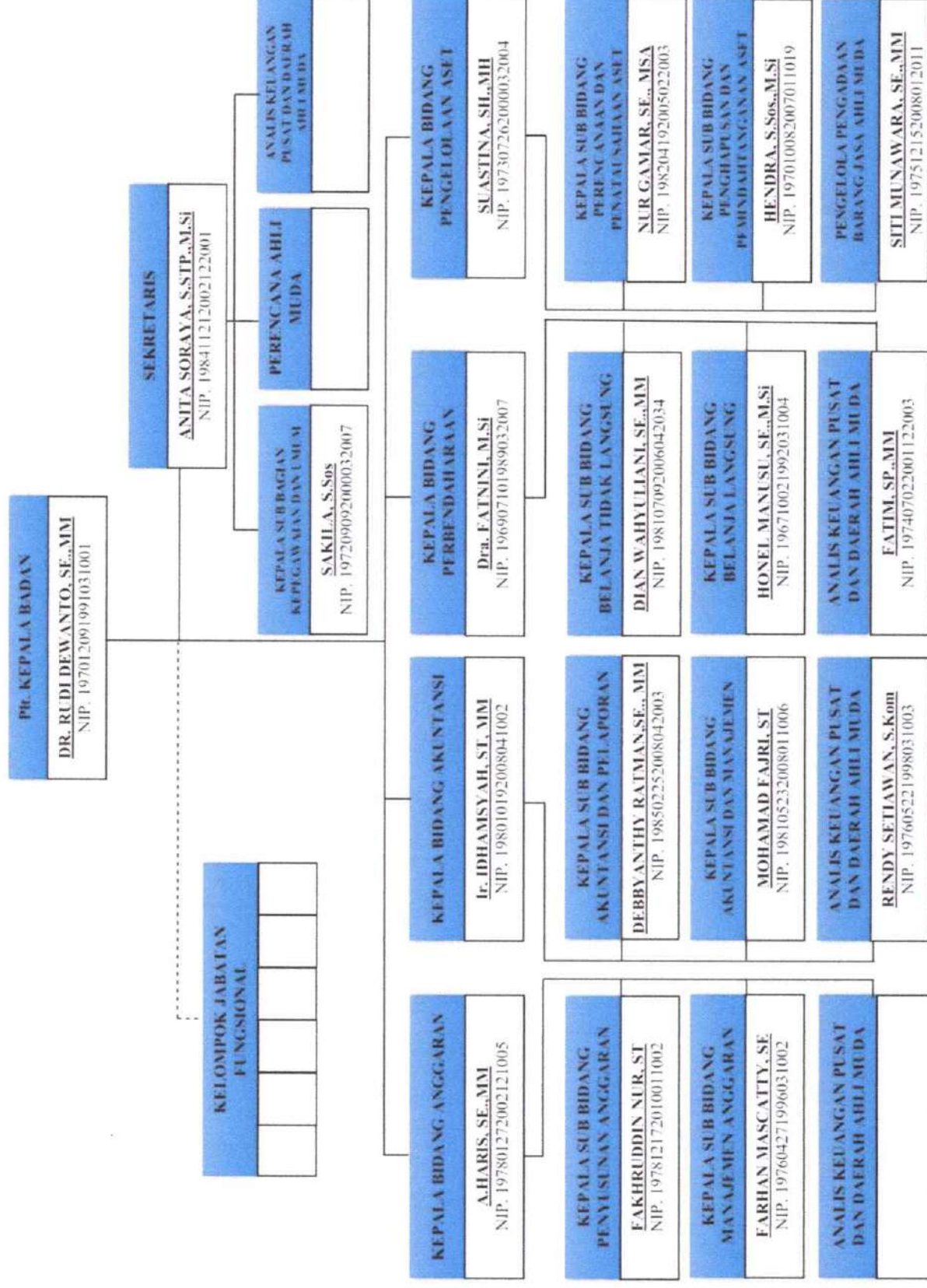
Tabel 1.2
Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	52.909.766.340,57
1	TANAH	5.723.405.406,17
1.01	TANAH	5.723.405.406,17
2	PERALATAN DAN MESIN	24.727.699.958,34
2.01	ALAT BESAR	183.306.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	10.747.243.501,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	151.898.904,10
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.710.758.384,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	989.381.794,24
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	47.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	75.925.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	43.219.300,00
2.10	KOMPUTER	7.744.507.075,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	13.000.000,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	21.460.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)

3	GEDUNG DAN BANGUNAN	20.219.820.995,05
3.01	BANGUNAN GEDUNG	19.853.636.995,05
3.02	MONUMEN	168.907.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	197.277.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.396.636.148,01
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	645.128.574,01
4.02	BANGUNAN AIR	242.993.674,00
4.03	INSTALASI	416.693.900,00
4.04	JARINGAN	91.820.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	743.331.305,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN / OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	743.331.305,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	98.872.528,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	98.872.528,00
1.5	ASET LAINNYA	37.576.853.650,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	2.879.730.000,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	2.879.730.000,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	21.545.895.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	21.545.895.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	13.151.228.650,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	13.151.228.650,00

Sumber : Rekapitulasi data aset BPKAD

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



1.3 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Aspek strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Eksistensi sebuah perangkat daerah bergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon aspek-aspek strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Aspek strategis yang dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Selain aspek strategis, dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Rumusan Isu
Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapabilitas	Perkembangan teknologi, informasi dan aplikasi yang begitu cepat	Kebutuhan peningkatan kualitas SDM BPKAD yang adaptif terhadap teknologi dan mampu mengelola keuangan serta aset daerah secara profesional dan akuntabel
Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai, ruang kerja terbatas	Kapasitas gedung kantor tidak sesuai dengan jumlah pegawai	Modernisasi dan pengembangan sarana serta ruang kerja yang memadai sesuai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan

			pelayanan BPKAD
Tindak Lanjut Temuan Audit	Percepatan tindak lanjut serta penyelesaian hasil temuan pemeriksaan	Kurangnya perhatian dari pihak ketiga, perangkat daerah/stakeholder dalam penyelesaian tindak lanjut	Penguatan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan percepatan penyelesaian temuan audit baik internal maupun eksternal yang berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah	Lambatnya proses pengelolaan keuangan daerah	Perubahan regulasi dan kebijakan	Percepatan adaptasi regulasi dan kebijakan baru serta optimalisasi proses pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi dan perbaikan sistem perencanaan
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan masing-masing perangkat daerah belum akuntabel dan tepat waktu	Kurangnya pemahaman pengelola laporan keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Peningkatan pemahaman dan kapasitas pengelola laporan keuangan perangkat daerah untuk menyusun laporan yang berkualitas dan tepat waktu
Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan	Sistem informasi pengelolaan keuangan dan Barang MD belum terintegrasi	Modul BMD belum terintegrasi ke perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban	Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan BMD
Koordinasi Pengelolaan BMD	Koordinasi pengelolaan BMD dengan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal	Inventarisasi dan pengamanan BMD tetap belum maksimal, belum tertibnya pengamanan BMD, dokumen lahan belum lengkap	Penguatan koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan BMD serta optimalisasi inventarisasi dan pengamanan aset dengan dokumen yang lengkap dan valid

Pada Bab II Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang berfokus pada realita capaian pembangunan serta kesenjangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Permasalahan ini diuraikan sebagai kondisi nyata yang menjadi hambatan atau tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

Secara khusus, dalam pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan difokuskan pada aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Rumusan permasalahan ini berangkat dari kesenjangan antara capaian layanan dan tata kelola keuangan yang ada dengan standar pengelolaan yang ideal, sehingga memerlukan pembenahan terarah dan strategis.

Identifikasi permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kertas kerja yang memetakan isu-isu kunci serta memberikan gambaran terperinci mengenai tantangan yang harus dihadapi dan dikelola oleh BPKAD ke depan. Kertas kerja ini diharapkan menjadi alat bantu yang efektif dalam perencanaan program dan kebijakan serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Rumusan isu dan identifikasi permasalahan sesuai Bab II RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan BPKAD, berdasarkan rumusan kondisi nyata (realita) dari akar masalah dan kesenjangan capaian dengan kondisi ideal.

TABEL 1.4

EVALUASI AKIP TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1.4 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN

HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Menyelaraskan kembali terhadap target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan check and review untuk memastikan dokumen yang disusun telah sesuai ketentuan	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah membuat Perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	-	https://drive.google.com/drive/folders/1xZkQnt_gdNoZhxx1qhcYDI2ws-F12NVW
2	Menyusun SOP/Pedoman teknis pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan membuat Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah membuat Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	-	https://drive.google.com/drive/folders/1z9dQ69y99gBnX-s1EN1erviucPvWQX34
3	Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja internal dilakukan pada seluruh bidang secara berjenjang dan berkelanjutan dan pelaksanaan hasil evaluasi dituangkan pada laporan kinerja monitoring evaluasi triwulan disertakan berita acara, notulen, daftar hadir dan dokumentasi	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Evaluasi kinerja Internal secara berjenjang dan berkelanjutan	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah melaksanakan kegiatan yang dimaksud dari TW 1 sampai TW 4 tahun 2024	-	https://drive.google.com/drive/folders/1A16RpUViNlgMDgu5vLTRBOYWSM1igm3
4	Memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan Pengukuran Capaian Kinerja secara Digital Tahun 2025	Telah dilaksanakan	-	sister.bpkad.sultengprov.go.id
5	Memastikan reward dan punishment yang diberikan relevan dan efektif dalam meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan pemberian punishment kepada pegawai	Untuk pemberian Reward akan dilaksanakan pada Tahun 2025	Karena terdapat Efisiensi Anggaran	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA PERANGKAT DAERAH

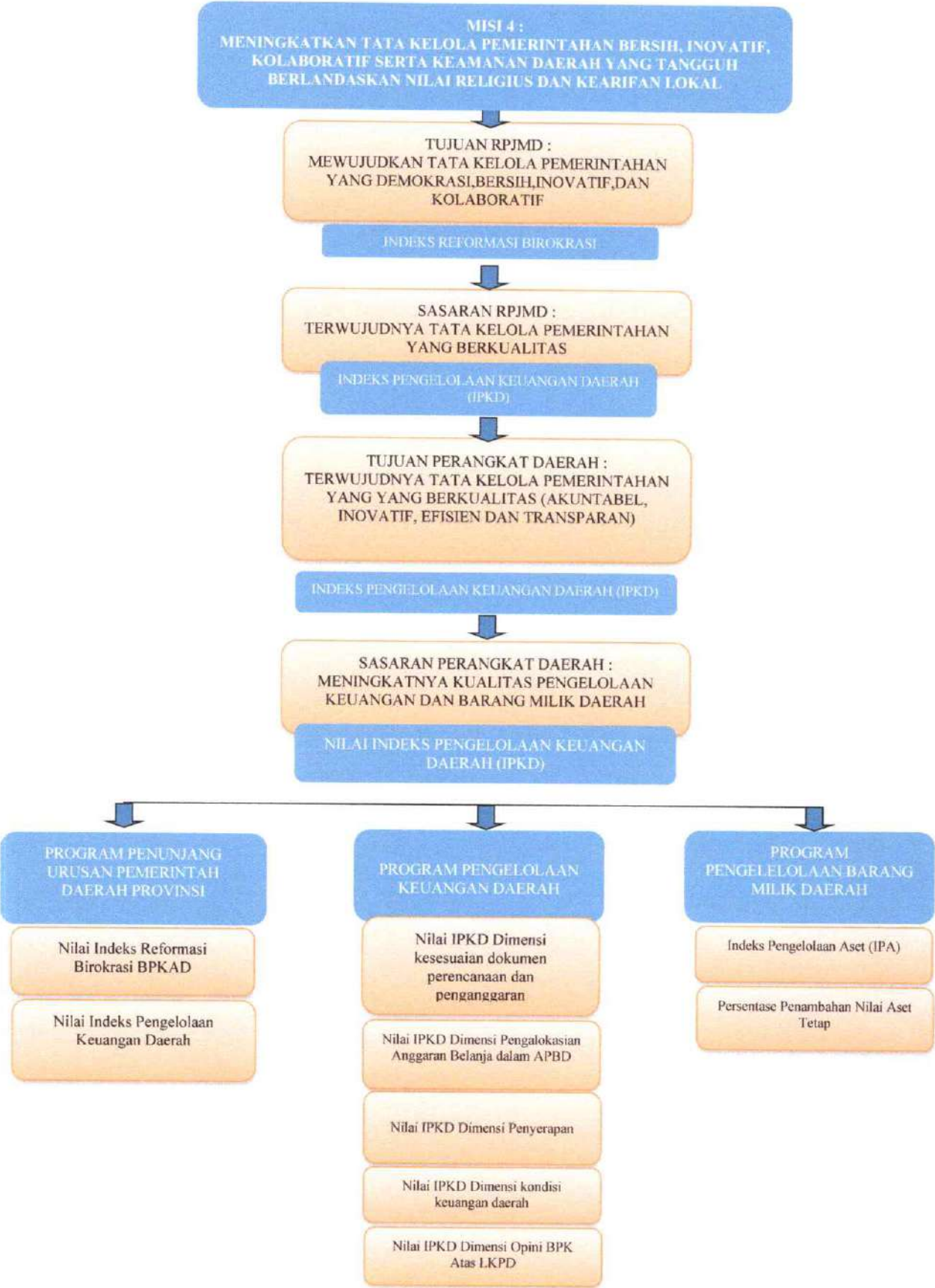
Cascading kinerja adalah menurunkan kinerja secara bertahap dan terbagi habis sampai dengan level paling bawah. Cascading kinerja disusun dengan tujuan agar organisasi mampu menyelaraskan kinerja organisasi terhadap kinerja unit kerja maupun kinerja individu dengan baik, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, maupun individu, serta mampu mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan tepat guna.

Dalam mewujudkan misi Gubernur Tahun 2021-2026, maka BPKAD mengampu misi keempat yaitu mewujudkan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Bersih, Inovatif, Kolaboratif Serta Keamanan Daerah Yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius Dan Kearifan Lokal. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan) dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).***

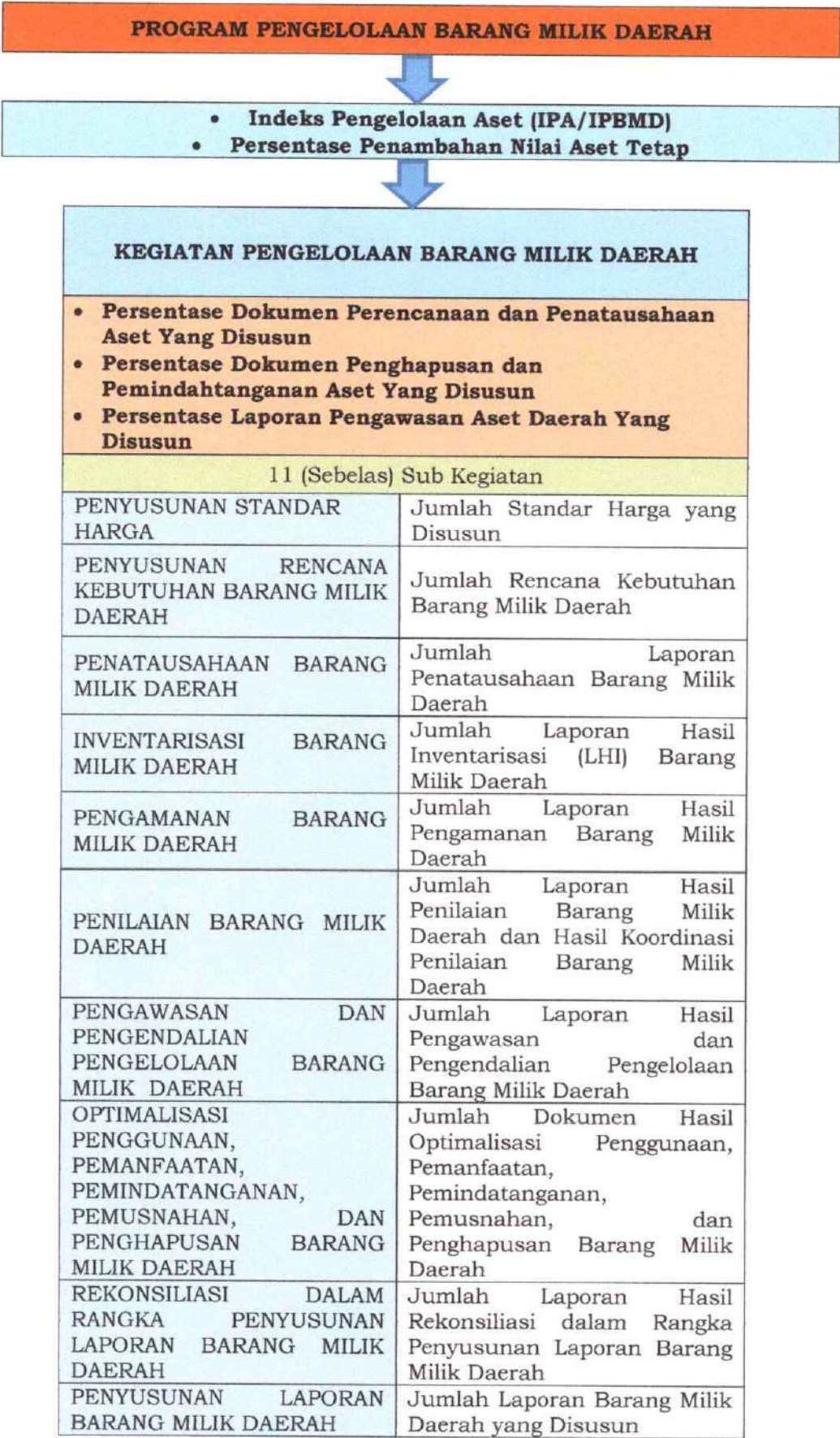
Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) serta Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

BAGAN 2.1
CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



[illegible]



2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari APBD terdiri 3 Program, 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.328.938.089.598,68	1.296.099.853.338,39	Berkurang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	486.981.643.899,05	244.430.023.812,77	Berkurang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	780.824.450,73	853.654.950,73	Bertambah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.891.450,73	171.644.950,73	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	56.301.000,00	54.488.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	67.950.000,00	46.700.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	60.350.000,00	57.100.000,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	48.850.000,00	48.850.000,00	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388.482.000,00	474.872.000,00	Bertambah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	477.240.072.046,50	231.175.502.989,22	Berkurang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	476.211.478.196,50	230.418.345.139,22	Berkurang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.640.000,00	341.690.000,00	Bertambah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.061.250,00	41.061.250,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.250.000,00	107.250.000,00	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	508.431.100,00	200.945.100,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.961.500,00	40.961.500,00	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.250.000,00	25.250.000,00	0
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.361.966,00	120.261.966,00	Berkurang
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	56.327.050,00	57.467.050,00	Bertambah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.534.916,00	49.294.916,00	Berkurang
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	627.876.200,00	721.459.125,00	Bertambah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.951.150,00	102.701.150,00	Bertambah
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	62.976.500,00	43.756.500,00	Berkurang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.362.000,00	64.074.475,00	Berkurang
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	143.853.550,00	214.382.000,00	Bertambah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	293.733.000,00	296.545.000,00	Bertambah
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.170.560,65	1.315.690.082,32	Bertambah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.421.677,00	85.595.384,00	Bertambah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.914.400,00	181.911.050,00	Bertambah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.362.900,00	154.700.010,00	Bertambah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.079.583,65	222.066.638,32	Bertambah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.392.000,00	671.417.000,00	Bertambah
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.261.664.883,76	3.107.507.036,76	Bertambah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.000.000,00	201.455.200,00	Berkurang
	Pengadaan Mebel	26.247.600,00	179.179.800,00	Bertambah
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	601.099.545,00	2.202.843.256,00	Bertambah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	415.317.738,76	524.028.780,76	Bertambah
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.597.363.754,50	4.532.880.498,00	Berkurang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.987.500,00	49.987.500,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.490.320.400,00	1.520.639.992,00	Bertambah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.793.600,00	427.313.600,00	Bertambah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.813.262.254,50	2.534.939.406,00	Berkurang
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.310.036,91	2.603.067.164,74	Bertambah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	902.870.000,00	1.061.550.000,00	Bertambah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.850.036,91	1.327.727.164,74	Bertambah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.590.000,00	213.790.000,00	Bertambah

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	838.144.445.699,62	1.035.297.949.655,62	Bertambah
10	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.146.909.025,00	5.413.746.225,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	504.006.250,00	535.313.150,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	245.383.600,00	352.745.600,00	Bertambah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	462.633.900,00	475.415.150,00	Bertambah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	173.858.225,00	133.388.225,00	Berkurang
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.667.834.800,00	1.817.831.100,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	334.250.875,00	711.859.625,00	Bertambah
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	758.941.375,00	1.387.193.375,00	Bertambah
11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	726.252.382,00	1.048.726.182,00	Bertambah
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	508.368.375,00	804.212.575,00	Bertambah
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	217.884.007,00	244.513.607,00	Bertambah
12	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.763.701.557,00	4.749.618.557,00	Bertambah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	288.314.450,00	422.507.425,00	Bertambah
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	492.318.490,00	492.994.980,00	Bertambah
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	595.893.410,00	680.670.410,00	Bertambah
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	439.162.642,00	869.413.637,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	298.126.800,00	226.103.400,00	Berkurang
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	269.644.550,00	137.984.550,00	Berkurang
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	585.633.450,00	925.566.450,00	Bertambah
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	794.607.765,00	994.377.705,00	Bertambah
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.257.582.741,00	4.583.416.241,00	Bertambah

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	947.765.250,00	1.044.045.000,00	Bertambah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.257.720.500,00	1.309.048.650,00	Bertambah
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.035.622.118,00	1.142.201.368,00	Bertambah
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.016.474.873,00	1.088.121.223,00	Bertambah
14	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	825.249.999.994,62	1.019.502.442.450,62	Bertambah
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.250.000.000,00	19.150.000.000,00	Bertambah
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.500.000.000,00	500.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	806.499.999.994,62	999.852.442.450,62	Bertambah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.000.000,00	16.371.879.870,00	Bertambah
15	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.000.000,00	16.371.879.870,00	Bertambah
	Penyusunan Standar Harga	164.914.850,00	174.969.550,00	Bertambah
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	106.592.700,00	151.152.200,00	Bertambah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.259.149.350,00	1.266.443.150,00	Bertambah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	218.108.300,00	11.865.996.870,00	Bertambah
	Pengamanan Barang Milik Daerah	715.432.950,00	1.186.273.100,00	Bertambah
	Penilaian Barang Milik Daerah	412.105.600,00	690.696.400,00	Bertambah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	236.578.450,00	355.227.200,00	Bertambah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	217.425.550,00	289.343.600,00	Bertambah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	276.225.500,00	120.318.800,00	Berkurang
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	205.466.750,00	271.459.000,00	Bertambah

Sumber : Data Capaian Kinerja dan RKPD 2025

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Renstra 2021-2026)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu : a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran b. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD c. Transparansi Pengelolaan d. Penyerapan Anggaran e. Kondisi Keuangan Daerah f. Opini BPK atas LKPD	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat• Bid. Anggaran• Bid. Perbendaharaan• Bid. Akuntansi
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel 2. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif 4. Administrasi BMD yang Andal	Kementerian Dalam Negeri	Bid. Aset
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	3. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK adalah pernyataan pemeriksa BPK tentang kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Penentuan opini didasarkan pada 4 kriteria yaitu : a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan informasi; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektifitas system pengendalian intern	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Semua Bidang

Sumber : IKU Kepala BPKAD 2021-2026

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
(Renstra 2025-2029)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	IPKD adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup 6 dimensi yaitu : g. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran h. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD i. Transparansi Pengelolaan j. Penyerapan Anggaran k. Kondisi Keuangan Daerah l. Opini BPK atas LKPD	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat• Bid. Anggaran• Bid. Perbendaharaan• Bid. Akuntansi

Sumber : IKU Kepala BPKAD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas 2.3 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Renstra 2021-2026 dibuat dengan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan pada tabel 2.4 Perubahan Renstra 2025-2029 Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi 1 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan atau alat ukur objektif yang digunakan oleh instansi pemerintah dan organisasi untuk menilai sejauh mana target strategis telah tercapai dalam periode tertentu. Setiap akhir tahun, pencapaian IKU akan dilaporkan dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**. Hasil ini akan menentukan nilai **SAKIP** (*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*) yang menjadi cerminan efisiensi birokrasi pada Opd tersebut.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Tahun 2025:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

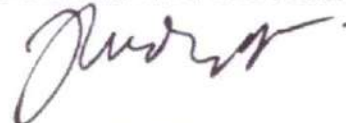
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

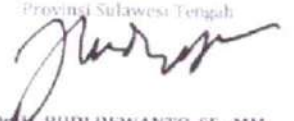
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100
2	Meningkatnya Kuantitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	3,03

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 486.981.643.899,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 838.144.445.699,00	
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	
TOTAL	Rp 1.328.938.089.598,00	

Gubernur Sulawesi Tengah


H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 Januari 2025
Pdt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. L. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR HAFID
 Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
 selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19701209 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32

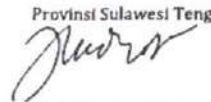
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.035.297.949.655,62	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 16.371.879.870,00	
TOTAL	Rp 1.296.099.853.338,39	

Gubernur Sulawesi Tengah



ANWAR HAFID

Palu, 11 Desember 2025
Pjt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Penyajian akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui penilaian, pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan perubahan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sehingga berdampak pada perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029.

Kinerja organisasi diukur melalui indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang diperjanjikan. Hasil pengukuran selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat pencapaian target, tren capaian antar tahun, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyajian Bab ini, diharapkan diperoleh gambaran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disusun analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dan realisasi kinerja (performance result) untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian target serta kesenjangan kinerja (performance gap) yang terjadi. Sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, analisis capaian kinerja dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- a. membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis;
- d. membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi nasional atau daerah lain yang relevan;
- e. menganalisis faktor penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif langkah perbaikan; dan
- f. menganalisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan adanya periode transisi perencanaan strategis pada Tahun 2025, analisis capaian kinerja disajikan dalam dua bagian, yaitu analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2021–2026 dan analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2025–2029.

A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis di Provinsi Sulawesi Tengah seiring dengan penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sebagai pengganti RPJMD Tahun 2021–2026. Perubahan dokumen perencanaan strategis tersebut berdampak pada penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2021–2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Tahun
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32	75,037	96,23%	Perlu Perbaikan	Tahun Ukur 2025
2.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	Baik	-	-	Tahun Ukur 2026
3.	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	Tahun Audit 2025

Sumber : Hasil olah data

TABEL 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Tahun
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32	75,037	96,23%	Perlu Perbaikan	Tahun Ukur 2025

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IPKD antara lain:

- Prioritas yang Berubah:
Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan yang berlaku dapat menurunkan nilai.
- Ketidakseimbangan Belanja:
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia secara mudah di situs web resmi.

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang ditetapkan berdasarkan peraturan Kemendagri (*Permendagri Nomor 19 Tahun 2020*) untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara sederhana, IPKD bekerja dengan cara menginput dokumen keuangan daerah dan Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan 6 dimensi pada IPKD.

Berikut adalah mekanisme cara kerja IPKD:

1. Enam Dimensi Pengukuran (Komponen Penilaian) Pengukuran IPKD tidak hanya melihat satu sisi, melainkan enam dimensi utama:
 - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran: Apakah APBD sejalan dengan dokumen rencana pembangunan (RKPD/RPJMD).
 - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD: Fokus belanja pada sektor produktif/pelayanan publik.
 - Transparansi pengelolaan keuangan daerah: Ketersediaan informasi keuangan untuk publik.
 - Penyerapan anggaran: Efisiensi penggunaan anggaran sepanjang tahun anggaran.
 - Kondisi keuangan daerah: Kesehatan fiskal daerah.
 - Opini BPK RI: Laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
2. Mekanisme Pengukuran dan Penilaian
 - Penginputan Data: Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan input data keuangan ke dalam sistem/aplikasi yang disediakan oleh BSKDN Kemendagri.
 - Verifikasi: Kemendagri melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diunggah.
 - Pembobotan: Setiap dimensi memiliki bobot tertentu (total 100%) untuk menentukan skor akhir.
3. Peningkatan Hasil

Berdasarkan nilai yang diperoleh, pemerintah daerah akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori (berdasarkan pedoman terbaru):

 - Kategori A (Baik): Nilai 81-100.
 - Kategori B (Perlu Perbaikan/Cukup Baik): Nilai 51-80.
 - Kategori C (Sangat Perlu Perbaikan/Kurang Baik): Nilai 50 kebawah
4. Tujuan IPKD
 - Peningkatan Kinerja: Mendorong daerah memperbaiki tata kelola keuangannya agar lebih efisien.

- Evaluasi: Memberikan gambaran seberapa baik keuangan daerah dikelola.
- Pembinaan: Membantu Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan.

pada indikator IPKD terdapat 4 Program yang mempengaruhi pencapaian program tersebut adalah.

- a. Program penunjang urusan pemerintahan pada program ini yang menjadi pendukung IPKD adalah Administrasi Kepegawaian pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan karena kegiatan ini terkait dengan tata cara pengimputan IPKD pada aplikasi. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap inputan, apabila kita tidak paham tata cara penginputan maka dapat dipastikan akan mengalami kegagalan atau hambatan. Karena dalam penginputan banyak sekali template perhitungan anggaran yang harus dibuat.

- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini yang menjadi pendukung ipkd adalah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pada kegiatan ini berkaitan dengan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan OPini BPK.

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS , KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali program antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya, maka pada program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS tidak mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan KUAPPAS dan APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan KUAPPAS dan APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi apabila sesuai maka akan mendapatkan poin 1 di tiap program yang sesuai.

- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi

Tengah hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tidak terpenuhinya alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, bakat dan kreartivitas siswa, SPM Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi dan terkait dengan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana

- **Penyerapan Anggaran**

Pada Dimensi ini, Pemerintah provinsi sulawesi Tengah telah mendapatkan skor maksimal dengan pemenuhan penyerapan anggaran sebesar 80%

- **Kondisi Keuangan Daerah**

Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian fiskal karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- **Opini BPK atas LKPD**

Pada dimensi ini pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sudah ,mendapatkan skor maksimal dengan ukuran telah mendapatkan opini WTP secara 3 Tahun berturut-turut.

2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) IPBMD adalah alat ukur kinerja yang menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

Definisi & Tujuan:

- **Alat Ukur Kualitas:** IPA berfungsi seperti nilai Indeks Prestasi (IP) atau hasil pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pengawasan dan pengendalian BMD.
- **Bagian Reformasi Birokrasi:** Ini menjadi komponen penilaian kinerja dalam program reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan digital.
- **Pencegahan Korupsi:** Peningkatan IPA diharapkan menurunkan risiko korupsi dan penyalahgunaan aset pemerintah.

Parameter Pengukuran:

Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:

1. Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi pengelolaan aset.
3. Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan pengawasan yang kuat.
4. Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.

3. Opini Bpk Terdapat LKPD, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan secara wajar. Opini ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD ini menggunakan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan kriteria dalam pemberian opini BPK berdasarkan:

- A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
- B. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures)
- C. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan
- D. Efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)

B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERAPA TAHUN TERAKHIR;

Sebagai bahan perbandingan Realisasi Kinerja pada indikator dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini :

TABEL 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025
(Renstra 2021–2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	77,593	Perlu Perbaikan	78,32	75,037	96,23%
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	-	2,13	2.85	Baik
3	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Sumber : Hasil olah data

TABEL 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2025
(Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	77,593	Perlu Perbaikan	78,32	75,037	96,23%

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan Tabel 3.4 dapat kita lihat Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun lalu dan berapa tahun terakhir sebagai berikut :

1. IPKD Pada tahun Ukur 2024 realisasi kinerja berada di Angka 77,593 dengan capaian di nilai B (perlu perbaikan). Berdasarkan target pada tahun ukur 2024 untuk capaian kinerjanya tercapai 100%. Sedangkan pada tahun ukur 2025 target kinerjanya B dan hasil yang dicapai juga B artinya untuk target tahun 2025 yang tercapai 100% capaian kinerjanya. Akan tetapi apabila kita melihat angka realisasi kinerja untuk tahun ukur 2024 dan tahun ukur 2025 mengalami penurunan angka dari 77,593 untuk tahun ukur 2024 dan 75,037 untuk tahun ukur 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan pada halaman 40.

Untuk LPKD tahun ukur 2024 ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan LPKD dari tahun ukur 2023 adalah:

- a. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang hampir sesuai dengan mandatory spending terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
 - b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan yang dibuktikan dengan tersedianya data pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yang dapat diakses melalui website pemerintah Sulteng.
2. IPA/IPBMD

Untuk realisasi kinerja capaian kinerja IPA/IPBMD belum dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penilaian dan penginputan data IPA/IPBMD baru dilakukan pada tahun 2025 yang akan di evaluasi pada tahun 2026.

3. Opini BPK Terhadap LKPD

Untuk opini BPK terhadap LKPD dapat dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 opini BPK yang di capaian adalah WTP terhadap LKPD tahun anggaran 2023, begitu dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025. Pemerintah Sulteng mendapatkan opini BPK WTP terhadap LKPD tahun anggaran 2024.

Realisasi Kinerja pada indikator pertama yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut ini :

DIAGRAM 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun
HASIL PENGUKURAN IPKD



Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Diagram diatas, Hasil pengukuran IPKD Prov. Sulteng TA 2021-2023 menunjukkan bahwa terus ada peningkatan dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit penurunan pada TA 2024 yaitu sebesar 3%. Penurunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dapat disebabkan oleh :

1. Adanya penambahan kriteria penilaian bagi alokasi belanja pemenuhan SPM pada Dimensi 2

- 2. Adanya Perubahan Mandatory Spending alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dari 25% menjadi 40% diluar DBH dan Dana Transfer kepada Kabupaten/Kota.
- 3. Terjadi perubahan pembobotan pada dimensi 6, dimensi 3 dan dimensi 5
- 4. Perubahan pengkategorian hasil pengukuran IPKD dari metode Baik (81-100), Perlu Perbaikan (51-80), Sangat Perlu Perbaikan (kurang dari 51)

Tabel 3.5 Capaian Ipkd Perdimensi

DIMENSI	TAHUN UKUR 2024	TAHUN UKUR 2025
D.1 KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	8,928	 10,704
D.2 PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA DALAM APBD	19,643	 14,146
D.3 TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,741	 12,188
D.4 PENYERAPAN ANGGARAN	15	 20
D.5 KONDISI KEUANGAN DAERAH	4,281	 8
D.6 OPINI BPK ATAS LKPD	15	 10
TOTAL	77,593	75,037
PERINGKAT	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan

Sumber : Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulawesi Tengah

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

D2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Faktor yang mempengaruhi dimensi ini antara lain:

- Prioritas yang Berubah:
Pergeseran prioritas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan mandatory spending dan pemenuhan SPM kebutuhan atau peraturan yang berlaku dapat menurunkan nilai.
- Ketidakseimbangan Belanja:
Alokasi belanja yang timpang antara belanja operasional dan belanja modal, yang tidak mendukung pembangunan daerah secara efektif.

D3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Skor transparansi dapat turun jika akses informasi publik terhadap dokumen keuangan daerah, seperti APBD, laporan keuangan, dan informasi pengadaan barang/jasa, kurang optimal atau tidak tersedia secara mudah di situs web resmi.

- INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)** adalah alat ukur kinerja yang menilai kualitas pengelolaan aset pemerintah (Barang Milik Negara/Daerah atau BMN/BMD) secara komprehensif, seperti akuntabilitas, kepatuhan, efektivitas pengawasan, dan keandalan administrasi, yang diukur dalam skala nilai (seringkali skala 4) sebagai bagian dari evaluasi reformasi birokrasi untuk mendorong tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

TABEL 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun
HASIL PENGUKURAN IPA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
		TAHUN UKUR 2024		TAHUN UKUR 2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	2,85	-	-	Baik

Sumber : perhitungan indeks pengelolaan aset (IPA)

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun ukur 2024 sebesar 2,85 lebih tinggi 0,72 dari indeks yang menjadi target yakni 2,13.

Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat BUMD, BLUD dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil penilaian tersebut disampaikan oleh kemendagri melalui hasil verifikasi dan disampaikan melalui Zoom Meeting. Sedangkan untuk tahun ukur 2025 tidak dilaksanakan pengukuran IPA(IPBMD). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan masa transisi penilaian IPA/IPBMD. Kemendagri masih menyusun keputusan mendagri (KEPMEN) terkait tata cara penilaian IPA/IPBMD

Parameter Pengukuran:

Penilaian IPA didasarkan pada empat sasaran strategis utama, yaitu:

- Pengelolaan Aset yang Akuntabel dan Produktif: Memastikan aset digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal.
 - Kepatuhan terhadap Peraturan: Ketaatan terhadap regulasi pengelolaan aset.
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektif: Kemampuan melakukan pengawasan yang kuat.
 - Administrasi yang Andal: Keandalan sistem administrasi aset.
3. **Opini BPK Terhadap LKPD** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah di wilayahnya secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menandakan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun seringkali disertai temuan perbaikan seperti kelemahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, atau pertanggungjawaban, terutama di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulteng sendiri telah meraih WTP berkali-kali, menunjukkan komitmen akuntabilitas keuangan daerahnya.

TABEL 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA KINERJA	TARGET KINERJA								KET
		2022		2023		2024		2025		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2022 dan 2023 memperoleh opini WTP sesuai dengan target 100%, serta untuk Tahun 2024 dan 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Untuk Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA;

Renstra (Rencana Strategis) yang mengalami perubahan pada Indikator Kinerja yang menandakan arah tujuan organisasi selama periode perencanaan, dari Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029. Meskipun Renstra bersifat dinamis dan dapat disesuaikan saat ada perubahan kebijakan dapat menunjukkan target serta visi-misi masih relevan dan sesuai dengan RPJMD.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 dan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengetahui posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap target akhir periode Tingkat kemajuan capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 3.8 dan 3.9 berikut.

TABEL 3.8 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2021–2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75.037	81,02	92,7 %
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.85	3,28	86,9 %
3.	Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%

Sumber : hasil olah data

TABEL 3.9 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Renstra (Renstra 2025–2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,037	81,02	92,7 %

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.8 dan 3.9 diatas Pada Indikator pertama Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 mendapatkan realisasi sebesar 75,037 dengan target akhir renstra cukup baik. Pengukuran dan penilaian IPKD berdasarkan 6 dimensi akan kembali dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan formulasi terbaru.

Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara realisasi tahun 2025 denga target akhir renstra di tahun 2029 sebesar 92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu dilakukan bukan hanya oleh BPKAd sebagai penanggung jawab akan tetapi perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua lini. Untuk mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai atau sama
- Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai atau sama
- Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta ouput dan capaiannya
- Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang disyaratkan
- Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus mencapai minimal 80%

- f. Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, akan tetapi bergantung pada PAD

Kemudian pada indikator 2, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengalami peningkatan realisasi sebesar 2.85 dari target sebelumnya 2.13 dengan target akhir renstra cukup baik, Pengukuran dan penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun 2026 menunggu hasil dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian pada indikator 3 yaitu Opini WTP menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, pada Realisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan target akhir Renstra 100% untuk dokumen LKPD Tahun 2024 dan Tahun audit 2025. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap tahunnya

D. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

TABEL 3.10

Hasil dan Peringkat IPKD Tahun Ukur 2025

Berdasarkan SK Mendagri Pemerintah Provinsi daerah Sulawesi

NO	Pemerintah Provinsi	Predikat	Nilai IPKD Tahun 2024 (Tahun Ukur 2025)	Kategori
1.	Sulawesi Tenggara	A	82,990	Baik
2.	Sulawesi Selatan	B	78,321	Perlu Perbaikan
3.	Sulawesi Tengah	B	75,037	Perlu Perbaikan
4.	Sulawesi Utara	B	71,344	Perlu Perbaikan

Sumber : hasil olah data

Data IPKD yang mengukur kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) baru saja melewati tahap penginputan dan validasi oleh BSKDN Kemendagri pada akhir tahun 2025. Hasil peringkat akhir

untuk tahun ukur 2025 ini diumumkan secara resmi pada awal tahun 2026.

Untuk indikator IPKD Tahun ukur 2025 menggunakan Tahun anggaran 2024. Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan mengapa nilai Pemprov belum mencapai nilai baik, hal ini disebabkan oleh

- Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini dituntut kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS , KUAPPAS dan APBD. Kendala yang dihadapi adalah, seringkali program antara RKPD dan KUAPPAS berbeda anggaran programnya, maka pada program yang tidak sesuai antara RKPD dan KUAPPAS tidak mendapatkan nilai atau point, begitupun juga dengan KUAPPAS dan APBD, apabila anggaran program tidak sesuai dengan KUAPPAS dan APBD maka tidak akan mendapatkan nilai. Akan tetapi apabila sesuai maka akan mendapatkan poin 1 ditiap program yang sesuai.

- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berkaitan dengan pemenuhan mandatory pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan Alokasi infrastruktur sebesar 40 % dan pemerintah Sulawesi Tengah hanya mengalokasikan sebesar 26,2%. Selain itu Tidak terpenuhinya alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, bakat dan kreartivitas siswa, SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi dan terkait dengan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana

- Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini mengalami kendala terkait dengan kemandirian fiskal karena dana transfer pemerintah provinsi Sulawesi Tengah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bila disandingkan dengan Nilai IPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan predikat baik dengan nilai 82,990 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kesesuaian Dokumen perencanaan dan penganggaran hamper seluruhnya terpenuhi sehigga memberikan skor yang tinggi pada dimensi ini
- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD hampir memenuhi mandatory spending sehingga pada dimensi ini memiliki skor yang tinggi hamper mencapai skor maksimal

- Transparansi Pengelolaan keuangan daerah hamper mendapatkan skor maksimal disebabkan karena hampir semua dokumen yang disyaratkan terpublikasi dengan jangka waktu paling lambat 30 hari setelah dikeluarkan
- Penyerapan Anggaran mendapatkan skor maksimal karena penyerapan anggaran mencapai minimal 80%
- Opini BPK terhadap LKPD mendapatkan skor maksimal karena telah mendapatkan opini BPK tiga tahun berturut-turut

Indeks Pengelolaan Aset (IPA), khususnya untuk Barang Milik Daerah (BMD), merupakan indikator kinerja yang relatif baru diimplementasikan dan terus mengalami penyesuaian, sehingga data historis perbandingan nasional yang konsisten masih terbatas.

TABEL 3.11 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi Lain

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional / Provinsi / Nama daerah lain	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Jawa Barat	WTP 14 kali berturut-turut sejak 2010 s/d 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Sulawesi Tengah	WTP 10 kali berturut-turut sejak 2014 s/d 2024
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Provinsi Sulawesi Utara	WTP 12 kali berturut-turut sejak 2012 s/d 2024

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Perbandingan WTP secara nasional penjelasannya sebagai berikut :

1. Pemerintah **Provinsi Jawa Barat** meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Pemerintah **Provinsi Sulawesi Tengah** meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3. Pemerintah **Provinsi Sulawesi Utara** meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA

Pencapaian Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja telah berjalan dengan baik. Capaian dalam Program-Program pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Adapun indikator kinerja Program kegiatan yaitu :

TABEL 3.12

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Program RPJMD (2025-2029)	Target 2025	Capaian 2025
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85	85
	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	14,74	12,19
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Nilai)	8,93	10,7
	Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	19,64	17,43
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah (Nilai)	15	20

	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	4,28	8
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK Atas LKPD (Nilai)	15	10
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9,76	9,76
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) /Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)	2,13	2,13

Sumber : RPJMD 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan penyebab keberhasilan dan Kegagalan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan
 - a. Nilai Indeks RB pada tahun 2025 ditetapkan nilai indeks RB 85%, sedangkan realisasi hanya 43,27%. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penilaian terkait RB terdapat bukti dukung yang ditolak oleh aplikasi SPBE belum tersedia dokumen manajemen resiko SPBE dan peta rencana SPBE.
- 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Nilai IPKD Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan

Pada indikator Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan ditetapkan target dengan nilai 10,70 dan realisasinya adalah 10,70 artinya capaian kinerjanya tercapai 100%. Hal ini disebabkan oleh terdapat beberapa program yang sesuai antara Pagu dengan

KUAPPAS, dengan Pagu KUAPPAS dengan APBD. Walaupun memang belum mencapai angka maksimal pada dimensi ini.

b. Nilai IPKD Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja

Dalam APBD pada dimensi ini ditetapkan target dengan nilai 17,43 sedangkan realisasi hanya 14,146 dengan capaian 81,16. Hal ini disebabkan karena:

- Alokasi infrastruktur hanya sebesar 26.2% dari total belanja APBD, tidak mencapai 40%
- Tidak memenuhi keterpenuhan alokasi atas perhitungan kebutuhan pada SPM Pendidikan Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dan SPM Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
- Tidak memenuhi ketercapaian output atas target pada SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi

▪ Nilai IPKD Dimensi Transparansi

Berdasarkan realisasi nilai IPKD Diskusi Transparansi didapatkan realisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan hampir terpenuhinya semua dokumen yang menjadi Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Nilai IPKD Dimensi Penyerapan.

Pada dimensi ini capaian yang didapatkan adalah 100% disebabkan karena realisasi yang didapat sesuai dengan yang ditargetkan yakni 20. Hal ini disebabkan karena semua belanja sudah memenuhi penyerapan anggaran minimal sebesar 80%.

d. Nilai dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Pada dimensi ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi nilai 8. Walaupun memang masih sangat jauh dari bobot maksimal sebesar 20. Hal ini berkaitan dengan kemandirian keuangan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

e. Nilai Dimensi Opini BPK

Pada dimensi ini, capaian yang dihasilkan adalah 100% dengan realisasi mencapai target maksimal 10. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan opini BPK selama 3 tahun berturut-turut.

3. Program Pengelolaan BMD

- Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada indikator Indeks Pengelolaan Aset pada tahun 2025 belum dapat diukur disebabkan pada tahun 2025 belum dilakukan pengukuran IPA/IPBMD, pengukuran akan dilakukan tahun 2026.

Selain penjelasan diatas, pada tahun 2025 Bpkad diperhadapkan pada realisasi Anggaran yang tidak mencapai target, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Efisiensi Anggaran dan Pengendalian belanja perangkat daerah pada TW IV Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan surat edaran Nomor 49 tahun 2025 sehingga setiap perangkat daerah harus melakukan evaluasi prioritas belanja dengan memprioritaskan realisasi belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat wajib, mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
2. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang hanya mencapai 62,34% hal ini disebabkan oleh penganggran PPPK yang sudah dianggarkan dari bulan maret akan tetapi terjadi penundaan pengangkatan PPPK yang semula bulan maret menjadi bulan juni.
3. Terdapat Realisasi dana bagi hasil Provinsi hanya sebesar 76,41% atau sekitar Rp. 763.978,286,04 dari anggaran sebesar Rp. 999,852,442.62,- hal ini disebabkan karena kurang salur Dana Bagi Hasil Tahun 2024 pada beberapa kabupaten belum disalurkan dan Dana Bagi Hasil (DBH) TW IV Tahun 2025 belum dilasalurkan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Belum disalurkannya sebagian kurang salur Tahun 2024 dan TW IV Tahun 2025 disebabkan oleh kebijakan dalam rangka menjaga keseimbangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi sumber daya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terhadap penyerapan anggaran belanja dalam mengukur capaian kinerja sehingga pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa tercapai dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.13 Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	75,037	Cukup Baik	1.261.890.036.403,84	938.337.804.964,04	74,36%	25,64%
2	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,13	2.85	Baik	16.371.879.870,00	15.146.721.365,00	92,52%	7,48%
3	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	100%	100%	4.583.416.241,00	4.222.213.169,00	92,12%	7,88%

Sumber : Dokumen LRA BPKAD

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk indikator IPKD yang mencakup kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dapat di hitung Tingkat efisiensinya berdasarkan total anggaran dan realisasi anggaran, didapatkan hasil sebesar 25,64%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat efisiensi secara standar masuk pada kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target untuk IPKD harusnya tercapai akan tetapi untuk IPKD Tahun 2025 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa factor yang sdh dijelaskan di awal seperti adanya perubahan inddikator pengukuran dan perubahan skor pembobotan pada beberapa dimensi. Tidak terpenuhinya mandatory spending infrastruktur sebesar 40 %.

2. IPA/ IPBMD

Untuk indikator IPA/IPBMD belum dapat diukur disebabkan karena pada Tahun 2025 Kementrian Dalam Negeri masih menyusun

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penilaian Indeks Pengelolaan Aset/ Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga untuk efisiensi Indikator tersebut belum dapat di hitung

3. Opini BPK terhadap LKPD

Untuk indikator opini BPK terhadap LKPD, mencakup kegiatanKoordiansi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat di hitung Tingkat efisiensinya berdasarkan total anggaran dan realisasi anggaran, didapatkan hasil sebesar 7,88%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat efisiensi secara standar masuk pada kategori sangat rendah yaitu dibawah 80%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikaitkan bahwa efisiensi dan target tetap tercapai walaupun terdapat efisiensi sebesar 7,88%. Hal ini ditandai dengan tercapainya target WTP pada tahun audit 2025

G. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pada tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 Program Penunjang dan 2 Program Prioritas serta 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 3.14 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	BPKAD				1.296.099.853.338,39		970.240.626.787,04		74,86%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD, Meningkatnya Kualitas Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD, Nilai IPKD Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah	88,86 15	244.430.023.812,77	88,86 15	156.881.231.751,00	100%	64,18%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan. 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan	1. Nilai SAKIP BPKAD 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	87,91 100%	853.654.950,73	87,91 100%	789.599.929,00	100%	92,50%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersusunnya dokumen bukti dukung dalam E-Sakip Reviu (ESR) Kemenpan 2. Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 2	171.644.950,73	9 2	129.258.679,00	100%	75,31%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN
		Bisnis								
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	54.488.000,00	1 Dok	46.268.247,00	100%	84,91%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	46.700.000,00	1 Dok	43.495.997,00	100%	93,14%	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	57.100.000,00	1 Dok	56.579.097,00	100%	99,09%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	48.850.000,00	1	48.637.536,00	100%	99,57%	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	474.872.000,00	7	465.360.373,00	100%	98,00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	231.175.502.989,22	75	144.347.344.462,00	100%	62,44%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	230.418.345.139,22	100%	143.646.875.382,00	100%	62,34%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terverifikasinya Dokumen Pertanggung Jawaban BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	341.690.000,00	100%	336.680.596,00	100%	98,53%
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	41.061.250,00	1 Dok	40.481.415,00	100%	98,59%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	107.250.000,00	1	104.982.021,00	100%	97,89%
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	200.945.100,00	100%	153.670.410,00	100%	76,47%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	40.961.500,00	2	39.528.457,00	100%	96,50%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25.250.000,00	1	25.126.181,00	100%	99,51%
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD yang Sesuai Ketentuan	100%	120.261.966,00	100%	87.320.577,00	100%	72,61%
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	13.500.000,00	2 Dok	13.432.998,00	100%	99,50%
16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	57.467.050,00	1 Dok	26.112.931,00	100%	45,44%
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	49.294.916,00	2 Dok	47.774.648,00	100%	96,92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara BPKAD 1. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK 2. Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpublikasi	65	721.459.125,00	65	591.303.552,00	100%	81,96%
		2.Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpublikasi		65		65		100%	
		Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN BPKAD		100%		100%		100%	
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	102.701.150,00	100%	81.856.995,00	100%	79,70%
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	135	43.756.500,00	135	33.273.750,00	100%	76,04%
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	64.074.475,00	5	16.141.996,00	100%	25,19%
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	214.382.000,00	100	176.949.990,00	100%	82,54%
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang di publikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	296.545.000,00	29	283.080.821,00	100%	95,46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) 2. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada BPKAD	1. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI 1. Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD 2. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	20 65 65%	1.315.690.082,32	20 65 65%	1.249.086.193,00	100%	94,94%
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	85.595.384,00	1	74.220.336,00	100%	86,71%
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	5	181.911.050,00	5	165.424.721,00	100%	90,94%
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	154.700.010,00	1	143.911.475,00	100%	93,03%
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, PERDA, dll) BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	222.066.638,32	100%	216.820.048,00	100%	97,64%
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terkompilasinya dokumen pemenuhan LKE Pembangunan ZI 2. Tertanganinya pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor di BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 100%	671.417.000,00	1 100%	648.709.613,00	100%	96,62%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65	3.107.507.036,76	65		2.962.307.360,00	100%		95,33%
28	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	201.455.200,00	1		160.900.000,00	100%		79,87%
29	Pengadaan Mebel	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	179.179.800,00	1		162.714.900,00	100%		90,81%
30	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	2.202.843.256,00	1		2.119.258.260,00	100%		96,21%
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dsb)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	524.028.780,76	1		519.434.200,00	100%		99,12%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD3. Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD4. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi3. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada BPKAD4. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	6581,7	4.532.880.498,00	6581,7	4.306.520.674,00	100%		95,01%
				46565		46565				
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD 2. Terkelolanya arsip statis BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90% 90%	49.987.500,00	90% 90%	46.095.725,00	100%		92,21%
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1.520.639.992,00	2	1.452.846.413,00	100%		95,54%
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya data sektoral BPKAD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	427.313.600,00	1	397.146.286,00	100%		92,94%
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tersusunnya dokumen kebijakan pelayanan BPKAD (SP, MP, dan laporan SKM) 2. Terukurnya SKM pada layanan BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	2.534.939.406,00	3	2.410.432.250,00	100%		95,09%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Lingkup BPKAD	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	65%	2.603.067.164,74	65%	2.547.749.004,00	100%	97,87%		
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	1.061.550.000,00	13	1.049.365.304,00	100%	98,85%		
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.327.727.164,74	3	1.312.309.000,00	100%	98,84%		
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan kantor dan Mesin lainnya	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	3	213.790.000,00	3	186.074.700,00	100%	87,04%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Meningkatnya Kualitas Anggaran Belanja dalam APBD 2. Meningkatnya Kualitas Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	1. Nilai IPKD Dimensi Kualitas anggaran belanja dalam APBD 2. Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	19,800 19,8	1.035.297.949.655,62	19,800 19,8	798.212.673.671,04	100%	77,10%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran 2.Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun 2.Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	100% 100%	5.413.746.225,00	100% 100%	5.309.767.905,00	100%		98,08%
39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1.Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS 2.Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 2	535.313.150,00	2 2	525.293.368,00	100%		98,13%
40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	2	352.745.600,00	2	344.006.582,00	100%		97,52%
41	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53	475.415.150,00	53	464.507.881,00	100%		97,71%
42	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Terverifikasinya DPA - SKPD Perangkat Daerah	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	53	133.388.225,00	53	133.383.719,00	100%		100,00 %
43	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	1.817.831.100,00	2	1.798.771.175,00	100%		98,95%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	711.859.625,00	2	697.993.780,00	100%	98,05%
45	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencanaan Penganggaran Daerah di Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	266	1.387.193.375,00	266	1.345.811.400,00	100%	97,02%
9	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	100%	1.048.726.182,00	100%	1.034.766.226,00	100%	98,67%
46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13	804.212.575,00	13	795.557.675,00	100%	98,92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
47	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13	244.513.607,00	13	239.208.551,00	100%	97,83%		
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah2.Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah3.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	1.Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu2.Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu3.Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100% 100% 100%	4.749.618.557,00	100% 100% 100%	4.517.135.085,00	100%	95,11%		
		Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24	422.507.425,00	24	415.519.907,00	100%	98,35%		
		Tersedianya Penyediaan Dana APBD	Jumlah Dokumen HasilPengendalian dan PenerbitanAnggaran Kas dan SPD	4	492.994.980,00	4	492.445.014,00	100%	99,89%		
48	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
49	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
50	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1. Tersusnya Dokumen SP2D 2.Tersusnya Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4	680.670.410,00	4	677.524.293,00	100%	99,54%	
				12		12				
51	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tepra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20	869.413.637,00	20	868.238.126,00	100%	99,86%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN		
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN
52	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA2. Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	Jumlah Laporan RealisasiPenerimaan dan Pengeluaran KasDaerah, Laporan Aliran Kas, danPelaksanaanPemungutan/Pe motongan danPenyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK) dan Laporan HasilKoordinasi dalam rangkaPenyusunan Laporan RealisasiPenerimaan dan Pengeluaran KasDaerah, Laporan Aliran Kas, danPelaksanaanPemungutan/Pe motongan danPenyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	22	226.103.400,00	22		211.895.257,00	100%	93,72%	
53	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uag Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1.Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana 2.Pemerintah Daerah Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dengan Bidang Akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil KoordinasiPelaksanaan Piutang dan UtangDaerah yang Timbul AkibatPengelolaan Kas, PelaksanaanAnalisis Pembiayaan danPenempatan Uang Daerah sebagaiOptimalisasi Kas	10 4	137.984.550,00	10 4		137.977.600,00	100%	99,99%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN
54	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	17	925.566.450,00	17	910.715.841,00	100%	98,40%	
55	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan ke Perangkat Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100	994.377.705,00	100	802.819.047,00	100%	80,74%	
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.019.502.442.450,62	100%	783.128.791.286,04	100%	76,81%	
58	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	19.150.000.000,00	1	19.150.000.000,00	100%	100,00 %	
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	500.000.000,00	1	-	100%	0,00%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
60	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	999.852.442.450,62	4		763.978.791.286,04	100%		76,41%
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures); Patuh Terhadap Peraturan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures); Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas	100%	4.583.416.241,00	100%		4.222.213.169,00	100%		92,12%
61	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	400	1.044.045.000,00	400		991.835.084,00	100%		95,00%
62	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82	1.309.048.650,00	82		1.165.792.478,00	100%		89,06%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
63	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225	1.142.201.368,00	225	1.076.157.128,00	100%	94,22%
64	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	1.088.121.223,00	2	988.428.479,00	100%	90,84%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) 2. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2,76 100	16.371.879.870,00	2,76 100	15.146.721.365,00	100%	92,52%
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset 3. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Aset Daerah	1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun 2. Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun 3. Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun	100% 100% 100%	16.371.879.870,00	100% 100% 100%	15.146.721.365,00	100%	92,52%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	KINERJA	ANGGARAN
67	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Buku Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	174.969.550,00	2		164.908.384,00	100%		94,25%
68	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD (Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindatananganan dan Penghapusan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2	151.152.200,00	2		148.791.637,00	100%		98,44%
69	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	1.266.443.150,00	2		1.044.220.064,00	100%		82,45%
70	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	2	11.865.996.870,00	2		11.091.876.538,00	100%		93,48%
71	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	1.186.273.100,00	2		1.083.773.679,00	100%		91,36%
72	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindatananganan BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	690.696.400,00	2		667.260.659,00	100%		96,61%
73	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42	355.227.200,00	42		325.496.621,00	100%		91,63%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
74	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2. Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 4	289.343.600,00	1 4	263.891.290,00	100%	91,20%
75	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	242	120.318.800,00	242	120.108.981,00	100%	99,83%
76	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD 2.Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK 3.Penilaian Pemanfaatan BMD di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 80 100	271.459.000,00	1 80 100	236.393.512,00	100%	87,08%

Sumber : Hasil olah data

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel maka penggunaan anggaran yang efektif dan efisien perlu dilakukan serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025, BPKAD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.296.099.853.338,39,-** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **970.240.626.787,04,-**

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Untuk mengukurnya dapat dilihat berikut ini :

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{RA}{PA} \times 100\% \\
 P &= \text{Penyerapan anggaran} \\
 RA &= \text{Akumulasi Realisasi Anggaran} \\
 PA &= \text{Akumulasi Pagu Anggaran} \\
 &= \frac{1.296.099.853.338,39}{970.240.626.787,04} \times 100 \% \\
 &= 74,86 \%
 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL 3.15
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFESIENSI
	BPKAD	1.296.099.853.338,39	970.240.626.787,04	325.859.226.551,35	74,86%	25,14%
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	244.430.023.812,77	156.881.231.751,00	87.548.792.061,77	64,18%	35,82%
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	853.654.950,73	789.599.929,00	64.055.021,73	92,50%	7,50%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	171.644.950,73	129.258.679,00	42.386.271,73	75,31%	24,69%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54.488.000,00	46.268.247,00	8.219.753,00	84,91%	15,09%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	46.700.000,00	43.495.997,00	3.204.003,00	93,14%	6,86%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	57.100.000,00	56.579.097,00	520.903,00	99,09%	0,91%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.850.000,00	48.637.536,00	212.464,00	99,57%	0,43%
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.175.502.989,22	144.347.344.462,00	86.828.158.527,22	62,44%	37,56%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230.418.345.139,22	143.646.875.382,00	86.771.469.757,22	62,34%	37,66%
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	341.690.000,00	336.680.596,00	5.009.404,00	98,53%	1,47%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.061.250,00	40.481.415,00	579.835,00	98,59%	1,41%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107.250.000,00	104.982.021,00	2.267.979,00	97,89%	2,11%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.945.100,00	153.670.410,00	47.274.690,00	76,47%	23,53%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.961.500,00	39.528.457,00	1.433.043,00	96,50%	3,50%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.250.000,00	25.126.181,00	123.819,00	99,51%	0,49%
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.261.966,00	87.320.577,00	32.941.389,00	72,61%	27,39%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	13.432.998,00	67.002,00	99,50%	0,50%
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.467.050,00	26.112.931,00	31.354.119,00	45,44%	54,56%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.294.916,00	47.774.648,00	1.520.268,00	96,92%	3,08%
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	721.459.125,00	591.303.552,00	130.155.573,00	81,96%	18,04%
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	102.701.150,00	81.856.995,00	20.844.155,00	79,70%	20,30%
SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.756.500,00	33.273.750,00	10.482.750,00	76,04%	23,96%
SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.074.475,00	16.141.996,00	47.932.479,00	25,19%	74,81%
SUB KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	214.382.000,00	176.949.990,00	37.432.010,00	82,54%	17,46%
SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296.545.000,00	283.080.821,00	13.464.179,00	95,46%	4,54%
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.315.690.082,32	1.249.086.193,00	66.603.889,32	94,94%	5,06%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.595.384,00	74.220.336,00	11.375.048,00	86,71%	13,29%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.911.050,00	165.424.721,00	16.486.329,00	90,94%	9,06%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	154.700.010,00	143.911.475,00	10.788.535,00	93,03%	6,97%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		216.820.048,00	5.246.590,32	97,64%	2,36%
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.066.638,32			96,62%	3,38%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
		671.417.000,00	648.709.613,00	22.707.387,00		
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.107.507.036,76	2.962.307.360,00	145.199.676,76	95,33%	4,67%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.455.200,00	160.900.000,00	40.555.200,00	79,87%	20,13%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	179.179.800,00	162.714.900,00	16.464.900,00	90,81%	9,19%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.202.843.256,00	2.119.258.260,00	83.584.996,00	96,21%	3,79%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	524.028.780,76	519.434.200,00	4.594.580,76	99,12%	0,88%
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.532.880.498,00	4.306.520.674,00	226.359.824,00	95,01%	4,99%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.987.500,00	46.095.725,00	3.891.775,00	92,21%	7,79%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.520.639.992,00	1.452.846.413,00	67.793.579,00	95,54%	4,46%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.313.600,00	397.146.286,00	30.167.314,00	92,94%	7,06%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.534.939.406,00	2.410.432.250,00	124.507.156,00	95,09%	4,91%
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.603.067.164,74	2.547.749.004,00	55.318.160,74	97,87%	2,13%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.061.550.000,00	1.049.365.304,00	12.184.696,00	98,85%	1,15%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.327.727.164,74	1.312.309.000,00	15.418.164,74	98,84%	1,16%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.790.000,00	186.074.700,00	27.715.300,00	87,04%	12,96%
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.035.297.949.655,62	798.212.673.671,04	237.085.275.984,58	77,10%	22,90%
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.413.746.225,00	5.309.767.905,00	103.978.320,00	98,08%	1,92%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				98,13%	1,87%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
		535.313.150,00	525.293.368,00	10.019.782,00		
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	352.745.600,00	344.006.582,00	8.739.018,00	97,52%	2,48%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	475.415.150,00	464.507.881,00	10.907.269,00	97,71%	2,29%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	133.388.225,00	133.383.719,00	4.506,00	100,00%	0,00%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.817.831.100,00	1.798.771.175,00	19.059.925,00	98,95%	1,05%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	711.859.625,00	697.993.780,00	13.865.845,00	98,05%	1,95%
SUB KEGIATAN	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1.387.193.375,00	1.345.811.400,00	41.381.975,00	97,02%	2,98%
KEGIATAN	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.048.726.182,00	1.034.766.226,00	13.959.956,00	98,67%	1,33%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	804.212.575,00	795.557.675,00	8.654.900,00	98,92%	1,08%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	244.513.607,00	239.208.551,00	5.305.056,00	97,83%	2,17%
KEGIATAN	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.749.618.557,00	4.517.135.085,00	232.483.472,00	95,11%	4,89%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	422.507.425,00	415.519.907,00	6.987.518,00	98,35%	1,65%
SUB KEGIATAN	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	492.994.980,00	492.445.014,00	549.966,00	99,89%	0,11%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	680.670.410,00	677.524.293,00	3.146.117,00	99,54%	0,46%
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	869.413.637,00	868.238.126,00	1.175.511,00	99,86%	0,14%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	226.103.400,00	211.895.257,00	14.208.143,00	93,72%	6,28%
SUB KEGIATAN	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	137.984.550,00	137.977.600,00	6.950,00	99,99%	0,01%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	925.566.450,00	910.715.841,00	14.850.609,00	98,40%	1,60%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	994.377.705,00	802.819.047,00	191.558.658,00	80,74%	19,26%
KEGIATAN	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.019.502.442.450,62	783.128.791.286,04	236.373.651.164,58	76,81%	23,19%
SUB KEGIATAN	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19.150.000.000,00	19.150.000.000,00	-	100,00%	0,00%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00%	100,00%
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	999.852.442.450,62	763.978.791.286,04	235.873.651.164,58	76,41%	23,59%
KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.583.416.241,00	4.222.213.169,00	361.203.072,00	92,12%	7,88%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.044.045.000,00	991.835.084,00	52.209.916,00	95,00%	5,00%
SUB KEGIATAN	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.309.048.650,00	1.165.792.478,00	143.256.172,00	89,06%	10,94%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.142.201.368,00	1.076.157.128,00	66.044.240,00	94,22%	5,78%

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN	EFISIENSI
SUB KEGIATAN	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.088.121.223,00	988.428.479,00	99.692.744,00	90,84%	9,16%
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	16.371.879.870,00	15.146.721.365,00	1.225.158.505,00	92,52%	7,48%
KEGIATAN	Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.371.879.870,00	15.146.721.365,00	1.225.158.505,00	92,52%	7,48%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Standar Harga	174.969.550,00	164.908.384,00	10.061.166,00	94,25%	5,75%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	151.152.200,00	148.791.637,00	2.360.563,00	98,44%	1,56%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.266.443.150,00	1.044.220.064,00	222.223.086,00	82,45%	17,55%
SUB KEGIATAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah	11.865.996.870,00	11.091.876.538,00	774.120.332,00	93,48%	6,52%
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.186.273.100,00	1.083.773.679,00	102.499.421,00	91,36%	8,64%
SUB KEGIATAN	Penilaian Barang Milik Daerah	690.696.400,00	667.260.659,00	23.435.741,00	96,61%	3,39%
SUB KEGIATAN	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Mitik Daerah	355.227.200,00	325.496.621,00	29.730.579,00	91,63%	8,37%
SUB KEGIATAN	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	289.343.600,00	263.891.290,00	25.452.310,00	91,20%	8,80%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	120.318.800,00	120.108.981,00	209.819,00	99,83%	0,17%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	271.459.000,00	236.393.512,00	35.065.488,00	87,08%	12,92%

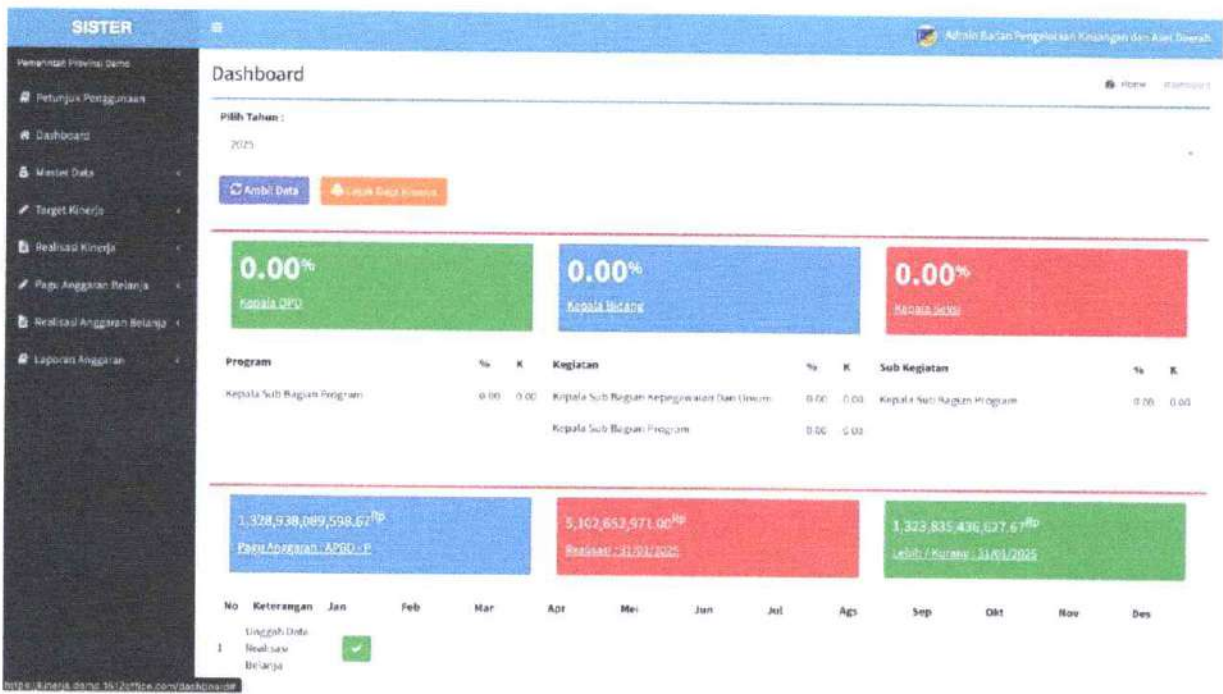
Sumber : Realisasi Anggaran BPKAD tahun 2025

3.3 INOVASI

Dalam mendukung kinerja BPKAD dalam membuat terobosan pengelolaan data dan pelaksanaan kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebagai berikut:

Sekretariat

Aplikasi SISTER
Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi



Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SISTER) adalah Aplikasi tahun pembuatan 2025 yang dirancang untuk memudahkan Pimpinan dalam melakukan Evaluasi Kinerja BPKAD secara Realtime dan dapat memudahkan pimpinan dalam melakukan Evaluasi Kinerja bawahannya. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang berdampak pada pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

3.4 PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapatkan Penghargaan sebagai berikut:



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2023** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **85,65** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2024** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **87,90** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun **2025** karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai **85,10** dari nilai maksimum 100 dengan kategori **A**.



BPKAD Mendapatkan Penghargaan Peringkat 3 Kategori Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja juga dapat dijadikan saran atau pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan sangat memuaskan dengan capaian realisasi anggaran mencapai Rp. **970.240.626.787,04,-** atau 74,86% dari anggaran sebesar Rp. **1.296.099.853.338,39,-** dan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penyerapan anggaran belanja ini mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada indikator IPKD dapat kita lihat Tingkat kemajuan antara realisasi tahun 2025 dengan target akhir renstra di tahun 2029 sebesar 92,7%. Untuk mencapai hal tersebut perlu beberapa hal yang perlu dilakukan bukan hanya oleh BPKAD sebagai penanggung jawab akan tetapi perlu juga komitmen kuat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada semua lini. Untuk mencapai tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pagu program pada Pembahasan RKPD dan KUAPPAS harus sesuai atau sama
- B. Pagu program pada Pembahasan KUAPPAS dan APBD harus sesuai atau sama
- C. Pengalokasian anggaran harus memehuni mandatory spending dan pemenuhan SPM yang telah disyaratkan beserta output dan capaiannya

- D. Akses informasi terhadap dokumen keuangan daerah harus dipublikasikan do website pemerintah provinsi sulaweis Tengah paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya dokumen yang disyaratkan
- E. Penyerapan anggaran pemerintah provinsi Sulawesi tengah harus mencapai minimal 80%
- F. Kondisi Keuangan daerah yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, akan tetapi bergantung pada PAD
- G. Opini BPK terhadap LKPD harus WTP di tiap tahunnnnya

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan. tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian Laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan Sulawesi Tengah lebih maju lagi.



LAMPIRAN

PK AWAL 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

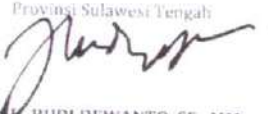
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	3.03

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 486.981.643.899,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 838.144.445.699,00	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	
TOTAL	Rp 1.328.938.089.598,00	

Gubernur Sulawesi Tengah


H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 Januari 2025
Pj. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. R. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANITA SORAYA S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710724 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

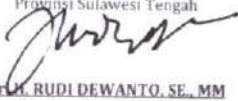
SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	93,02
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip BPKAD	87,91
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Bukti Pendukung Dalam E Sakip Reviu (ESR) Kemenpan	Jumlah Dokumen Pendukung e-Sakip Reviu Kemenpan RB Yang Tersusun	9 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis	Jumlah Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis Yang Tersusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen DPA BPKAD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA BPKAD Yang Tersusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian IKU PD	7 Dokumen
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dan Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	49
		Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	75
	- Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN)	- Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan Yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100%
	- Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban BPKAD	- Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Yang Diverifikasi dan Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	- Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Tersusun	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan	- Persentase Bahan Tanggapan dan Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan Yang Tersusun	100 %
	- Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	1 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Yang Sesuai Ketentuan	100%
	- Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	- Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	2 Dokumen
	- Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diamankan Lingkup BPKAD	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
4	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN Ber-AKHLAK	65
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindakanlanjutan Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65
		Persentase Tindakanlanjutan Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65
6	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegritas	81,74
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial Pada BPKAD	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelola Kearsipan Digital BPKAD	65
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di pelihara	65

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 393.975.021.311,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 780.824.450,73	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 158.891.450,73	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 56.301.000,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 67.950.000,00	

- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp	60.350.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	48.850.000,00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	388.482.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	477.240.072.046,50
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	476.211.478.196,50
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	305.640.000,00
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	41.061.250,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	40.961.500,00
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	25.250.000,00
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	508.431.100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	107.250.000,00
3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	127.361.966,00
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	13.500.000,00
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	56.327.050,00
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	57.534.916,00
4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rp	627.876.200,00
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	850.170.560,00
6 Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	1.261.664.883,76
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.597.363.754,50
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.496.310.036,91

Pt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

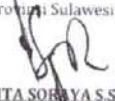


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025

Sekretaris

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



ANITA SOBRYA S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKILA, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


SAKILA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720909 200003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65
		Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi Pegawai BPKAD	- Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	138 Paket
	- Terupdatanya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN BPKAD	- Persentase Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN Yang Terupdate	100%
	- Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	- Jumlah Pegawai Yang Dinilai Kinerjanya	135 Orang
	- Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Yang Dibina Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang
	- Terbinanya ASN Tentang Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	- Jumlah ASN Yang Mendapat Pembinaan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	100 Orang
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	- Jumlah Paket Instalasi Listrik	1 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	- Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Yang Disediakan	5 Paket
	- Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Paket
	- Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, Perda, Dll) BPKAD	- Persentase Hukum Yang Disusun	100 %
	- Terkomfasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI Yang Tekomplikasi	1 Dokumen
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendering, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Yang Dimanfaatkan	1 Laporan
		- Jumlah Paket Mebel Yang Menggunakan Sistem Elektronik	1 Paket
	- Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN	- Jumlah Laporan P3DN Sesuai TKDN Yang Disusun	1 Laporan
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendering, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Pengadaan Gedung Yang Menggunakan Sistem Elektronik	1 Unit
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi	81.74
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65
	- Terkelolanya Arsip Dinas Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD	- Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik Dan Digital Yang Dikelola	90%
	- Terkelolanya Arsip Statis BPKAD	- Persentase Arsip Statis Yang Dikelola	90%
	- Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	- Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Yang Tersusun	2 Dokumen
	- Tersedianya Data Sektoral BPKAD	Jumlah Laporan Data Sektoral	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan BPKAD (SP, MP, dan Laporan SKM)	- Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan Yang Disusun	3 Dokumen
	- Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD	- Jumlah Jenis Layanan Yang Diukur Dengan SKM	46 Jenis

5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik daerah	65
	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
	- Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	3 Bangunan
	- Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	3 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 627.876.200,00	Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 41.951.150,00	
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Rp 62.976.500,00	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 85.362.000,00	
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 143.853.550,00	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 293.733.000,00	
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 850.170.560,65	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 39.421.677,00	
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 78.914.400,00	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 35.362.900,00	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 88.079.583,65	
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 608.392.000,00	
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.261.664.883,76	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 219.000.000,00	
- Pengadaan Mebel	Rp 26.247.600,00	
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 601.099.545,00	
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 415.317.738,76	
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.597.363.754,00	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 49.987.500,00	
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.490.320.400,00	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 243.793.600,00	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.813.262.254,00	
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.496.310.036,91	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 902.870.000,00	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 466.850.036,91	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 126.590.000,00	

Sekretaris
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

ANITA SORAYA S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum



SAKILA S.Sus
Penata Tingkat I
NIP. 19720909 200003 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	Nilai IPKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	15
	Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,5
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	100
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	100
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	13 Surat Keputusan
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13 Surat Keputusan

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran)	Rp	4.146.909.025,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
1. Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	4.146.909.025,00	
2. Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	726.252.382,00	
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp	508.368.375,00	
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp	217.884.007,00	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRUDDIN NUR, ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FAKHRUDDIN NUR, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19781217 201001 1 002

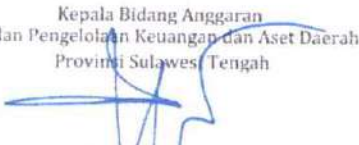
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

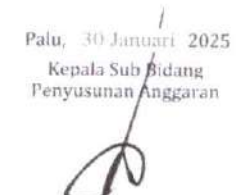
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Produk Hukum
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Produk Hukum
	- Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencana Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah Provinsi	- Jumlah Aparatur Yang terbina	266 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 2.761.027.050,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Derah Tentang Penjabaran APBD	Rp 1.667.834.800,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 334.250.875,00	
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 758.941.375,00	

Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


A. HARIS, SE., MM
Pemvina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Penyusunan Anggaran


FAKHRUDDIN NUR, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19781217 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

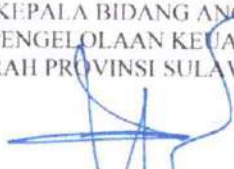
Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG MANAJEMEN
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FARHAN MASCATTY, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760427 199603 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK	- Jumlahh Dokumen ASB dan HSPK	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA & Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
	- Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah RKA- SKPD Perang Daerah Yang Diverifikasi	53 Dokumen
	- Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah	- Jumlah DPA-SKPD Perangkat Daerah yang Diverifikasi	53 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.385.881.975,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 504.006.250,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 245.383.600,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 462.633.900,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 173.858.225,00	

Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


A. HARIS, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Manajemen Anggaran


FARHAN MASCATTY, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760427 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

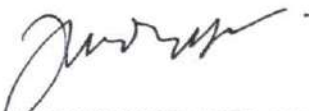
Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

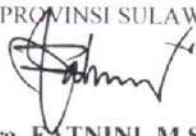
PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dra. FATNINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kondisi Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	4.2
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	24 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	- Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	10 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi	4 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	- Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	2 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi TASPEN dan BPJS	- Jumlah Laporan Berita Acara	
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	17 Laporan
B	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran	15
I	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN)	Rp	3.763.701.557,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	1.441.719.250,00	
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp	288.314.450,00	
- Kordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas	Rp	269.644.550,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp	298.126.800,00	
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan instansi Terkait	Rp	585.633.450,00	
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	825.249.999.994,62	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Bidang
Perbendaharaan

Dra. FATNINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE.,MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FATNINI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK
LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DIAN WAHYULIANI, SE., MM

Penata Tingkat I
NIP. 19810709 200604 2 034

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

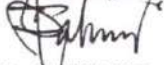
SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	- Jumlah Dokumen SP2D	4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	- Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	12 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	- Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	2 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
	- Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah Laporan Bantuan Keuangan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	- Jumlah Laporan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	- Jumlah Laporan	4 Laporan

KEGIATAN

	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 894.020.210,00	
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 595.893.410,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	Rp 298.126.800,00	
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 825.249.999.994,62	
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 2.250.000.000,00	
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 16.500.000.000,00	
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp 806.499.999.994,62	

Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

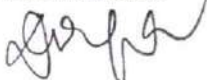


Dra. RATNINI, M.Si
Pembina Tingkat 1

NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025

Kepala Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung



DIAN WAHYULIANI, SE., MM
Penata Tingkat I

NIP. 19810709 200604 2 034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HONEL MANUSU, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FATNINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG
PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

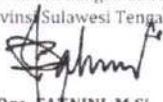
HONEL MANUSU, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19671002 199203 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersedianya Penyediaan Dana APBD	- Jumlah Dokumen Penyediaan Dana APBD	4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	- (Jumlah Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	20 Laporan
	- Tersusunnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	Jumlah Dokumen SP2D	4 Dokumen
	- Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Perangkat Daerah	- Jumlah Aparatur Yang Tersosialisasi	100 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 2.321.982.307,00	
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 492.318.490,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya	Rp 439.162.642,00	
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp 794.607.765,00	
- PenataUsahaan Pembiayaan Daerah	Rp 595.893.410,00	

Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. FATNINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Belanja Langsung

HONEL MANUSU, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19671002 199203 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDHAMSIAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSIAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

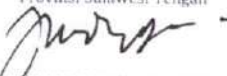
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atau Unqualified Opinion	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Menyajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, Posisi Keuangan, Hasil Usaha, dan Arus Kas Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia	100%
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standae Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi,	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225 Rancangan Peraturan

PROGRAM

	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Rp 4.257.582.741,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.035.622.118,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 1.035.622.118,00	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

D. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Bidang
Akuntansi

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBYANTHY RATMAN, SAK., MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA.

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA.

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEBBYANTHY RATMAN, SE.Ak., MM
Pembina
NIP. 19850225 200804 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standae Akuntansi Pemerintah (SAP). Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
	- Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	82 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Sistem Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 2.274.195.373,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.257.720.500,00	
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.016.474.873,00	

Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Akuntansi dan Pelaporan

DEBBYANTHY RATMAN, SE. Ak., MM
Pembina
NIP. 19850225 200804 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRI, ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSIAH, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSIAH, ST., MM

Pembina

NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOHAMAD FAJRI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19810523 200801 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
-	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	400 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 947.765.250,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Rp 947.765.250,00	

Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. IDHAMSyah, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Akuntansi Manajemen



MOH. MAD. F. JRI, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19810523 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH.,MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

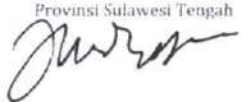
SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah	Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Diperangkat Daerah	2 Laporan
	- Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.812.000.000,00	Sumber dana
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 952.011.400,00	yang digunakan
- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 715.432.950,00	pada semua
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 236.578.450,00	program ini
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.325.557.100,00	adalah APBD
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 652.965.750,00	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Bidang
Pengelolaan Aset Daerah

SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR GAMAR, SE., MSA
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

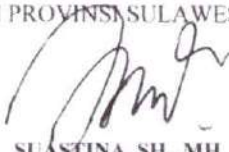
Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


NUR GAMAR, SE., MSA
Penata Tingkat I
NIP. 19820419 200502 2 003

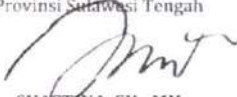
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Buku Standar Harga	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku
	- Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca BMD	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	80 Laporan
	Penilaian Pemanfaatan BMD di Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Usulan Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMD	100
	- Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD (Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan)	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2 Surat Keputusan
	- Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Berita Acara rekonsiliasi	242 Berita Acara
	- Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.230.457.450,00	Sumber dana yang
- Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp 164.914.850,00	digunakan pada
- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 218.108.300,00	semua kegiatan ini
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 205.466.750,00	adalah APBD
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 106.592.700,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 1.259.149.350,00	
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 276.225.500,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset



NUR GAMAR, SE., MSA
Penata Tingkat I
NIP. 19820419 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ,S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

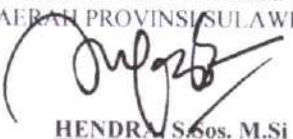
PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHITANGANAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


HENDRA, S.Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19701008 200701 1 019

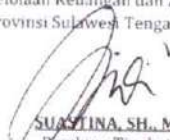
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Kordinasi Penilaian Barang milik Daerah	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 629.531.150,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 412.105.600,00	
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 217.425.550,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


SUASTINA, S.H., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 30 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Penghapusan dan Pemindah Tangan Aset


HENDRA, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 196501011990031 044



LAMPIRAN
PK PERUBAHAN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

GOVERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78,32

PROGRAM

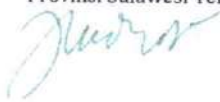
	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.035.297.949.655,62	
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 16.371.879.870,00	
TOTAL	Rp 1.296.099.853.338,39	

Gubernur Sulawesi Tengah



ANWAR HAFID

Palu, 11 Desember 2025
Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANITA SORAYA S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710724 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Lingkup BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,86 Indeks
	Meningkatnya Kualitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	12.34 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai Sakip BPKAD	87,91 Nilai
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD	100 %
	Tersusunnya Dokumen Bukti Pendukung Dalam E-Sakip Reviu (ESR) Kemenpan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Resiko dan Peta Proses Bisnis		2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen RKA BPKAD	- Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-BPKAD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen DPA BPKAD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA BPKAD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dan Penyelesaian Tindakanjutr Hasil Pemeriksa (TLHP)	Persentase TLHP BPK dan APIP Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	49 %
		Persentase Capaian Realisasi APBD BPKAD	75 %
	- Terdistribusinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP Lingkup BPKAD. (Tersusunnya Dokumen Usulan Gaji dan Tunjangan ASN)	- Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100%
	- Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan BPKAD dalam Penyelesaian Tindakanjutr Hasil Pemeriksa (TLHP)	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 %
	- Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Akuntansi BPKAD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Bahan Tenggapan dan Tindakanjutr Hasil Pemeriksa	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa dan Tindakanjutr Pemeriksa	100 %
	- Tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada BPKAD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Yang Sesuai Ketentuan	100%
	- Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
	- Teramankannya Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah Pada BPKAD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	2 Dokumen
4	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65 Indeks
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN Ber-AKHLAK	65 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%

5	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Persentase Tindakanjutan Laporan Pengaduan SP4N Lapor	20 Nilai
		Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	65 Nilai
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindakanjutan Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65 %
	6 Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa BPKAD	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65 Nilai
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65 Nilai
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegritas	81.74 Nilai
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Pada BPKAD	65 Nilai
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65 Nilai
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Di pelihara	65 %

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 244.430.023.812,77	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 853.654.950,73	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 171.644.950,73	
-	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 54.488.000,00	
-	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 46.700.000,00	
-	Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 57.100.000,00	
-	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 48.850.000,00	
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 474.872.000,00	
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 231.175.502.989,22	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 230.418.345.139,22	
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 341.690.000,00	
-	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 41.061.250,00	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 107.250.000,00	
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 200.945.100,00	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 40.961.500,00	
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 25.250.000,00	
3	Administrtasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 120.261.966,00	
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 13.500.000,00	
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 57.467.050,00	
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 49.294.916,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 721.459.125,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.315.690.082,32	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 3.107.507.036,76	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.532.880.498,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.603.067.164,74	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Sekretaris
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

ANITA SORAYA S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKILA, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Prov. Sulteng
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANITA SORAYA S.STP.,M.Si
Jabatan : Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANITA SORAYA S.STP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SAKILA, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19720909 200003 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Lingkup BPKAD	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara BPKAD	65 Indeks
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65 Nilai
	- Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Bagi Pegawai BPKAD	Persentase Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terpublikasi	100%
	- Terupdatenya Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN BPKAD	- Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	138 Paket
	- Terukurnya Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup BPKAD	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
	- Terbinanya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	135 Orang
	- Terbinanya ASN Tentang Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
	- Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipublikasi	- Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	- Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan Pada BPKAD	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	20 Nilai
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkup BPKAD	Nilai Indeks Reformasi Hukum BPKAD	65 Nilai
	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan BPKAD	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	65 %
	- Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan	- Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket
	- Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, Perda, Dll) BPKAD	- Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan	5 Paket
	- Terkomilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	1 Paket
	- Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor di BPKAD	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa BPKAD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada SPSE	65 Nilai
	- Tersusunnya Laporan P3DN Sesuai TKDN	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Laporan
	- Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Tendring, e-Purchasing, e- Katalog, dsb)	- Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket
		- Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	1 Laporan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit
	Meningkatnya Kematangan SPBE BPKAD	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik BPKAD	65 Nilai
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi	81.74 Nilai
	- Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital BPKAD	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorai Pada BPKAD	65 Nilai
	- Terkelolanya Arsip Statis BPKAD	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital BPKAD	65 Nilai
	- Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90%
	- Tersedianya Data Sektorai BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	90%
	- Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan BPKAD (SP, MP, dan Laporan SKM)	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Dokumen
	- Terukurnya SKM Pada Layanan BPKAD	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
			3 Dokumen
			46 Dok

5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	65 %
-	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit
-	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas	3 Bangunan
-	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas	3 Unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 721.459.125,00	Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 102.701.150,00	
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Rp 43.756.500,00	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 64.074.475,00	
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 214.382.000,00	
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 296.545.000,00	
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.315.690.082,32	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 85.595.384,00	
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 181.911.050,00	
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 154.700.010,00	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 222.066.638,32	
- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 671.417.000,00	
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.107.507.036,76	
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 201.455.200,00	
- Pengadaan Mebel	Rp 179.179.800,00	
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 2.202.843.256,00	
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 524.028.780,76	
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.532.880.498,00	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 49.987.500,00	
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.520.639.992,00	
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 427.313.600,00	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.534.939.406,00	
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 2.603.067.164,74	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Rp 1.061.550.000,00	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.327.727.164,74	
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 213.790.000,00	

Sekretaris

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah



ANITA SORAYA S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19841121 200212 2 001

Palu, 11 Desember 2025

Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum



SAKILA S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19720909 200003 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


A. HARIS, SE., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Nilai IPKD Dimensi Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD	17,43%
	Meningkatnya Kualitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai IPKD Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,70%
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Disusun	100 %
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran yang Disusun	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terevaluasi Terkait Perencanaan Anggaran Daerah	100 %
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	13 Surat Keputusan
-	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	13 Surat Keputusan

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran)	Rp	6.462.472.407,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
1 Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	5.413.746.225,00	
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.048.726.182,00	
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp	804.212.575,00	
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp	244.513.607,00	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN MASCATTY, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Manajemen Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE., MM
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG MANAJEMEN
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

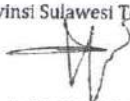
FARHAN MASCATTY, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19760427 199603 1 002

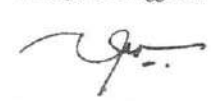
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG MANAJEMEN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Anggaran	Persentase Manajemen Anggaran Yang Disusun	100%
	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan HSPK		2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA & Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
	- Terverifikasinya RKA - SKPD Perangkat Daerah	Jumlah RKA- SKPD Yang Diverifikasi	53 Dokumen
	- Terverifikasi DPA-SKPD Perangkat Daerah	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.496.862.125,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 535.313.150,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 352.745.600,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 475.415.150,00	
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 133.388.225,00	

Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

A. HARIS, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Manajemen Anggaran

FARHAN MASCATTY, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19600907 198503 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRUDDIN NUR, ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : A. HARIS, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. HARIS, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN
ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

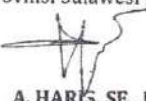
FAKHRUDDIN NUR, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19781217 201001 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	- Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Produk Hukum
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Produk Hukum
	- Terbinanya Aparatur Pengelolah Perencana Penganggaran Daerah Diperangkat Daerah Provinsi	- Jumlah Orang Yang Mengikutin Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	266 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.916.884.100,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Derah Tentang Penjabaran APBD	Rp 1.817.831.100,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
- Kordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 711.859.625,00	
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 1.387.193.375,00	

Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

A. HARG. SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19780127 200212 1 005

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Penyusunan Anggaran

FAKHRUDDIN NUR. ST
Penata Tingkat I
NIP. 19781217 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001


Dra. FATNINI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah	Nilai IPKD Dimensi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah	15 Nilai
	Meningkatnya Kondisi Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	4.2 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pendapatan dan Pengeluaran	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen
	- Tersedianya Penyediaan Dana APBD	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas SPD	4 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen SP2D	- Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang di Tentukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Laporan Tepra	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Laporan
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pemda KPPN, KPP PRATAMA	- Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Dokumen
	- Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penempatan Dana Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan	10 Dokumen
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dengan Bidang Akuntansi		4 Dokumen
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	17 Laporan
	- Tersosialisasinya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Ke Perangkat Daerah	- Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Panatusahaan Keuangan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN)	Rp 1.024.252.061.007,62	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 4.749.618.557,00	
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 422.507.425,00	
- Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran SPD	Rp 492.994.980,00	
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 680.670.410,00	
- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 869.413.637,00	
- Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kegita (PFK)	Rp 226.103.400,00	

- Kordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi kas	Rp	137.984.550,00
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi Terkait	Rp	925.566.450,00
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp	994.377.705,00
2 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.019.502.442.450,62

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang
Perbendaharaan



Dra. FATNINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN WAHYULIANI, SE.,MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. FATNINI, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. FATNINI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690710 198903 2 007

KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK
LANGSUNG PERBENDAHARAAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DIAN WAHYULIANI, SE., MM

Penata Tingkat I

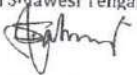
NIP. 19810709 200604 2 034

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Langsung Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100%
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai	- Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Taspen dan BPJS	- Jumlah Laporan Realsasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Kewenangan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
	- Tersusunnya Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Darurat	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 906.773.810,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD.
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 680.670.410,00	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 226.103.400,00	
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.019.502.442.450,62	
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 19.150.000.000,00	
	- Tersusunnya laporan Pengelolaan Dana Darurat	Rp 500.000.000,00	
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp 999.852.442.450,62	

Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. FATNINI M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 198903 2 007

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Belanja Tidak Langsung

DIAN WAHYULIANI SE
Penata Tingkat I
NIP. 19810709 200604 2 034



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

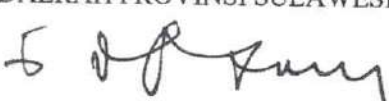
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH


Ir. IDHAMSYAH, ST., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion	Nilai IPKD Dimensi Opini BPK terhadap LKPD	100%
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures) Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	100%
	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	225 Rancangan
2	Meningkatnya Kualitas Akuntansi Manajemen	Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun	100%

PROGRAM

	ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	Rp 1.142.201.368,00	Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.142.201.368,00	
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 1.142.201.368,00	

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RIJDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang
Akuntansi

Ir. IDHAMSIAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD FAJRI, ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Manajemen BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM

Pembina

NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI
MANAJEMEN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOHAMAD FAJRI, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19810523 200801 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI MANAJEMEN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntansi Manajemen	Persentase Dokumen Akuntansi Manajemen Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	400 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.044.045.000,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Rp 1.044.045.000,00	

Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. IDHAMSyah, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP.19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Akuntansi Manajemen



MOHAMAD FAJRI, ST
Penata Tingkat I
NIP.19810523 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBYANTHY RATMAN, SAK., MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEBBYANTHY RATMAN, SE.Ak., MM
Pembina
NIP. 19850225 200804 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	82 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Sistem Dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 2.397.169.873,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.309.048.650,00	
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Rp 1.088.121.223,00	

Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. IDHAMSYAH, ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19801019 200804 1 002

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Akuntansi dan Pelaporan



DEBBYANTHY RATMAN, SE.ak. MM
Pembina
NIP. 19850225 200804 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH.,MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. RUDI DEWANTO, SE.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19701209 199103 1 001


SUASTINA, SH., MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)	2,76 Indeks
		- Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	9,78 Nilai
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aset Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
	- Tersusunnya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Terawasinya dan Terkendalinya Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.541.500.300,00	Sumber dana
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.541.500.300,00	yang digunakan
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 1.186.273.100,00	pada semua
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 355.227.200,00	program ini
			adalah APBD

Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. RUDI DEWANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701209 199103 1 001

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Bidang
Pengelolaan Aset Daerah

SUASTINA SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR GAMAR, SE., MSA
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NUR GAMAR, SE. MSA
Pembina
NIP. 19820419 200502 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Buku Standar Harga	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku
	- Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Neraca BMD	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	1 Laporan
	- Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Pendukung LK		80 Laporan
	- Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah PD(Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan)	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	2 Surat Keputusan
	- Tersusunnya Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	242 Berita Acara

KEGIATAN

	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 13.850.339.570,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp 174.969.550,00	
- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 11.865.996.870,00	
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 271.459.000,00	
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 151.152.200,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 1.266.443.150,00	
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 120.318.800,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

SUASTINA. S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Penatausahaan Aset

NUR GAMAR. S.E., MSA
Pembina
NIP. 19820419 200502 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ,S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUASTINA, SH., MH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUASTINA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 20003 2 004

Palu, 11 Desember 2025
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANNAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

HENDRA, S.Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19701008 200701 1 019

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET
TAHUN ANGGARAN : 2025

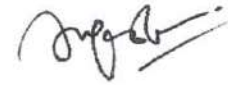
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Persentase Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Yang Disusun	100%
	- Tersusunnya Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Pemenuhan Dokumen Pemindahtanganan BMD	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Kordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan	1 Dokumen
	Tersusunnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Laporan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 980.040.000,00	Sumber dana yang digunakan pada semua kegiatan ini adalah APBD
- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 690.696.400,00	
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 289.343.600,00	

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


SUASTINA. SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730726 200003 2 004

Palu, 11 Desember 2025
Kepala Sub Bidang
Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset


HENDRA. S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 196501011990031 044



LKjIP 2025

DISDUKCAPIL PROV. SULAWESI TENGAH



    @disdukcapilsulteng

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Pramuka No. 21, Besusu Barat, Kec. Palu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja, indikator kinerja utama, serta dokumen perencanaan daerah lainnya yang relevan. Laporan ini memuat capaian kinerja program dan kegiatan, analisis pencapaian sasaran strategis, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat provinsi maupun pembinaan terhadap kabupaten/kota.

Secara kontekstual, LKjIP Tahun 2025 disusun pada masa transisi perencanaan strategis perangkat daerah dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini menuntut konsistensi kesinambungan arah kebijakan sekaligus penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah yang baru, sehingga proses pengukuran dan pelaporan kinerja tetap mencerminkan kesinambungan sasaran strategis dan relevansi terhadap target pembangunan jangka menengah daerah.

Kiranya penyajian LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,



ANDI NAJIDIN, SE., M.Si
NIP. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR dan TABEL	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Gambaran Umum	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3	Isu Strategis / Permasalahan	13
1.4	Tindak Lanjut LHE AKIP	15

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis Perangkat Daerah	17
2.1.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.1.2	Indikator dan Target Perangkat Daerah	19
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3	Struktur Program dan Kegiatan	24
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.5	Perjanjian Kinerja	31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja	33
3.1.1	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
3.1.2	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir	36
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra	39
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	42
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	46

DAFTAR ISI

3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.1.7	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
3.2	Realisasi Anggaran	65
3.3	Inovasi	70

BAB IV : PENUTUP

4.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	71
4.2	Strategi Peningkatan Kinerja	72

LAMPIRAN

☑	Perjanjian Kinerja 2025	vii
---	-------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Bagan Struktur Organisasi	12
1.2	Tindak Lanjut Evaluasi AKIP	15

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2021 - 2026	21
2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2025	22
2.3	Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi	23
2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 - 2026	28
2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 - 2029	29
2.7	Perjanjian Kinerja	32

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Realisasi Kinerja 2025 (Renstra 2021 – 2026)	33
3.2	Capaian Realisasi Kinerja 2025 (Renstra 2025 – 2029)	34
3.3	Hasil Penilaian Kinerja Disdukcapil Semester II Tahun 2025	35
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja 2023 – 2025 (Renstra 2021 – 2026)	36
3.5	Perbandingan Capaian Kinerja 2023 - 2025 Renstra (2025 - 2029)	37
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra (2026)	39
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra (2030)	40
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2021 - 2026)	43

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2025 - 2029)	44
3.10	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2021 – 2026)	56
3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025 – 2029)	57
3.12	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
3.13	Realisasi Anggaran	65
3.14	Data Inovasi	70
BAB IV : PENUTUP		
4.1	Strategi Peningkatan Kinerja	73

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, seiring dengan peralihan dokumen perencanaan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut membawa penyesuaian terhadap rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama. Pada periode sebelumnya, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Sementara itu, pada periode Renstra yang baru, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta penguatan pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi, yang diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta persentase kabupaten/kota dengan indeks layanan berkategori "Sangat Baik".

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari capaian IKU Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar 82,50 dari target 82,00 atau mencapai 100,61 persen. Sementara itu, indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target, dengan realisasi 0,00 persen dari target 23,07 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat provinsi telah mengalami peningkatan, masih diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar kualitas pelayanan di daerah semakin merata dan mampu mencapai kategori "Sangat Baik" sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase perekaman KTP-el mencapai 97,68 persen, dengan realisasi pencetakan sebesar 99,68 persen dari jumlah perekaman. Selain itu, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai berkembang dengan jumlah aktivasi mencapai 28.223 akun atau 1,23 persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Pada sisi lain, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 50,36 persen dari total anak wajib KIA. Secara agregat, indikator cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk tercatat sebesar 62,23 persen, melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 25 persen.

Pada pelayanan pencatatan sipil, capaian kepemilikan akta kelahiran usia 0–17 tahun telah mencapai 97,14 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki identitas hukum sejak dini. Secara keseluruhan, Cakupan

Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil juga berhasil melampaui target, dengan realisasi sebesar 77,51 persen dari target 70,00 persen atau mencapai 110,72 persen. Capaian tersebut mencerminkan kinerja pelayanan pencatatan sipil yang semakin baik dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebagai dasar perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat.

Pada aspek Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data kependudukan, kinerja menunjukkan capaian yang optimal. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah telah mencapai 100 persen, yang ditunjukkan melalui kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah yang telah menggunakan akses data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa data kependudukan semakin dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan integrasi layanan pemerintah daerah.

Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang dipublikasikan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun 2025 telah diterbitkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I dan Semester II Tahun 2025, serta Profil Kependudukan Tahun 2024 yang memuat berbagai indikator kependudukan lintas sektor. Publikasi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan daerah.

Di tengah capaian kinerja yang relatif baik, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data kependudukan secara lebih luas oleh berbagai sektor pembangunan. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perluasan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, serta pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ke depan, peningkatan kualitas layanan, integrasi data kependudukan, serta percepatan transformasi digital administrasi kependudukan akan terus menjadi fokus dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

01

- Gambaran Umum
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Isu Strategis / Permasalahan
- Tindak Lanjut LHE AKIP

1.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status kependudukan), serta penyajian data dan informasi kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi instrumen akuntabilitas kinerja tahunan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan LKjIP berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyusunan LKjIP yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan implementasi SAKIP.

Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman penyusunan substansi laporan, tata cara pemantauan capaian kinerja, serta mekanisme

reviu agar LKjIP dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang akurat dan informatif. Pedoman teknis tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan indikator kinerja, pengukuran capaian, serta analisis realisasi kinerja yang dipaparkan dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada pemangku kepentingan dan publik secara objektif, menyajikan refleksi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melaksanakan:

- a) koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antar kabupaten / kota secara berkala;
- b) penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di provinsi;
- c) penyusunan tata cara pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
- d) fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e) penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- f) sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- g) kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

- h) komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i) pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j) bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- k) supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m) pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n) penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o) pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

Adapun fungsinya adalah :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Penatatan Sipil, Piak dan Pemanfaatan Data;
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pelaksanaan tugas Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai fungsi yang telah diamanatkan dilaksanakan oleh semua Struktur Organisasi.

DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- c) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretariat membawahi dua Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan;
- b) Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dengan pihak dan unit terkait;
- d) Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

- e) Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- g) Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- h) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- i) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- j) Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- k) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis di lingkungan instansi terkait;
- l) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- m) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan ; dan
- o) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b) Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c) Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e) Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri, dan SKP melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- g) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- h) Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- i) Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta
- j) Mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k) Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n) Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, koordinasi, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap penyelenggaraan fungsi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;;
- b) penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk
- e) meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
- f) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;

- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- h) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran;

C. BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;

- e) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

D. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) dan PEMANFAATAN DATA

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

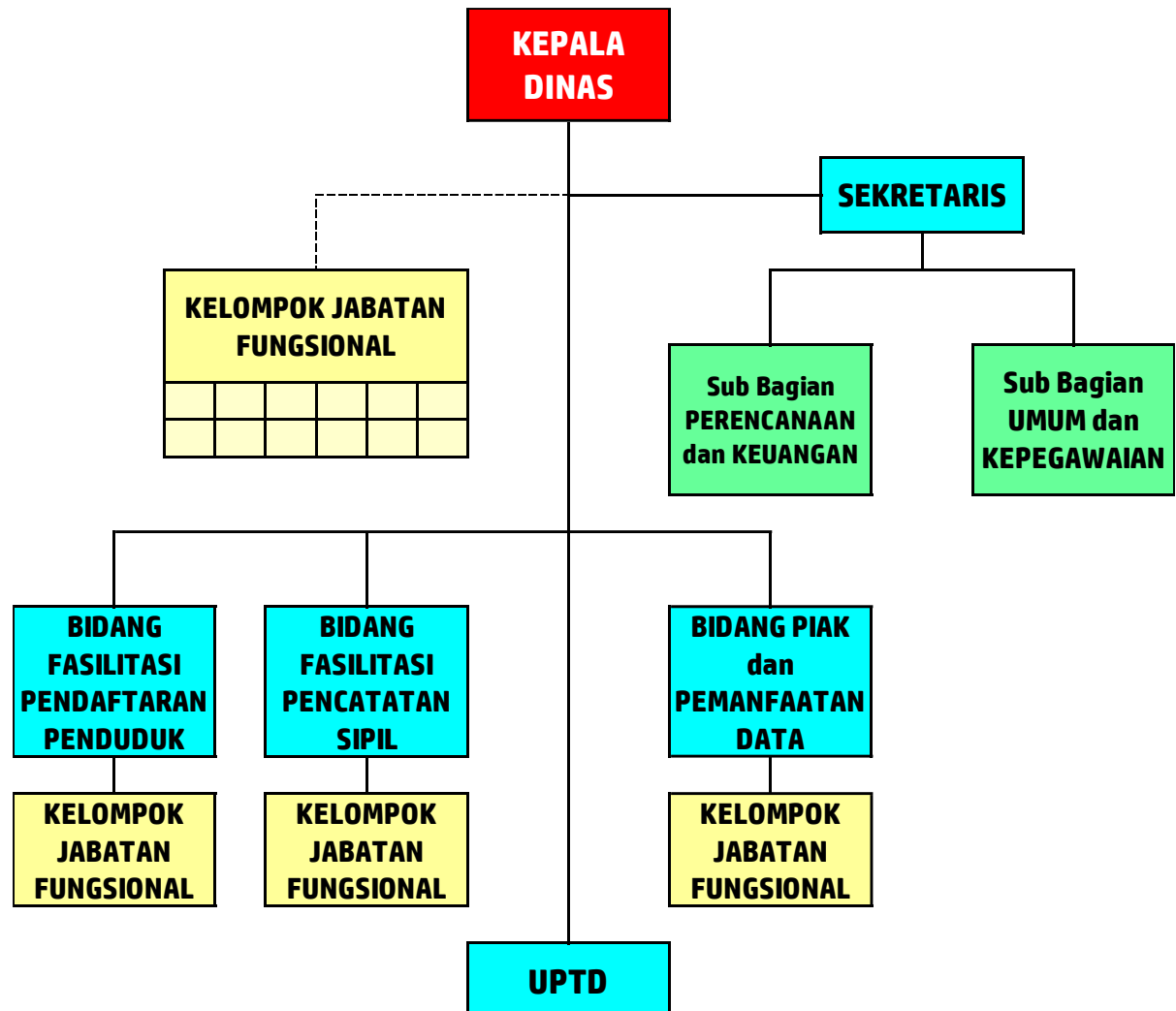
- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;

- b) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f) Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 1.1.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah**



1.3. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Isu strategis adalah permasalahan atau kondisi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan bagi masa depan suatu organisasi atau wilayah, yang jika tidak diatasi akan menimbulkan kerugian besar atau hilangnya peluang penting, sehingga memerlukan perencanaan dan tindakan terarah untuk mencapai visi jangka panjang. Isu ini seringkali terkait isu pelayanan publik, ekonomi, sumber daya manusia, hingga ketertinggalan yang memerlukan solusi bertahap dan terstruktur.

Isu strategis di bidang administrasi kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan Asta Cita, yaitu **"Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas"**. Administrasi kependudukan yang tertib dan inklusif menjadi prasyarat utama agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan dasar dan program pembangunan secara adil dan tepat sasaran. Tanpa dokumen kependudukan yang valid serta data yang terkelola dengan baik, kelompok-kelompok strategis tersebut berisiko tidak tercatat secara utuh dalam sistem pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah **Belum Optimalnya Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan**. Kualitas dan cakupan layanan yang belum optimal berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipil penduduk dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

A. Belum Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Memiliki Dokumen Kependudukan

Permasalahan pertama yang mendasari isu strategis tersebut adalah Belum Semua Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Memiliki Dokumen Kependudukan yang lengkap dan sah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu, tantangan geografis, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Akibatnya, terdapat penduduk yang belum tercatat secara menyeluruh atau belum melakukan pemutakhiran data sesuai kondisi aktual.

B. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Semua Urusan

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk seluruh urusan pemerintahan dan pembangunan. Data kependudukan yang seharusnya menjadi data dasar lintas sektor belum dimanfaatkan secara maksimal dan konsisten oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis data, serta berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antar sektor dan ketidaktepatan sasaran kebijakan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, peningkatan kualitas dan perluasan cakupan layanan administrasi kependudukan serta penguatan pemanfaatan data kependudukan menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta memastikan seluruh penduduk tercatat, terlindungi hak sipilnya, dan terlayani secara optimal.

1.4. TINDAK LANJUT LHE AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 700.1.2.1/035/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 Tanggal 21 Mei 2025 dimana hasil evaluasi yang dituangkan ke dalam nilai dengan kisaran 0 s/d 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 72,70 sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB termasuk dalam kategori Sangat Baik (BB). Hal ini menunjukkan bahwa komponen AKIP yang ada sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup diandalkan.

Meskipun demikian masih ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

Tabel 1.2.

TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

No.	REKOMENDASI	RENCANA / HASIL TINDAK LANJUT	LINK DATA
1	Menyamakan kembali IKU pada Renstra, PK dan LKjIP	Melakukan pemeriksaan silang terhadap kesesuaian IKU yang tercantum dalam setiap dokumen perencanaan dan membuat penyesuaian bila diperlukan.	https://drive.google.com/drive/folders/11AfgjyNu6KJ7ZXeYKOqc69agZoV692L?usp=drive_link
2	Menyamakan kembali pada target IKU antara Renstra, PK dan LKjIP	Sudah dilakukan pemeriksaan konsistensi IKU pada semua dokumen perencanaan 2024 (Renstra ,Renja, PK dan LKjIP), tidak ditemukan Inkonsistensi IKU	https://drive.google.com/drive/folders/14xqMDyDYybCT61k4wvIiL8fdam4wWfAn?usp=drive_link

No.	REKOMENDASI	RENCANA / HASIL TINDAK LANJUT	LINK DATA
3	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai	Sudah ada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
4	Mendokumentasikan kegiatan pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi dan Foto-foto Kegiatan	Melengkapi dokumentasi terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap triwulan di Disdukcapil Prov. Sulteng Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1d4s8yMWtjh_FH6FELh3fovHrJwTPxbQo?usp=drive_link
5	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Sudah menggunakan aplikasi BERANI SELARAS dalam Monitoring Capaian Kinerja dan pelaksanaan Rencana Aksi Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
6	Memanfaatkan teknologi informasi dalam Pengukuran Kinerja		
7	Memberikan Informasi tentang keterlibatan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan Strategis yang didukung Daftar Hadir, Notulensi, dan Foto-Foto Kegiatan	Mempersiapkan bukti dukung berupa Daftar Hadir, Notulensi dan Foto terkait keterlibatan pimpinan dalam rapat. Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1nscI-SWcVqNL00OSKXfF4DqIFpjPkyDy?usp=drive_link
8	Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan membuat Berita Acara LHE APIP sesuai Perundang-undangan	Menyusun Berita Acara LHE APIP sebagai Laporan Tindaklanjuti atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sudah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/10-hmyPrVwIK1GQpGCeExZZpN1fcMS2WI?usp=drive_link

**PERENCANAAN
KINERJA****02**

- Renstra Perangkat Daerah
- Struktur Program dan Kegiatan
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target capaian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada masa transisi perencanaan, dimana pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra 2021–2026, sekaligus mulai mengimplementasikan arah kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam periode 2021–2026, Tujuan Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis berupa **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan target kinerja yang menunjukkan tren peningkatan secara bertahap hingga akhir periode Renstra, sebagai cerminan perbaikan kualitas dan jangkauan layanan administrasi kependudukan.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki karakteristik semi vertikal kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah mengadopsi secara langsung Sasaran Strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai Tujuan Strategis OPD, sekaligus memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjembatani arah kebijakan pusat dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.

Tujuan Strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi”**.

Tujuan ini diadopsi dari pemerintah pusat tetap relevan dan selaras dengan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender”. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, sekaligus berkontribusi langsung terhadap pencapaian Program Prioritas Daerah BERANI SEJAHTERA dan BERANI CERDAS melalui penyediaan data dasar yang andal bagi sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia serta pemberantasan stunting dan kemiskinan.

Sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029 diarahkan pada **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital”**.

Sasaran ini dijadikan sebagai ukuran pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Target tahunan yang ditetapkan menunjukkan peningkatan bertahap, mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendorong standarisasi mutu layanan dan penguatan kapasitas daerah terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

2.1.2. Indikator dan Target Perangkat Daerah

Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis ini menegaskan peran penting administrasi kependudukan tidak hanya sebagai penyedia layanan dasar, tetapi juga sebagai fondasi penyediaan data induk bagi pembangunan daerah. Tujuan Strategis ini diukur dengan Indikator **Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, yang mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara menyeluruh, mulai aspek cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, ketepatan dan kecepatan layanan, akurasi dan pemutakhiran data, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta pemerataan kualitas layanan antar wilayah, sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan dalam Renstra 2025–2029 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari indikator **Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah** yang digunakan pada periode Renstra sebelumnya. Perubahan penamaan indikator ini tidak mengubah substansi pengukuran kinerja, melainkan memperkuat fokus pada aspek kualitas layanan secara komprehensif, yang mencakup cakupan kepemilikan dokumen, standar pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta konsistensi pelaksanaan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, indikator tersebut tetap menjaga kesinambungan pengukuran kinerja antar periode perencanaan.

Selanjutnya, indikator dari Sasaran Strategis yaitu **Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”** merupakan bentuk pengembangan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat peran pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Indikator ini dirancang untuk mendorong pemerataan kualitas layanan administrasi kependudukan antar daerah, sekaligus sebagai instrumen dukungan provinsi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan di tingkat kabupaten/kota. Seluruh indikator kinerja tersebut disusun selaras dengan kebijakan dan arah pembinaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Transisi Perencanaan dari Renstra 2021 – 2026 ke Renstra 2025 – 2029 menimbulkan perubahan pada Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada kedua tabel berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET KINERJA 2021 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	78,00	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026)

Tabel 2.2
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR dan TARGET 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUNAN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(12)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82	83	84	85	86	87	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	%	23,07	30,76	38,46	46,15	53,84	61,53	

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029)

2.2. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah maka disusunlah Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI

No.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi		Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	a	Meningkatkan Layanan Jemput Bola
				b	Meningkatkan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				c	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	d		Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi	
		e		Mengoptimalkan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	
		f		Meningkatkan Kualitas Data Kependudukan	
		g		Memperluas Kerjasama Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi	

2.3. STRUKTUR PROGRAM dan KEGIATAN

Struktur Program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
TERKAIT LANGSUNG PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.050.841.261,00	8.422.689.057,00	-628.152.204,00	8.001.528.371,41	-1.049.312.889,59
I-1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.537.100,00	171.665.250,00	-167.871.850,00	362.673.500,00	23.136.400,00
I-2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.839.196.393,00	5.836.506.550,00	-2.689.843,00	4.787.160.284,41	-1.052.036.108,59
I-3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.825.000,00	36.240.000,00	-9.585.000,00	52.598.000,00	6.773.000,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
I-4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.708.850,00	0,00	-91.708.850,00	0,00	-91.708.850,00
I-5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.466.118,00	551.319.957,00	-197.146.161,00	902.897.825,00	154.431.707,00
I-6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.851.800,00	1.473.372.800,00	-29.479.000,00	1.258.523.762,00	-244.328.038,00
I-8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.256.000,00	353.584.500,00	-129.671.500,00	637.675.000,00	154.419.000,00
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	689.451.300,00	253.820.350,00	-435.630.950,00	955.819.200,00	266.367.900,00
II-1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00	9.250.000,00	-140.750.000,00	9.249.900,00	-140.750.100,00
II-2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	359.451.250,00	137.672.300,00	-221.778.950,00	839.671.550,00	480.220.300,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
II-3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	180.000.050,00	106.898.050,00	-73.102.000,00	106.897.750,00	-73.102.300,00
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	305.376.800,00	176.376.750,00	-129.000.050,00	176.376.100,00	-129.000.700,00
III-1	Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	305.376.800,00	176.376.750,00	-129.000.050,00	176.376.100,00	-129.000.700,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	188.904.650,00	105.945.000,00	-82.959.650,00	105.944.650,00	-82.960.000,00
IV-1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan I		Anggaran Sesudah Perubahan II	
		DPA Murni 2025	Refocusing Anggaran	Bertambah / Berkurang	DPPA	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3
IV-2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	82.373.800,00	60.100.150,00	-22.273.650,00	60.100.100,00	-22.273.700,00
IV-3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	106.530.850,00	45.844.850,00	-60.686.000,00	45.844.550,00	-60.686.300,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	366.731.900,00	216.006.400,00	-150.725.500,00	305.616.050,00	-61.115.850,00
V-1	Penyediaan Profil Kependudukan	366.731.900,00	216.006.400,00	-150.725.500,00	305.616.050,00	-61.115.850,00
JUMLAH		10.601.305.911,00	9.174.837.557,00	-1.426.468.354,00	9.545.284.371,41	-1.056.021.539,59

Pada Tahun 2025 terjadi dua kali perubahan anggaran, antara lain Pergeseran Anggaran pada bulan Mei 2025 karena kebijakan Efisiensi/Refocusing Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Perubahan Anggaran pada bulan November 2025 sebagai penyesuaian terhadap kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2025.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	<p>Penjelasan Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>Rumus Perhitungan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Capaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	Kepmendagri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026)

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 – 2029

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	$\frac{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota Sulawesi Tengah dapat Kategori Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja oleh Kemendagri RI}}{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah}} \times 100 \%$		

(RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029)

Perubahan IKU pada Renstra periode 2025–2029 merupakan konsekuensi dari proses transisi perencanaan yang menuntut penyempurnaan kerangka pengukuran kinerja agar lebih adaptif, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator **Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** digunakan sebagai pengganti indikator sebelumnya yaitu **Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah** tanpa mengubah substansi pengukuran, melainkan memperluas perspektif penilaian yang tidak hanya menitikberatkan pada capaian kuantitatif, tetapi juga pada dimensi mutu layanan secara menyeluruh. Pengukuran tersebut mencakup aspek cakupan kepemilikan dokumen, ketepatan dan kecepatan pelayanan, akurasi serta pemutakhiran data, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan pemerataan kualitas layanan antar wilayah.

Penyesuaian indikator ini sekaligus memastikan kesinambungan sistem evaluasi kinerja antar periode perencanaan, sehingga hasil capaian sebelumnya tetap relevan sebagai dasar analisis tren dan perumusan kebijakan lanjutan. Indikator yang digunakan adalah **Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”**, yang dirancang sebagai ukuran keberhasilan pembinaan dan fasilitasi pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di daerah. Indikator ini menitikberatkan pada capaian kualitas layanan pada tingkat kabupaten/kota secara terukur dan terstandar, sehingga dapat menggambarkan tingkat pemerataan mutu pelayanan antar wilayah sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi daerah yang memerlukan penguatan kapasitas, pendampingan teknis, maupun dukungan kebijakan guna mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui Perjanjian Kinerja, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan diarahkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku pada awal tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, terjadi dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain faktor perubahan anggaran, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh adanya transisi kepemimpinan kepala daerah serta masa peralihan dokumen perencanaan strategis dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian arah kebijakan dan penajaman sasaran strategis perangkat daerah agar tetap selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan serta terjaganya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.7

**PERJANJIAN KINERJA 2025 dan
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	85%
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07

CAPAIAN
KINERJA

03

- Realisasi Kinerja
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Realisasi Anggaran

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1

CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	87%	82,50%	94,83%

Tabel 3.2
CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	82,50	100,61%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07	0,00	0%

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 ini menampilkan data capaian realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target kinerja yang tercantum pada Dokumen Perencanaan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, Renstra 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2025 (Tabel 3.3), maka Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 82,50 dengan predikat BAIK. Penilaian ini menjadi capaian pada Indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah (Tabel 3.1) dan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tabel 3.2).

Tabel 3.3
**Hasil Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2025
 (Kepmendagri Nomor 800.1.5.1-1910 DUKCAPIL Tahun 2026)**

KODE	NAMA WILAYAH	NILAI	KATEGORI
72	SULAWESI TENGAH	82,50	BAIK
7201	KAB. BANGGAI	84,21	BAIK
7202	KAB. POSO	83,16	BAIK
7203	KAB. DONGGALA	81,58	BAIK
7204	KAB. TOLI TOLI	80,00	BAIK
7205	KAB. BUOL	87,89	BAIK
7206	KAB. MOROWALI	88,42	BAIK
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	81,58	BAIK
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	83,68	BAIK
7209	KAB. TOJO UNA UNA	87,37	BAIK
7210	KAB. SIGI	82,63	BAIK
7211	KAB. BANGGAI LAUT	85,79	BAIK
7212	KAB. MOROWALI UTARA	82,11	BAIK
7271	KOTA PALU	89,47	BAIK

Berdasarkan IKU Tahun 2021–2026, capaian kinerja pada indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah mencapai 94,83%, yaitu nilai realisasi sebesar 82,50% dibandingkan target kinerja sebesar 87%. Sementara itu, berdasarkan IKU Tahun 2025–2029, capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 100,61%, dengan realisasi sebesar 82,50 melampaui target 82. Adapun pada indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori “Sangat Baik”, capaian kinerja belum terpenuhi karena belum terdapat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.1.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk menganalisa kemajuan dalam pencapaian target akhir Renstra, maka perlu dilakukan perbandingan terhadap Capaian Kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Capaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 – 2025 (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12=11/10
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	82%	80,63%	98,33%	85%	81,88%	96,33%	87%	82,50%	94,83%

Tabel 3.4 memuat progres capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2023 – 2025 dengan target mengacu pada Renstra 2021 – 2026. Dari tahun ke tahun target yang ditetapkan meningkat secara proporsional dari 82%, 85% sampai 87%. Realisasi Kinerja pada 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 80,63% (2023) menjadi 81,88% (2024), dan 82,50% (2025), namun hasil ini tidak sebanding dengan peningkatan target yang ada sehingga capaian kinerja menurun dari 98,33% (2023) menjadi 96,33% (2024) dan 94,83 (2025).

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2023 – 2025 (Renstra 2025 – 2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	10	11	12=11/10
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	80,6	98,33%	85	81,9	96,33%	82	82,50	100,61%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	-	-	-	-	-	-	23,07	0	0,00%

Tabel 3.5 memuat progres Capaian Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Renstra 2025 – 2029. Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat perkembangannya selama 2 tahun terakhir, hal ini dikarenakan Indikator ini secara substansial sama dengan Indikator yang digunakan pada periode sebelumnya. Perubahan nama Indikator ini merupakan bentuk Penyesuaian Redaksional terhadap penyempurnaan rumusan indikator, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun perubahan pada target kinerjanya, disesuaikan dengan mengacu pada hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan data pada tabel 3.5, menunjukkan realisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah yang relatif meningkat dari tahun 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023, realisasi indikator mencapai 80,63 dari target 82 atau sebesar 98,33%, pada tahun 2024 realisasi mencapai 81,88 dari target 85 atau sebesar 96,33%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja adalah 82.5 dari target 82 atau 100,61%. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik", tidak terdapat data terkait perkembangannya. Hal ini dikarenakan Indikator ini baru mulai diimplementasikan pada Renstra periode 2025 -2029. Indikator ini sebagai bentuk penajaman IKU sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara merata di seluruh wilayah provinsi serta pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 23,07 persen, yang berarti terdapat 3 (tiga) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan memperoleh nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas 90 atau masuk dalam kategori "Sangat Baik". Namun demikian, target tersebut belum dapat dicapai karena berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2025 belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan capaian mendekati kriteria tersebut, yaitu Kota Palu dengan nilai 89,47, Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37.

Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan pada kabupaten/kota dimaksud melalui penguatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar pada periode berikutnya dapat memenuhi kategori "Sangat Baik".

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA (Renstra 2021 – 2026)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	82,50%	90%	91,67%

Tabel 3.6 menyajikan progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mencapai target akhir periode Renstra Tahun 2021–2026. Analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis, serta menunjukkan sejauh mana realisasi kinerja yang telah dicapai mendekati target akhir yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 82,50 persen.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90 persen, maka tingkat kemajuan yang telah dicapai adalah sebesar 91,67 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah berada pada jalur yang positif menuju pemenuhan target akhir Renstra. Dengan tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, disertai penguatan langkah-langkah strategis yang telah berjalan, target kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2026 berpeluang untuk dapat dicapai.

Tabel 3.7

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
(Renstra 2025 – 2029)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,5	87	94,83%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	0	61,53	0,00%

Tabel 3.7 menunjukkan realisasi kinerja pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sulawesi Tengah adalah 80,25 sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Kemendagri (Tabel 3.3). Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2025 – 2029 yaitu sebesar 87, maka kemajuan capaian adalah 94,83 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan kinerja yang konsisten dan inovatif berpotensi untuk mencapai atau bahkan melampaui target pada akhir periode.

Selanjutnya, pada Indikator Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah ditetapkan target akhir tahun 2030 sebesar 61,53 persen, yang berarti terdapat 8 dari 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan memperoleh nilai minimal 90 atau predikat "Sangat Baik" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri. Hingga tahun 2025, indikator ini belum menunjukkan capaian karena belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Sesuai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 seharusnya terdapat 3 (tiga) Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mencapai predikat tersebut, dan jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 8 (delapan) kabupaten/kota pada akhir periode Renstra.

Meskipun target belum tercapai, hasil penilaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya potensi yang cukup baik untuk mencapai target pada tahun-tahun berikutnya. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki nilai sangat mendekati batas predikat "Sangat Baik", yaitu Kota Palu dengan nilai 89,47, Kabupaten Morowali sebesar 88,42, Kabupaten Buol sebesar 87,89, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 87,37. Selain itu, terdapat 5 (lima) kabupaten/kota lainnya yang juga berpotensi mencapai predikat tersebut pada akhir periode Renstra, yaitu Kabupaten Banggai Laut dengan nilai 85,79, Kabupaten Banggai sebesar 84,21, Kabupaten Parigi Moutong sebesar 83,68, Kabupaten Poso sebesar 83,16, dan Kabupaten Sigi sebesar 82,63.

Kondisi ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra masih memiliki peluang untuk dicapai melalui penguatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Daerah Lain (Sulawesi Selatan)

Perbandingan realisasi kinerja dengan instansi sejenis di daerah lain dilakukan untuk mengetahui posisi capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dalam peta kinerja nasional. Analisis ini tidak hanya menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target internal, tetapi juga memberikan gambaran mengenai daya saing dan kualitas kinerja apabila dibandingkan dengan perangkat daerah lain yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang sama. Selain itu, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menggali praktik-praktik terbaik (*best practices*), serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan pada periode berikutnya.

Perbandingan kinerja dalam laporan ini dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan provinsi tersebut didasarkan pada capaian kinerjanya yang secara konsisten menunjukkan hasil yang baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dengan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan yang unggul di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur (*benchmark*) dalam mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbandingan Realisasi Kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.8

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2021 – 2026)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Realisasi Daerah Lain (Prov. Sulsel)	Lebih Tinggi / Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	82,50	84,38	-1,88

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini diperoleh dari penilaian kinerja oleh Kemendagri RI dimana Disdukcapil Sulawesi Tengah mendapat nilai 82,50 sedangkan Disdukcapil Sulawesi Selatan mendapat nilai 84,38, sehingga terdapat selisih 1,88.

Tabel 3.9

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
(Renstra 2026 – 2029)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Realisasi Daerah Lain (Prov. Sulsel)	Lebih Tinggi / Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,50	84,38	-1,88
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	0,00	4,16	-4,16

Tabel 3.9 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah pembanding. Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai sebesar 82,50, sedangkan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan mencapai nilai 84,38. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar 1,88 poin yang menunjukkan bahwa kualitas layanan dan tata kelola administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pembinaan dan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota agar capaian kinerja Provinsi Sulawesi Tengah dapat semakin mendekati bahkan melampaui daerah pembanding pada periode mendatang.

Sementara itu, pada indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik", Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah belum mencatatkan capaian atau sebesar 0,00 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 4,16 persen. Hal ini dikarenakan dikarenakan belum terdapat Disdukcapil Kab/Kota di Sulawesi Tengah yang mendapat penilaian 90, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada satu Disdukcapil Kab/Kota yang sudah mendapat predikat "Sangat Baik" yaitu Disdukcapil Kota Pare-Pare.

Perbedaan sebesar -4,16 persen tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, hasil penilaian tahun 2025 menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki nilai yang mendekati kategori "Sangat Baik". Kondisi ini menjadi modal yang positif untuk terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga kesenjangan kinerja dengan daerah pembanding dapat diperkecil pada periode mendatang.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini tercermin dari berbagai indikator layanan administrasi kependudukan yang terus diupayakan untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan langsung maupun penguatan koordinasi dengan Disdukcapil di tingkat Kabupaten/Kota. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan yang sah serta mendukung tersedianya data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Pada aspek perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), capaian kinerja menunjukkan hasil persentase perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 97,68 persen, dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.297.873 jiwa dari total 2.352.552 jiwa wajib KTP-el. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP-el telah terdata dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga memperkuat basis data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pada aspek pencetakan KTP-el menunjukkan tingkat realisasi dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman, sebanyak 2.290.466 keping KTP-el telah berhasil dicetak, atau setara dengan 99,68 persen dari total perekaman. Persentase pencetakan ini mencerminkan efektivitas proses pelayanan administrasi kependudukan dalam memastikan bahwa penduduk yang telah melakukan perekaman dapat segera memperoleh dokumen identitas fisik yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas administratif.

Sejalan dengan perkembangan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai menunjukkan perkembangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hingga Tahun 2025, jumlah aktivasi IKD tercatat sebanyak 28.223 akun atau mencapai 1,23

persen dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Meskipun capaian tersebut masih relatif rendah, hal ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah. Sebagian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki akses internet yang belum memadai, bahkan pada beberapa desa di kabupaten tertentu masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk proses aktivasi dan pemanfaatan IKD.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan identitas digital oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan administrasi kependudukan. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses infrastruktur pendukung, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mengoptimalkan strategi pelayanan agar implementasi IKD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.

Pada kelompok penduduk usia anak, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Tahun 2025, jumlah KIA yang telah diterbitkan mencapai 463.298 keping atau sekitar 50,36 persen dari total 920.046 jiwa wajib KIA. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi anak di Sulawesi Tengah telah memiliki identitas resmi yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam berbagai layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Secara keseluruhan, capaian indikator layanan tersebut berkontribusi terhadap tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang terpenuhi 62,23 persen, jauh melampaui target kinerja sebesar 25 persen sehingga capaian menjadi . Nilai cakupan ini diperoleh dari rata-rata capaian beberapa indikator utama, yaitu perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, aktivasi IKD, dan pencetakan KIA. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik serta mampu mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat.

Selain capaian pada pelayanan pendaftaran penduduk, kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 juga ditunjukkan melalui peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil serta penguatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap peristiwa penting penduduk tercatat secara resmi serta didukung oleh pengelolaan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perumusan kebijakan.

Kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0–17 tahun, capaian di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 97,14 persen, dengan jumlah kepemilikan sebanyak 947.300 akta kelahiran dari total 975.207 penduduk usia 0–17 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Sulawesi Tengah telah memiliki dokumen identitas hukum sejak dini, yang sangat penting sebagai dasar perlindungan hak anak serta sebagai dokumen pendukung dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial lainnya.

Sementara itu, pada pencatatan peristiwa penting lainnya seperti penerbitan Akta Kematian mencapai 100% dari jumlah kematian dilaporkan sebanyak 159.194 kematian, penerbitan Akta Perkawinan mencapai 64,65% yaitu 976.059 dari jumlah penduduk yang tercatat status kawin, dan penerbitan Akta Perceraian mencapai 25.255 dari jumlah penduduk status Cerai Hidup 52.348 jiwa. Hasil ini membuat tingkat Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Sulawesi Tengah terealisasi 77,51%, jumlah ini melampaui target pada Renstra di 2025 sebesar 70%, sehingga capaiannya adalah 110,72%.

Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Data kependudukan, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga terus mendorong pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah. Hingga Tahun 2025, terdapat 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah dan telah menggunakan akses data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan data ini menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi data dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data kependudukan.

Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga secara konsisten menyediakan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan melalui penerbitan data kependudukan secara berkala. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan (DAK) yang diterbitkan setiap semester serta Profil Kependudukan yang diterbitkan setiap tahun. Penyediaan data ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tengah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, upaya peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan juga dilakukan melalui pelayanan jemput bola fasilitasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini difokuskan terutama untuk menjangkau penduduk rentan administrasi kependudukan mulai dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) suku Lauje di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Suku Bajo dibagian terluar Kabupaten Morowali, serta masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau dan penyandang disabilitas, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengakses pelayanan tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan cepat.

Dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan supervisi melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Disdukcapil kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan secara administratif maupun kegiatan turun lapangan dengan mendatangi Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku.

Selain itu, untuk mendukung kemudahan pelayanan bagi masyarakat, juga telah disediakan layanan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Galeri Adminduk Disdukcapil Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui layanan ini, masyarakat yang berada di luar daerah domisili tetap dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus kembali ke daerah asal, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

DOKUMENTASI KEGIATAN	
Foto / Gambar	Penjelasan
	Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong
	Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi komunitas di ruang lobi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
	Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat di Galeri Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi Sulawesi Tengah
	Pelayanan Jemput Bola, Fasilitasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

DOKUMENTASI KEGIATAN	
Foto / Gambar	Penjelasan
 <p>10:57 Disdukcapil Sulteng Selesai Kamis, 07 Agustus 2025 Jl. Desa Tombiano, Tombiano, Kec. Tojo Bar., Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 94681</p>	<p>Pelayanan Jemput Bola, Fasilitas Layanan Administrasi Kependudukan di desa Tombiano Kab. Tojo Una-Una</p>
 <p>14:27 Disdukcapil Sulteng Selesai Kamis, 07 Agustus 2025 Malei, Kec. Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 94681</p>	<p>Pelayanan Jemput Bola, Fasilitas Layanan Administrasi Kependudukan di desa Malei, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso</p>
 <p>10:33 Disdukcapil Sulteng Selesai Rabu, 06 Agustus 2025 Tojo Una - Una, Sulawesi Tengah</p>	<p>Pelayanan Jemput Bola, Perekaman KTP-EL bagi Siswa SMA Negeri 1 Tojo,, Kabupaten Tojo Una-Una</p>

DOKUMENTASI KEGIATAN	
Foto / Gambar	Penjelasan
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota sebagai bentuk dari Pembinaan dan Pengawasan
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kepulauan Sombori, Kabupaten Morowali

Secara umum, berbagai capaian kinerja pada penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, serta meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan terus mengalami kemajuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan. Melalui analisis tersebut, dapat diidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sebagai dasar perumusan langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

a) Faktor Penghambat / Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi 2 masalah utama, yaitu :

- Belum Semua penduduk Sulawesi Tengah memiliki Dokumen Kependudukan.
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk semua urusan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kondisi ini antara lain sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk (Alat Rekam/Cetak KTP, Komputer, Printer dsb) yang terbatas,
- ❖ Kurangnya SDM Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK),
- ❖ Terbatasnya anggaran karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran,
- ❖ Pemanfaatan Data Kependudukan diwajibkan melaksanakan ISO 270001 yaitu standar manajemen keamanan data yang membutuhkan pengalokasian anggaran khusus bagi pengguna data,
- ❖ Pengajuan PKS membutuhkan proses perijinan di tingkat pusat (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) menyebabkan lambatnya akses diberikan,
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan,
- ❖ Kondisi Geografis wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang luas dengan moda transportasi yang terbatas,
- ❖ Banyak penduduk rentan Adminduk (disabilitas, komunitas adat terpencil, dsb) berada di wilayah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki akses untuk datang ke tempat pelayanan,
- ❖ Masih banyak wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang sulit mendapat jaringan Internet.

b) Alternatif Solusi / Upaya Pencapaian Target Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan telah dilakukan dengan beberapa Solusi/Upaya sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk. Upaya ini dilakukan dengan menambah alat cetak KTP, alat perekaman mobile untuk pelayanan jemput bola, serta pengaplikasian STARLINK untuk kebutuhan akses jaringan Internet di wilayah pelosok.
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan disekolah dan area publik lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di Kab/Kota untuk menjangkau wajib KTP pemula, serta membuka tempat layanan pada kegiatan Sulteng Expo 2025 di Jodjokodi Center.
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola/ Pelayanan Keliling Adminduk di Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi desa di Kabupaten yang cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya belum optimal.
- ✓ Pelayanan Jemput Bola bagi Penduduk berkebutuhan khusus. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi rumah penduduk berkebutuhan khusus untuk melakukan pelayanan perekaman KTP-el secara langsung di tempat.
- ✓ Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan dengan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya disusun sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara alokasi dan realisasi sumber daya, khususnya anggaran, dengan capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Analisis Penggunaan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.10
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2021-2026)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9 = 5 - 8
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	87	82,5	94,83%	9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%	-0,58%

Tabel 3.10 menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah* Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator kinerja mencapai 82,50 dari target sebesar 87, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,83 persen. Sementara itu, dari pagu anggaran sebesar Rp9.545.284.371,41, realisasi anggaran mencapai Rp9.107.231.158,00 atau sebesar 95,41 persen. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -0,58 persen.

Nilai efisiensi yang masih negatif menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya masih perlu dioptimalkan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap pencapaian target kinerja. Meskipun demikian, selisih sebesar 0,58 persen menunjukkan bahwa kesenjangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja relatif kecil. Oleh karena itu, melalui penguatan perencanaan,

peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pengendalian dan monitoring kinerja, diharapkan efisiensi penggunaan sumber daya pada periode mendatang dapat terus ditingkatkan..

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Renstra 2025 – 2029)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2		3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9 = 5 - 8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82	82,5	100,61%	9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%	5,20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Persentase Kabupaten /kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	23,07	0	0,00%				-95,41%

Berdasarkan Tabel 3.11 mengenai Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025 – 2029), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.107.231.158,00 atau setara dengan 95,41% dari total pagu yang dialokasikan. Melalui indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi mampu melampaui target kinerja fisik dari 82 menjadi 82,5 (capaian 100,61%). Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi positif sebesar 5,20%, yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sejalan dengan keluaran kinerja yang sangat optimal dan hemat sumber daya. Pada indikator Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" tercatat tidak menghasilkan capaian sama sekali (0,00%) dari target yang ditentukan sebesar 23,07.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak efisien. Belum tercapainya indikator lebih dipengaruhi oleh hasil penilaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, di mana hingga tahun 2025 belum terdapat Disdukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik". Oleh karena itu, peningkatan capaian indikator ini memerlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan pada periode Renstra dapat tercapai.

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.12

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	68	8.001.528.371,41	46,97	7.569.101.986,00	69,07	94,60%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	362.673.500,00	63,05	362.570.320,00	77,84	99,97%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	100	4.787.160.284,41	100	4.411.113.273,00	100,00%	92,14%
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100	52.598.000,00	100	52.598.000,00	100,00%	100,00%

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah		902.897.825,00	-	868.779.156,00	-	96,22%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2	1.258.523.762,00		1.237.975.381,00	0,00%	98,37%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	85	637.675.000,00		636.065.856,00	0,00%	99,75%
8	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25	955.819.200,00	62,23	953.515.660,00	248,94%	99,76%
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya data Rate Net Recent Migrasi	Rate Net Recent Migrasi	924	9.249.900,00	1061	9.040.000,00	114,83%	97,73%
10	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	60	839.671.550,00	50,36	837.766.430,00	83,93%	99,77%
		Meningkatnya Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD	3		1,23		41,00%	

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persenrase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	106.897.750,00		106.709.230,00	0,00%	99,82%
12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	70	176.376.100,00	77,51	176.220.810,00	110,73%	99,91%
13	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya anak berusia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persentase Anak berusia 0-4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	96	-	96,89	-	100,93%	-
		Meningkatnya kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	62		100		161,29%	
		Meningkatnya Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah	61		64,65		105,98%	
		Meningkatnya Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi Penduduk yang Bercerai	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang Bercerai	61		48,24		79,08%	

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang diberikan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	13	176.376.100,00		176.220.810,00	0,00%	99,91%
15	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	105.944.650,00	100	103.070.630,00	100,00%	97,29%
16	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan IT	100	60.100.100,00	100	57.286.080,00	100,00%	95,32%
17	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan	100	45.844.550,00	100	45.784.550,00	100,00%	99,87%
18	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100	305.616.050,00	100	305.322.072,00	100,00%	99,90%

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang Sesuai dengan Ketentuan	100	305.616.050,00	100	305.322.072,00	100,00%	99,90%
JUMLAH					9.545.284.371,41		9.107.231.158,00		95,41%

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Program-program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Implementasi program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah.

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk diukur berdasarkan rata-rata capaian empat jenis layanan, yaitu persentase perekaman KTP-el, persentase pencetakan KTP-el, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dan persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 25,00 persen, sedangkan realisasi mencapai 62,23 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 248,94 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target telah terlampaui secara signifikan, terutama didukung oleh tingginya cakupan perekaman KTP-el, pencetakan KTP-el, dan kepemilikan KIA. Namun demikian, aktivasi IKD masih relatif rendah sehingga masih diperlukan upaya yang lebih intensif melalui perluasan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan akses layanan digital agar implementasi transformasi digital di bidang administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan pada Program Pendaftaran Penduduk telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, meskipun aspek digitalisasi layanan masih perlu terus diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil diukur berdasarkan rata-rata cakupan kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,00 persen, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 77,51 persen, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 110,72 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dilampaui. Hasil ini mencerminkan semakin meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil oleh masyarakat sebagai dampak dari optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebagai dasar memperoleh berbagai pelayanan publik..

Pada indikator Pemanfaatan Data Kependudukan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal dengan tingkat realisasi sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan telah memanfaatkan akses data yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemanfaatan data kependudukan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi integrasi data antar perangkat daerah serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis pada data yang akurat dan terverifikasi.

Selanjutnya pada indikator Penyediaan Data Kependudukan, capaian kinerja juga menunjukkan realisasi sebesar 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I dan Semester II Tahun 2025 serta Profil Kependudukan Tahun 2024 yang memuat informasi kependudukan lintas sektor. Penyediaan data kependudukan secara berkala ini memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan yang membutuhkan data kependudukan sebagai dasar analisis.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pada beberapa indikator menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan, sementara capaian yang belum optimal menunjukkan adanya faktor eksternal maupun perubahan kebijakan yang mempengaruhi pengukuran kinerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa penting, serta mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan guna mendukung peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja telah dikelompokkan sesuai dengan upaya pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
REALISASI ANGGARAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.001.528.371,41	7.569.101.986,00	94,60%
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362.673.500,00	362.570.320,00	99,97%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.247.850,00	52.244.350,00	99,99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.425.650,00	310.325.970,00	99,97%
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.787.160.284,41	4.411.113.273,00	92,14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.760.560.284,41	4.384.513.273,00	92,10%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00%
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.598.000,00	52.598.000,00	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.598.000,00	52.598.000,00	100,00%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.897.825,00	868.779.156,00	96,22%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	16.153.846,00	16.153.846,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.153.804,00	353.895.468,00	91,41%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.500.175,00	44.730.175,00	98,31%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.090.000,00	453.999.667,00	99,98%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.523.762,00	1.237.975.381,00	98,37%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.867.762,00	230.775.881,00	95,81%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.017.656.000,00	1.007.199.500,00	98,97%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.675.000,00	636.065.856,00	99,75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.745.000,00	341.415.856,00	99,61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.930.000,00	294.650.000,00	99,91%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	955.819.200,00	953.515.660,00	99,76%
11	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.249.900,00	9.040.000,00	97,73%
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	9.249.900,00	9.040.000,00	97,73%
12	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	839.671.550,00	837.766.430,00	99,77%
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	839.671.550,00	837.766.430,00	99,77%
13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	106.897.750,00	106.709.230,00	99,82%
	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	106.897.750,00	106.709.230,00	99,82%
14	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%
15	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-
16	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-	-
17	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	176.376.100,00	176.220.810,00	99,91%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU Anggaran	REALISASI Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	105.944.650,00	103.070.630,00	97,29%
19	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-
20	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	60.100.100,00	57.286.080,00	95,32%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60.100.100,00	57.286.080,00	95,32%
21	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Kependudukan Provinsi	45.844.550,00	45.784.550,00	99,87%
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.844.550,00	45.784.550,00	99,87%
22	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	305.616.050,00	305.322.072,00	99,90%
23	Penyediaan Profil Kependudukan	305.616.050,00	305.322.072,00	99,90%
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	29.504.050,00	29.311.550,00	99,35%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	276.112.000,00	276.010.522,00	99,96%
JUMLAH		9.545.284.371,41	9.107.231.158,00	95,41%

Berdasarkan data realisasi anggaran, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tercatat sebesar Rp9.545.284.371,41, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.107.231.158,00 atau mencapai 95,41 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan relatif optimal, mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

3.3. INOVASI

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, DISDUKCAPIL Provinsi Sulawesi Tengah membuat beberapa inovasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
DATA INOVASI

No.	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Uraian
1	3	5	6
1	Sistem Pelaporan Layanan Harian Administrasi Kependudukan (SIMPAN RINDU)	Mempermudah Pelaporan Pelayanan Harian di Kabupaten / Kota	Aplikasi berbasis web excel untuk melaporkan pelayanan harian administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Tengah
2	Fasilitasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan (ASPIRASIKAN)	Membantu Kabupaten / Kota dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan mendatangi langsung kelurahan/desa di kabupaten/kota yang capaian kepemilikan dokumen kependudukan rendah
3	Fasilitasi Galeri Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIGAP ADMINDUK)	Mempermudah dan Mendekatkan Tempat Pelayanan Masyarakat dalam melakukan Pembuatan Dokumen Kependudukan	Bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota membuka ruang pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kantor Disdukcapil Prov. Sulteng
4	Dukcapil Saling Menyapa (KING MEN)	Mempermudah Koordinasi langsung ke Disdukcapil Kabupaten / Kota terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan	Melakukan koordinasi dalam Forum Disdukcapil se Provinsi Sulawesi Tengah melalui media komunikasi Whatsapp dan Rapat Zoom secara berkala

PENUTUP

04

- Gambaran Umum
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Isu Strategis / Permasalahan
- Tindak Lanjut LHE AKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Rencana kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Perjanjian Kinerja yang berisi tentang target – target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam LKjIP.

4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik meskipun berada pada masa transisi perencanaan dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Berdasarkan indikator kinerja utama pada Renstra Tahun 2021–2026, Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 82,50 dari target 87, atau sebesar 94,83 persen. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja utama Renstra Tahun 2025–2029, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melampaui target dengan realisasi 82,50 dari target 82, atau mencapai 100,61 persen. Adapun indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik" belum mencapai target karena hingga akhir tahun 2025 belum terdapat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh predikat "Sangat Baik" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, berbagai indikator kinerja pada urusan administrasi kependudukan menunjukkan tren yang positif. Capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, didukung oleh tingginya cakupan perekaman dan pencetakan KTP-el, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), serta kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Meskipun demikian, implementasi layanan berbasis digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih memerlukan perhatian lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet di beberapa wilayah. Dengan mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memperkuat pembinaan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, pengembangan layanan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peluang yang baik untuk mencapai target kinerja pada periode Renstra berikutnya.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2026, maka langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran berorientasi pelayanan dari kegiatan dan belanja pegawai.
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi terutama berkaitan dengan aplikasi layanan Administrasi Kependudukan.
- 3) Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
- 4) Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.

Selanjutnya penerapan strategi peningkatan kinerja dalam setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.1
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	STRATEGI
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Khusus bagi Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdapat di Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen terkait Peristiwa Kependudukan (KTP, KIA, KK dan IKD) di wilayah Kabupaten/Kota yang rendah capaian kepemilikan dokumen kependudukannya
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen terkait Peristiwa Penting (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian) di wilayah Kabupaten /Kota yang rendah capaian kepemilikan dokumen kependudukannya
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi terkait Perjanjian Kerjasama serta hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD Provinsi Sulawesi Tengah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pelaporan berkala data pelayanan administrasi kependudukan ke Provinsi dan Pusat
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi terhadap operator OPD pemegang hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mencetak buku Profil Kependudukan tahun 2026
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Melaksanakan rapat koordinasi dan membentuk Tim Penyusun Pengolahan DKB per Semester

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan masukan dalam evaluasi, terwujudnya pencapaian Visi Misi Provinsi Sulawesi Tengah serta pencapaian Tujuan Nasional.

Palu, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah,



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

NIP. 19740208 199903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pramuka No. 21 Palu Timur, Telepon (0451), 483443 Faksimile. 483400,

Email : disdukcapilsultengprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000/1557/Disdukcapil /2025

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026, maka perlu menetapkan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Sasaran Program pada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci Dan Indikator Sasaran Program Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonersi Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU** : Menyusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Sasaran Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA** : Definisi Operasional Indikator Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Sasaran Program Dan Kegiatan ini menjadi acuan Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710208 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR UTAMA, INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

A. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 : Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota	Indeks	Semakin Tinggi Nilai Capaian Kinerja, maka semakin berhasil pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Sulawesi Tengah	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Tahunan	Kepala Dinas	IKU
2	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 : Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat predikat "Sangat Baik" dalam pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	$\frac{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota Sulawesi Tengah dapat Kategori "Sangat Baik" dalam Penilaian Kinerja oleh Kemendagri RI}}{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Sulawesi Tengah	Kepmendagri tentang Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab.Kota	Tahunan	Kepala Dinas	IKU

b. Tabel Indikator Kinerja Kunci

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak	Persentase Rata-rata Penerbitan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi setiap anak di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil peningkatan kepemilikan KIA di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
2	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 : Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital	Persentase Rata-rata Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi setiap penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah rekam KTP-el	$\frac{\text{Jumlah Aktivasi IKD}}{\text{Jumlah Perekaman KTP-el}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil peningkatan penggunaan IKD di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
3	Rate Net Recent Migrasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Jumlah selisih antara penduduk yang tercatat masuk (imigrasi) dan penduduk yang tercatat keluar (emigrasi) melalui mekanisme penerbitan SKPWNI dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode	Jumlah Penduduk Masuk - Jumlah Penduduk Keluar	Jumlah	Semakin tinggi Jumlah, maka semakin berhasil pelayanan Administrasi Kependudukan dalam mencatat mobilitas pindah-datang penduduk melalui penerbitan SKPWNI	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	IKK
4	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki Akte Kelahiran	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak berusia 0 - 4 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Kelahiran Anak 0- 4 tahun yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak 0 - 4 tahun}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi kelahiran anak 0-4 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK

5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang meninggal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Kematian bagi setiap Penduduk yang meninggal di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian yang dilaporkan}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang Meninggal di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan bagi Penduduk yang menikah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap Penduduk yang Menikah di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Perkawinan diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang menikah}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang menikah di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai bagi penduduk yang bercerai	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Persentase Rata - rata Kepemilikan bagi setiap Penduduk yang bercerai di Provinsi Sulawesi Tengah	$\frac{\text{Jumlah Akte Cerai diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang bercerai}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pencatatan Sipil bagi Penduduk yang bercerai di Provinsi Sulawesi Tengah	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Tahunan	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	IKK

a. Tabel Indikator Sasaran Program

No.	NAMA INDIKATOR	DASAR HUKUM	DEFINISI	RUMUS / FORMULASI	SATUAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	Frekuensi	Penanggung Jawab	Ket.
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dalam wilayah berdasarkan laporan peristiwa kependudukan, antara lain : 1. Perekaman KTP-EL 2. Penerbitan KTP-EL 3. Kartu Identitas Anak (KIA) 4. Identitas Kependudukan Digital (IKD)	$\frac{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El}{Jumlah\ Wajib\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{Jumlah\ KTP\ El\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{Jumlah\ KIA\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Anak} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Aktivasi\ IKD}{Jumlah\ Perekaman\ KTP\ El} \times 100$ $\frac{\%Perekaman + \%Penerbitan + \%KIA + \%IKD}{Jumlah\ Dokumen\ Pendaftaran\ Penduduk} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin banyak Pendiuduk di Sulawesi Tengah yang telah memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Semesteran	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil dalam wilayah berdasarkan laporan peristiwa penting, antara lain : 1. Akta Kelahiran 0-17 tahun 2. Akta Kematian 3. Akta Perkawinan 4. Akta Perceraian	$\frac{Jumlah\ Akta\ Kelahiran\ 0-17\ tahun\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 0-17\ tahun} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Kematian\ diterbitkan}{Jumlah\ Kematian\ yang\ Dilaporkan} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Perkawinan\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Yang\ Menikah} \times 100$ $\frac{Jumlah\ Akta\ Perceraian\ diterbitkan}{Jumlah\ Penduduk\ Yang\ Bercerai} \times 100$ $\frac{\%A.Lahir\ 0 - 17 + \%A.mati + \%A.Kawin + \%A.Cerai}{Jumlah\ Dokumen\ Pencatatan\ Sipil} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin banyak Pendiuduk di Sulawesi Tengah yang telah memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Semesteran	Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

3	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Perbandingan antara jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi Pengguna Data dengan jumlah data kependudukan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah jenis Data Kependudukan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Data kependudukan yang diterbitkan}} \times 100$	Persentase	Semakin Tinggi Persentase, maka semakin berhasil Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah	Data PKS Ditjen Dukcapil	Tahunan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Program PIAK
4	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Persentase Keselarasan Buku Profil Kependudukan dengan Peraturan/Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Kewajiban yang Terpenuhi dalam Penyusunan Buku Profil Kependudukan}}{\text{Jumlah Kewajiban yang sesuai Peraturan perundangundangan ttg Penyusunan Profil Kependudukan}} \times 100$	Persentase	Semakin tinggi persentase, semakin berkualitas dan selaras buku profil kependudukan yang disusun sesuai peraturan perundang undangan	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Data Lintas Sektor (Bappeda, Dinkes, Disdik, Dinsos, Disnaker, Biro Kesra)	Tahunan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Program Profil Kependudukan
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Ukuran tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang mencakup delapan area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks	Semakin tinggi nilai Indeks RBi, maka semakin berhasil penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tahunan	Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. RUSDY MASTURA

Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA

**ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Tengah	85 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.843.834.298	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	689.451.300	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD
4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	188.904.650	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	366.731.900	APBD

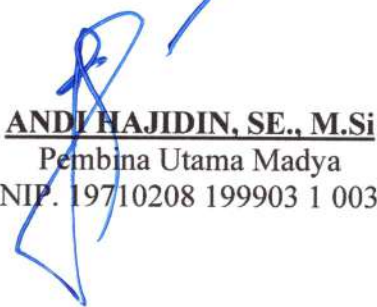
Palu, 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

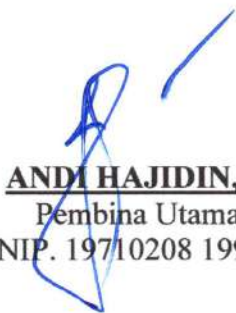
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	100 %

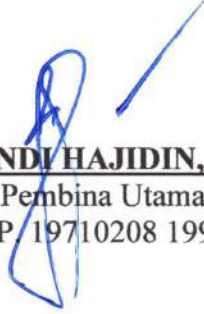
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	305.376.800	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR WAHYUNI, Sos., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

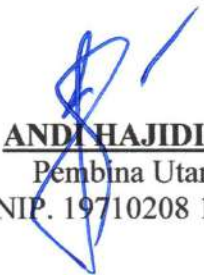
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19740601 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	87 %

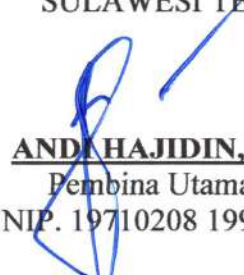
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penduduk Rentan Admindak Kabupaten/kota yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lokasi Penduduk Terpencil dan Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk	1
2	Meningkatnya Penduduk Kabupaten/kota yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitas Layanan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	3
3	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang Terbina Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendaftaran Penduduk	689.451.300	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	150.000.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	359.451.250	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	180.000.050	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19740601 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

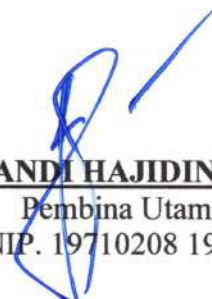
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data yang Dimanfaatkan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100%

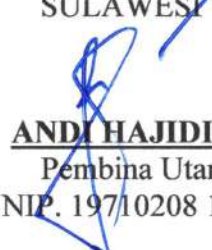
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Data Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Tata Kelola Data Adminduk yang memanfaatkan IT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kab/kota tentang PIAK	Persentase Kab/Kota yang Terbina dan Terawasi Sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan	Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	188.904.650	APBD
2	Program Pengelolaan Profil Kependuduka	366.731.900	APBD

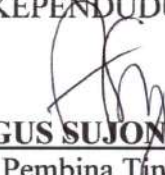
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	82.373.800	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	106.530.850	APBD
3	Penyediaan Profil Kependudukan	366.731.900	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


Dr. AGUS SUJONO, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESSELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	92
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	85
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	65
7	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	65
		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.843.834.298	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.537.100	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.839.196.393	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.825.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.708.850	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	748.466.118	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.502.851.800	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.256.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19821118 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKDAR, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina

NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

MIKDAR, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19821118 200112 1 001

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tesusunnya Dokumen Bukti Dukung dalam e-SAKIP reuiu (ESR) Kemenpan RB	Jumlah Dokumen Pendukung e-SAKIP Reuiu KEMENPAN RB yang tersusun	13
	Tersusunnya Dokumen MR dan Probis	Jumlah Dokumen MR dan Probis yang disusun	2
2	Tesusunnya Dokumen Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian IKU	1
3	Terdistribusinya Gaji, Tunjangan dan TPP	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM	100
4	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1
	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100
	Tersusunnya Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapandan Tindaklanjut hasil Pemeriksaan yang tersusun	100
5	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	4

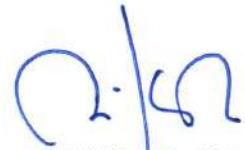
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.594.500	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.942.600	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.306.393	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.890.000	APBD
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.825.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina

NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

USMAN, S.Kom.,M.Si

Penata

NIP. 19740512 200604 1 013

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terupdatanya data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang ikut sosialisasi	35
	Terbinanya ASN tentang internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK		
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil Pengadaan	1 Paket
	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Tendering, e-purchasing, e-katalog, dll)	Jumlah Laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	1
	Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun	1
4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	1 Paket
5	Tersusunnya Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	2
	Tersedianya Data Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data Sektoral	1
	Terkelolanya Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital Perangkat Daerah	Persentase Arsip Dinamis Berbentuk Fisik dan Digital yang dikelola	
	Terkelolanya Arsip Statis Perangkat Daerah	Persentase Arsip Statis yang dikelola	100
	Terkompilasinya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI	Jumlah Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan ZI yang terkompilasi	1 Bundel
	Tersusunnya Produk Hukum (Pergub, Perda, dll) Perangkat Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	1 Produk
	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti	100
6	Tersedianya layanan Komunikasi dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan komunikasi dan listrik	1 Unit
7	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan yang Disusun	1
	Terukurnya SKM pada Layanan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan yang diukur dengan SKM	1 Dokumen
8	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34
9	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket
	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.708.850	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	19.162.150	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.682.380	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.489.375	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.132.213	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.941.800	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.280.910.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.506.000	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.750.000	APBD

Palu, 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Bembina
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


USMAN, S.Kom., M.Si
Penata
NIP. 19740512 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	23,07

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.422.689.057	APBD
2 Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 253.820.350	APBD
3 Program Pencatatan Sipil	Rp. 176.376.750	APBD
4 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 105.945.000	APBD
5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 216.006.400	APBD

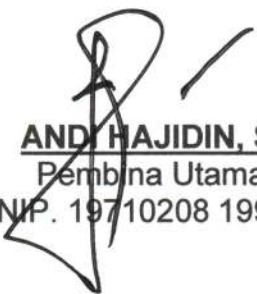
Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	59

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	100
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	92
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	65
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	85
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	65
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	65
7	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	65
		Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.422.689.057	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.665.250	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.506.550	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.240.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.319.957	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.372.800	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.584.500	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAIDIN, SE.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR WAHYUNI, Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENDAFTARAN PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740601 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	25 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya data Rate Net Recent Migrasi	Rate Net Recent Migrasi	924
2	Meningkatnya Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Adminduk	60%
3	Meningkatnya Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	Persentase Penduduk yang Menggunakan IKD bagi Penduduk Wajib KTP	3%
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendaftaran Penduduk	253.820.350	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	9.250.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	137.672.300	APBD
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	106.898.050	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN
PENDUDUK


NUR WAHYUNI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740601 200212 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAHWATI NATILI, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	70 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang terbina Pelayanan Pencatatan Sipil	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencatatan Sipil	176.376.750	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	176.376.750	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI
PENCATATAN SIPIL


FATMAHWATI NATILI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710312 200012 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
**Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
**Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19860923 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON III

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Keselarasan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Sesuai Ketentuan	100%

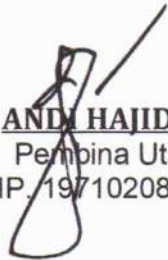
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang sesuai Pedoman Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
2	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memanfaatkan IT	100%
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%
4	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	105.945.000	APBD
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	216.006.400	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	60.100.150	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	45.844.850	APBD
3	Penyediaan Profil Kependudukan	216.006.400	APBD

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN


MUSDALIFAH DJ. UMAR, S.STP., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19860923 200412 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKDAR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800428 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.669.500	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.995.750	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.306.550	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.200.000	APBD
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.240.000	APBD

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN
DAN KEUANGAN


MIKDAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19800428 200012 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Kom.,M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji :

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami ;
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

USMAN, S.Kom.,M.Si

Penata
NIP. 19740512 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan
7	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
8	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	16.153.846	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.475.686	APBD
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.410.425	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.280.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.866.800	APBD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.506.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	353.584.500	APBD
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.754.500	APBD

Palu, 17 September 2025

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
SULAWESI TENGAH


MOH. RIZAL DAMSUD, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19821118 200112 1 001

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


USMAN, S.Kom., M.Si
Penata
NIP. 19740512 200604 1 013



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Triwulan I Tahun 2026



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini disusun dengan memedomani Sistematika Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai surat nomor 000.8.6.3/20/Ro.Org. Dokumen ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi dalam periode tiga bulan pertama.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2026. Fokus utama BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun ini adalah mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan orientasi pada hasil nyata. Secara strategis, kami berupaya keras untuk mencapai target Indeks Sistem Merit sebesar 0,68 dan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78,7 guna meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

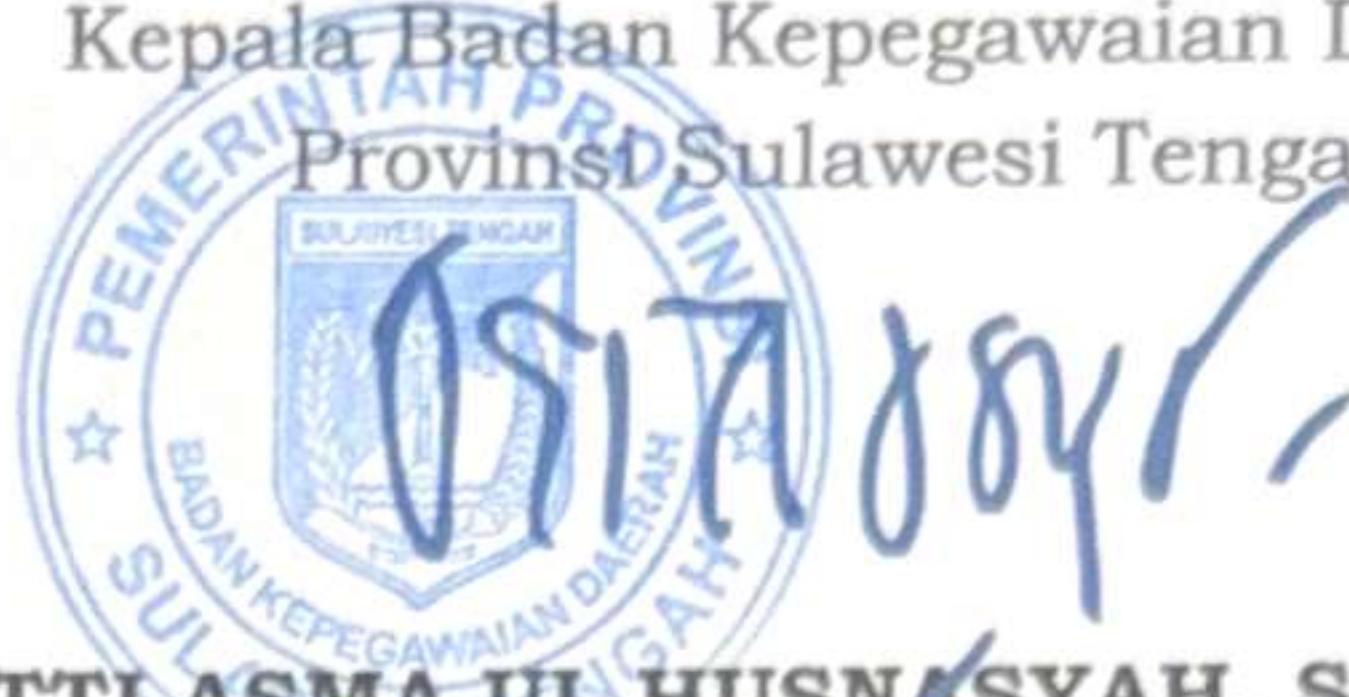
Dalam upaya mencapai target-target tersebut, BKD mengandalkan kekuatan 114 sumber daya manusia yang terdiri dari 94 PNS dan 20 PPPK. Sinergi internal terus diperkuat melalui mekanisme penjenjangan kinerja, mulai dari tingkat Sekretariat hingga bidang-bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruh elemen organisasi, termasuk Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi dan Promosi, serta Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, telah bergerak selaras untuk memastikan setiap indikator program dapat terealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, hingga 31 Maret 2026, BKD Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3.182.311.348,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp.

Rp15.919.033.327,40 yang dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Kepegawaian Daerah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja organisasi di triwulan berikutnya.

Palu, April 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. SITTI ASMA UL HUSNASYAH, SE., MM., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19670202 200012 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	3
1.2 Struktur Organisasi	8
1.3 Permasalahan Utama/Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja	11
2.2 Capaian Kinerja	12
BAB III PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Rekap Pegawai Per Jenis Kelamin Per 31 Maret 2026	2
Tabel I.2 Rekap Pegawai Per Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 31 Maret 2026.....	2
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.....	11
Tabel II.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala BKD Tahun 2026	11
Tabel II.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I Tahun 2026.....	12
Tabel II.4 Capaian Kinerja Program Triwulan I Tahun 2026	15
Tabel II.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.....	19
Tabel II.6 Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2026.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	9
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instrumen penting untuk memantau sejauh mana target tahunan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai di awal tahun. Fokus utamanya biasanya terletak pada penguatan administrasi, pemutakhiran data ASN, dan persiapan program strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, termasuk bagi seluruh pejabat administrator maupun fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju peningkatan pelayanan. Laporan ini menjadi bahan masukan serta umpan balik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah triwulan I yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan melihat kondisi dan beban tugas serta tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut di atas maka perlu disampaikan kondisi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah keadaan pegawai sampai dengan bulan Maret Tahun 2026 berjumlah PNS dengan rincian sebagai berikut

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah unsur pelaksana yang memiliki peran vital dalam mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di bawah kepemimpinan Dr. Sitti Asma Ul Husnasyah, SE., MM., M.Si, instansi ini berkomitmen untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Fokus utama organisasi diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian melalui implementasi sistem merit yang mencakup aspek perencanaan kebutuhan, mutasi, promosi, pengembangan karier, hingga pembinaan disiplin dan pemberian penghargaan bagi seluruh ASN provinsi.

Tabel I.1. Rekap Pegawai Per Jenis Kelamin Per 31 Maret 2026

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	%L / %P	Jumlah
1	PNS	45	49	48% / 52%	94
2	PPPK	9	11	45% / 55%	20
	TOTAL	54	60	47% / 53%	114

Untuk menjalankan tugas dan fungsi strategis tersebut, BKD Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang mumpuni dengan total jumlah pegawai sebanyak 114 orang per 31 Maret 2026. Komposisi SDM ini terdiri dari 94 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan distribusi gender yang mencakup 54 laki-laki dan 60 perempuan. Dari segi kualifikasi akademik, organisasi didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi, yakni 64 orang lulusan S1/D4 dan 26 orang lulusan S2 (Magister), yang tersebar di berbagai unit kerja seperti Sekretariat, Bidang Pengadaan, Mutasi, Penilaian Kinerja, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi Pegawai.

Tabel I.2 Rekap Pegawai Per Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 31 Maret 2026

No	Pendidikan	L (PNS)	L (PPPK)	P (PNS)	P (PPPK)	Jumlah
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	9	3	2	5	19
4	D1	-	-	1	-	1

No	Pendidikan	L (PNS)	L (PPPK)	P (PNS)	P (PPPK)	Jumlah
5	D3	2	-	1	-	3
6	S1/D4	21	6	31	6	64
7	S2	13	-	13	-	26
8	S3	-	-	1	-	1
TOTAL		45	9	49	11	114

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan landasan-landasan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- Pelaksanaan administrasi Badan di bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, mutasi dan promosi, serta bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah secara umum dituangkan menjadi tugas sub-sub bidang sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian.
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepegawaian yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, umum dan kepegawaian.
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, umum dan Kepegawaian.
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, umum dan kepegawaian serta rumah tangga.
- Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, rumah tangga, umum dan kepegawaian.
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, rumah tangga, umum dan kepegawaian.
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Bidang Pengadaan

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.
- Penyiapan bahan pembinaan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

- Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan, kegiatan keorganisasian dan tata hubungan kerja kepengurusan Lembaga Profesi ASN.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.

d. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Mutasi, kepangkatan kenaikan berkala, pindah wilayah kerja, pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pendidikan lanjutan ASN. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Mutasi, jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Mutasi, jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan pembinaan di bidang Mutasi, jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.
- penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Mutasi, jabatan fungsional, kepangkatan dan promosi.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan meliputi fungsi pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penilaian Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penilaian Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.
- Penyiapan bahan pembinaan di bidang Penilaian Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Penilaian Kinerja Aparatur, penghargaan dan disiplin PNS.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai

UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.
- Penyiapan bahan pembinaan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.

g. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

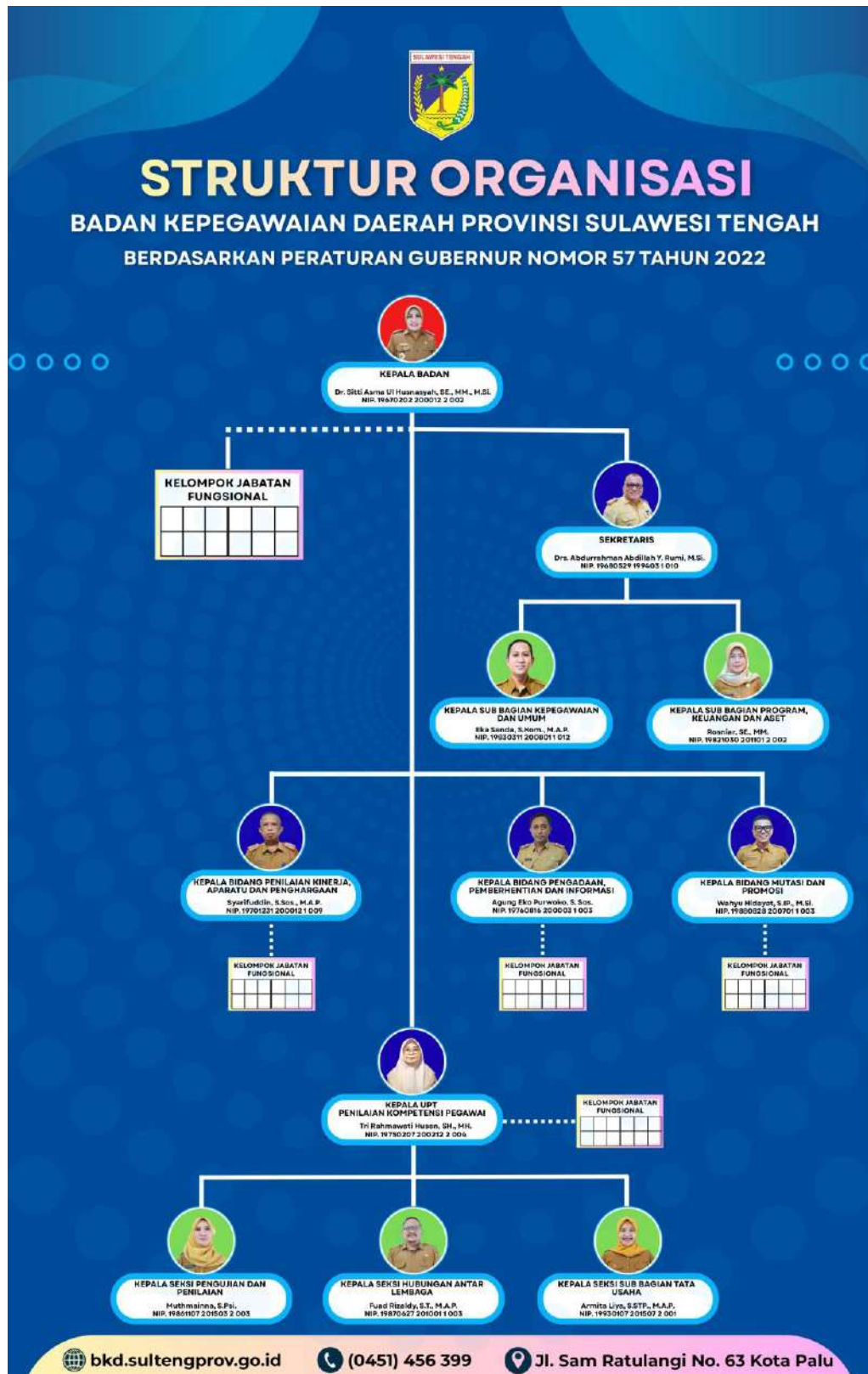
1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi yang diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, besaran organisasi dan kotak jabatan terdiri dari seorang Kepala, seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang kepala UPT serta 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bidang serta 3 (tiga) Seksi dengan komposisi, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris membawahi:
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. dan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahi kelompok jabatan fungsional yang menangani:
 - Urusan Pengadaan CPNS dan PPPK.
 - Urusan Pemberhentian dan Data dan Informasi. serta
 - Urusan Fasilitasi lembaga Profesi ASN.
- d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi kelompok jabatan fungsional yang menangani:
 - Urusan Mutasi.
 - Urusan Kenaikan pangkat dan berkala.
 - Urusan Pembinaan jabatan struktural dan jabatan fungsional.
 - Urusan Pendidikan lanjutan ASN.
- e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi kelompok jabatan fungsional yang menangani:
 - Urusan Penilaian Kinerja Aparatur.
 - Urusan Pemberian Tanda Jasa. dan
 - Urusan Pembinaan Disiplin ASN.

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026



1.3 Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKD Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi beberapa permasalahan utama dan isu strategis yang menjadi perhatian pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. Implementasi Sistem Merit yang Belum Optimal: Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengisian jabatan berbasis kompetensi dan kinerja. Target Indeks Sistem Merit sebesar 0,68 membutuhkan percepatan implementasi di semua lini.
2. Peningkatan Profesionalitas ASN: Masih diperlukannya upaya strategis untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN menuju target 78,7, mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
3. Transformasi Digital Kepegawaian: Kebutuhan untuk mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian guna mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan data ASN.
4. Keterbatasan Anggaran: Perlunya optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja organisasi.
5. Pengembangan Kompetensi SDM Internal: Kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai BKD sendiri agar mampu memberikan layanan kepegawaian yang berkualitas kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKD Tahun 2021-2026 dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2026 antara Kepala BKD (Dr. Sitti Asma Ul Husnasyah, SE., MM., M.Si) selaku Pihak Pertama dengan Gubernur Sulawesi Tengah (Dr. H. Anwar Hafid, M.Si) selaku Pihak Kedua.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Kepala BKD berjanji untuk: (1) Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan (2) Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	0,68	APBD
2	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN	78,7	APBD

Tabel II.2 Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala BKD Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN yang	Indeks Sistem Merit	0,68	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN	78,7	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			14.032.763.429,70
	Program Kepegawaian Daerah			1.036.256.898,00

2.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026 diukur berdasarkan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran mengacu pada Permenpan RB No. 22 Tahun 2024 dengan ketentuan predikat sebagai berikut:

No	Predikat Kinerja	Rentang Capaian (%)
1	Istimewa	> 100%
2	Baik	80,01% - 100%
3	Cukup	60,01% - 80%
4	Kurang	40,01% - 60%
5	Sangat Kurang	<= 40%

a. Capaian Kinerja Strategis

Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang bersifat *outcome* tahunan. Pengukuran realisasinya dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026 melalui penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk Indeks Sistem Merit dan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Indeks Profesionalitas ASN. Pada Triwulan I, BKD telah melakukan berbagai langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut.

Berikut adalah capaian kinerja strategis BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel II.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	0,68	0,17	*)	**)
		Indeks Profesionalitas ASN	78,7	19,68	*)	**)

Keterangan: *) Realisasi diukur pada akhir tahun; **) Capaian dihitung pada akhir tahun

Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang bersifat *outcome* tahunan. Pengukuran realisasinya dilakukan secara komprehensif pada akhir tahun 2026 melalui penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk Indeks Sistem Merit dan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Indeks Profesionalitas ASN. Pada Triwulan I, BKD telah melakukan berbagai langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut.

Target sasaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan representasi dari keberhasilan implementasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu periode anggaran. Pengukuran yang dilakukan pada **akhir tahun atau Triwulan IV** menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana indikator kinerja utama, seperti indeks profesionalitas ASN dan efektivitas manajemen talenta, telah mencapai ambang batas yang ditetapkan. Penilaian di titik final ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efisiensi penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan output kerja nyata di lapangan.

Pelaksanaan evaluasi pada Triwulan IV memungkinkan BKD untuk mengonsolidasikan seluruh data capaian yang bersifat akumulatif dari bulan Januari hingga Desember. Beberapa parameter strategis,

seperti persentase formasi CPNS/PPPK yang terisi, sering kali baru menunjukkan hasil final secara utuh menjelang penutupan tahun. Dengan demikian, data yang dihasilkan pada akhir tahun memiliki tingkat validitas yang tinggi untuk dijadikan dasar penilaian akuntabilitas instansi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain sebagai penanda berakhirnya siklus kerja, pengukuran di akhir tahun berfungsi sebagai instrumen refleksi untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama tiga triwulan sebelumnya. BKD dapat memetakan program mana yang berjalan sesuai rencana dan mana yang memerlukan akselerasi atau perbaikan sistemik. Angka-angka yang muncul pada laporan Triwulan IV bukan sekadar statistik, melainkan potret keberhasilan BKD dalam melakukan pembinaan, pengembangan karier, dan pengawasan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja Program

Tabel II.4 menunjukkan capaian kinerja program BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel II.4 Capaian Kinerja Program Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi General	Nilai RB General	64%			Target pada TW IV
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi & pelaporan	Nilai SAKIP BKD	82			Target pada TW IV
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	97%			Target pada TW IV
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	80%	80%	80%	100%
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	95			Target pada TW IV
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%			Target pada TW IV
5	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional Asn Perangkat Daerah	60			Target pada TW IV
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	0.82			Target pada TW IV
6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0%			Target pada TW IV
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
7	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	70			Target pada TW IV
8	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah	2.7			Target pada TW IV
9	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65			Target pada TW IV
10	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	0,25			Target pada TW IV
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,63			Target pada TW IV
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	88			Target pada TW IV
12	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%			Target pada TW IV

Keterangan: *) Realisasi diukur pada akhir tahun; **) Capaian dihitung pada akhir tahun

Capaian target sasaran program pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara prinsipil dirancang untuk dievaluasi secara menyeluruh pada **Triwulan IV**. Hal ini dikarenakan sebagian besar program kerja kepegawaian, seperti pengembangan kompetensi dan penataan distribusi pegawai, memiliki siklus pelaksanaan yang berjalan sepanjang tahun anggaran. Pengukuran di akhir tahun menjadi titik krusial untuk melihat akumulasi keberhasilan dari seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun secara komprehensif.

Penetapan evaluasi pada akhir tahun ini juga berkaitan erat dengan sifat indikator kinerja program yang bersifat *out put* final. Sebagai contoh, program pengadaan dan seleksi ASN atau penilaian indeks profesionalitas memerlukan waktu proses yang panjang, mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga penetapan hasil. Oleh karena itu, data yang valid dan utuh mengenai keberhasilan program tersebut biasanya baru dapat ditarik dan diukur secara akurat ketika seluruh rangkaian proses administratif telah selesai di penghujung tahun.

Selain itu, pengukuran di Triwulan IV berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang menyinkronkan antara penyerapan anggaran dengan realisasi fisik di lapangan. Mengingat banyak program strategis BKD yang bersifat berkelanjutan (multi-tahap), penilaian yang dilakukan sebelum akhir tahun sering kali belum mencerminkan keberhasilan yang sesungguhnya. Dengan melakukan pengukuran di titik akhir, instansi dapat memberikan potret yang lebih jujur mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Terakhir, hasil pengukuran target program pada akhir tahun ini menjadi landasan utama bagi manajemen dalam melakukan audit kinerja dan perencanaan tahun berikutnya. Melalui data capaian di Triwulan IV, BKD dapat mengidentifikasi kesenjangan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Informasi ini sangat vital untuk menentukan langkah mitigasi, perbaikan sistem, serta penentuan arah kebijakan manajemen sumber daya manusia aparatur agar lebih optimal pada siklus anggaran mendatang.

c. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut adalah capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel II.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
A	Keg: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1	100%
2	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	Target pada TW IV
3	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	-	-	Target pada TW IV
4	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	1	100%
5	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	-	-	Target pada TW IV
6	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	-	-	Target pada TW IV
7	Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	100%
8	Sub Keg: Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	-	-	Target pada TW IV
9	Sub Keg: Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	-	-	Target pada TW IV
10	Sub Keg: Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	-	-	Target pada TW IV
B	Keg: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	120	120	120	100%
2	Sub Keg: Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	300	75	62	83%
3	Sub Keg: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				
4	Sub Keg: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1	100%
C	Keg: Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	1	1	100%
2	Sub Keg: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2			Target TW II & IV
3	Sub Keg: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1			Target TW IV

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
		Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				
D	Keg: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1			Target TW IV
2	Sub Keg: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2			Target TW IV
E	Keg: Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1			Target TW IV

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
2	Sub Keg: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1			Target TW IV
3	Sub Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4			
4	Sub Keg: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12			
5	Sub Keg: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1			Target TW IV
6	Sub Keg: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1			Target TW IV
F	Keg: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Sub Keg: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0			
2	Sub Keg: Pengadaan Mebel					
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0			
3	Sub Keg: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5			
4	Sub Keg: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			
G	Keg: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Sub Keg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1			Target TW IV
2	Sub Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3			Target TW IV
3	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5			
H	Keg: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	40			
2	Sub Keg: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7			
3	Sub Keg: Pemeliharaan Mebel					
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0			
4	Sub Keg: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150			
5	Sub Keg: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			
6	Sub Keg: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			
I	Keg :Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, kebutuhan ASN, perlindungan dan pelayanan ASN	Nilai kriteria perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	105			Target pada TW IV

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
J	Keg :Mutasi dan Promosi ASN					
	Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi berdasarkan sistem merit	Nilai kriteria promosi dan mutasi	27.5	15	15	100%
K	Keg :Pengembangan Kompetensi ASN					
	Meningkatnya kualitas pengembangan karier ASN berdasarkan sistem merit	Nilai Kriteria Pengembangan Karier ASN	55	25	25	100%
L	Keg :Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
	Meningkatnya kualitas Manajemen kinerja ASN dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin berdasarkan sistem merit	Nilai kriteria manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin Nilai aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	87,5	30	25	83%
M	Keg: Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Sub Keg: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	1	100%
N	Keg: Pengembangan Kompetensi ASN					

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	Sub Keg: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					
	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1000	-	-	Target TW II & III
2	Sub Keg: Pengelolaan Assessment Center					
	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	-	-	Target TW II & III

Berjalan lurus dengan Capaian Kinerja Strategis dan Program, capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD banyak yang bisa dinilai pada akhir tahun. Pengukuran capaian target pada level **kegiatan dan sub kegiatan** di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) secara teknis mencapai titik akhirnya pada **Triwulan IV**. Hal ini disebabkan oleh sifat operasional sub kegiatan—seperti pemutakhiran data mandiri, proses kenaikan pangkat, hingga layanan pensiun—yang pelaksanaannya tersebar dalam jadwal periodik sepanjang tahun. Evaluasi di akhir tahun menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan teknis yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran telah tuntas dilaksanakan secara paripurna.

Secara administratif, data capaian sub kegiatan seringkali bersifat akumulatif, di mana target kinerja baru dianggap terpenuhi 100% setelah seluruh volume keluaran (*output*) dihitung pada akhir Desember. Sebagai contoh, sub kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis atau diklat pegawai mungkin dilaksanakan dalam beberapa gelombang. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan sasaran kegiatan tersebut hanya dapat diukur secara presisi pada laporan Triwulan IV, saat seluruh jumlah peserta dan dokumen pelaporan telah lengkap terverifikasi.

Pengukuran di penghujung tahun juga berfungsi sebagai sarana sinkronisasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan pada tiap-tiap sub kegiatan. Mengingat BKD mengelola berbagai urusan administratif yang membutuhkan ketelitian tinggi, penilaian di Triwulan IV memberikan ruang bagi aparatur untuk melakukan rekonsiliasi data jika terdapat kendala teknis pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, laporan akhir tahun menyajikan gambaran yang jujur mengenai efektivitas setiap rupiah yang dibelanjakan terhadap kualitas layanan kepegawaian yang dihasilkan.

Terakhir, hasil pengukuran target sasaran kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan IV ini menjadi bahan evaluasi mendalam untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya. Melalui analisis capaian akhir tahun, BKD dapat memetakan sub kegiatan mana yang memiliki daya serap dan dampak tinggi, serta mana yang memerlukan

efisiensi atau perubahan metode pelaksanaan. Siklus ini memastikan bahwa manajemen kinerja di level terkecil sekalipun tetap terkendali dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Tetapi ada juga yang bisa diukur per Triwulan seperti Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen), Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen), Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan), Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan), Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Sebelumnya dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan), Nilai kriteria promosi dan mutasi, Nilai Kriteria Pengembangan Karier ASN, dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) telah mencapai target 100 % pada Triwulan I ini, yang berarti memiliki predikat kerja “Istimewa”, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Dokumen Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) dan Nilai kriteria manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin mencapai target 83% pada triwulan I ini, yang berarti memiliki predikat kerja “Baik”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, berikut adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
- Tersedianya SDM yang kompeten dengan dominasi pegawai berpendidikan tinggi (S1/D4 sebanyak 64 orang dan S2 sebanyak 26 orang);

- Koordinasi antar unit kerja yang berjalan efektif, meliputi Sekretariat, Bidang Pengadaan, Bidang Mutasi, Bidang Penilaian Kinerja, dan UPT Penilaian Kompetensi;
- Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan data kepegawaian melalui e-MEP dan sistem informasi lainnya;
- Sinergi yang baik dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian.

2. Faktor Penghambat:

- Beberapa indikator kinerja strategis (Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN) bersifat kumulatif tahunan sehingga realisasi baru dapat diukur secara definitif pada akhir tahun;
- Keterbatasan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang memerlukan penyesuaian prioritas pelaksanaan;
- Proses administrasi pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu cukup lama terutama untuk pengadaan BMD;
- Dinamika regulasi kepegawaian dari pemerintah pusat yang memerlukan adaptasi cepat di tingkat daerah;
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur belum terlaksana pada Triwulan I karena terjadwal pada triwulan berikutnya.

3. capaian anggaran

Realisasi anggaran BKD Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan penyerapan anggaran yang masih dalam tahap awal pelaksanaan. Total pagu anggaran tahun 2026 untuk BKD Provinsi Sulawesi Tengah (termasuk UPT Penilaian Kompetensi Pegawai) sebesar Rp15.539.571.894,90 dengan rincian belanja operasi dan belanja modal. Berikut rincian capaian anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan:

Tabel II.6 Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2026

URAIAN	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target TW I (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH	15.919.033.327,40	3.881.123.266,80	3.182.311.348,00	81,99%
BELANJA OPERASI	15.539.571.894,90	3.881.123.266,80	3.182.311.348,00	81,99%
<i>Belanja Pegawai</i>	12.809.435.415,40	2.586.193.757,00	2.586.193.757,00	100,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.151.599.038,40	2.012.028.237,00	2.012.028.237,00	100,00%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.657.836.377,00	574.165.520,00	574.165.520,00	100,00%
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.730.136.479,50	1.294.929.509,80	596.117.591,00	46,03%
Belanja Barang	503.201.607,70	372.909.909,80	45.276.300,00	12,14%
Belanja Jasa	1.382.972.871,80	476.638.600,00	332.733.242,00	69,81%
Belanja Pemeliharaan	66.550.000,00	31.362.500,00	17.035.000,00	54,32%
Belanja Perjalanan Dinas	449.412.000,00	122.602.000,00	67.073.049,00	54,71%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	328.000.000,00	160.000.000,00	134.000.000,00	83,75%
JUMLAH BELANJA OPERASI	15.539.571.894,90	3.881.123.266,80	3.182.311.348,00	81,99%
BELANJA MODAL	379.461.432,50	0,00	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.461.432,50	0,00	0,00	0,00%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	360.184.340,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Modal Komputer	19.277.092,50	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA MODAL	379.461.432,50	0,00	0,00	0,00%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan penyerapan yang bervariasi antar program dan kegiatan. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran mencapai **3.182.311.348,00** atau **81,99%** dari Target Triwulan I sebesar **3.881.123.266,80**. Penyerapan terbesar berada pada Belanja Pegawai kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar **2.586.193.757,00** yang didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Untuk Belanja Modal nilai target dan capaian triwulan I masih kosong karena di targetkan pada triwulan selanjutnya.

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. BKD Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan dua indikator kinerja strategis yaitu Indeks Sistem Merit dengan target 0,68 dan Indeks Profesionalitas ASN dengan target 78,7. Kedua indikator ini bersifat kumulatif tahunan sehingga realisasi akan diukur secara definitif pada akhir tahun 2026.
2. Capaian kinerja program pada Triwulan I menunjukkan hasil yang positif. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencapai capaian 88,32% (predikat Baik), sedangkan Program Kepegawaian Daerah berhasil melampaui target dengan capaian 107,32% (predikat Istimewa).
3. Dari sisi anggaran, total realisasi belanja mencapai **3.182.311.348,00** atau **81,99%** dari Target Triwulan I sebesar **3.881.123.266,80**. Penyerapan ini menunjukkan pelaksanaan anggaran yang berjalan proporsional pada triwulan pertama.
4. Dengan dukungan 114 pegawai yang terdiri dari 94 PNS dan 20 PPPK, serta didukung oleh struktur organisasi yang solid mencakup Sekretariat, 3 Bidang Teknis, dan 1 UPT, BKD Provinsi Sulawesi Tengah optimis dapat mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2026.
5. Upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya akan difokuskan pada: (a) percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi seperti Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Administrasi BMD; (b) optimalisasi penyerapan anggaran sesuai target triwulanan; serta (c) penguatan koordinasi antar unit kerja

dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja BKD Provinsi Sulawesi Tengah di triwulan-triwulan berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas manajemen ASN di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, April 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. SITTI ASMA UL HUSNASYAH, SE., MM., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19670202 200012 2 002



LAKIP TW I

RSUD UNDATA PALU 2026



E-mail : uptrsudundata@gmail.com,
Website : rsudundata.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar oleh Tim Penyusun. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen yang memuat hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran kegiatan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2026 sebagai evaluasi terhadap pencapaiannya serta masalah dan kendala-kendala yang dihadapi dan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tahun mendatang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026, telah melibatkan seluruh komponen unit kerja yang terkait. Masih banyak kekurangan dalam susunan dokumen Laporan Kinerja ini, namun saran dan masukan dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga dapat tersaji dengan lebih baik dan lebih sempurna. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen “Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2026” ini. Semoga dokumen ini bermanfaat.

Plt. DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah 1

1.2 Permasalahan Utama/ Isu Strategis 16

BAB II PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA 18

2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja 18

2.2 Capaian Kinerja 22

2.3 Capaian Anggaran 34

BAB III PENUTUP 40

3.1 Kesimpulan 40

3.2 Tindak Lanjut 40

LAMPIRAN 42

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata2

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD Undata9

Tabel 1.3 Bak Air Bersih11

Tabel 1.4 Pejabat Struktural di UPT. RSUD Undata13

Tabel 1.5 Pejabat Fungsional Penyetaraan Eselon IV di UPT. RSUD Undata14

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 2025-202916

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 202617

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I.....20

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan I.....21

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I.....23

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan I.....32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT. RSUD Undata15

Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh Direktur UPT. RSUD Undata19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Undata merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit maka RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik. Rumah Sakit Kelas B harus mempunyai 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 22 (dua puluh dua) Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 5 (lima) Pelayanan Medik Sub Spesialis. RSUD Undata juga merupakan rumah sakit pendidikan yang memberikan pendidikan di bidang kedokteran, farmasi dan keperawatan. Berikut gambaran umum RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama Rumah Sakit | : RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah |
| 2. Alamat | : Jl. R. E. Martadinata Kel. Tondo |
| Telepon | : (0451) 4131445-4131446 |
| Whatsapp | : 082290762667 |
| Website | : rsudundata.sultengprov.go.id |
| Email | : rsudundata@sultengprov.go.id |
| Instagram | : rsudundataprovsulteng |
| 3. Nama Plt. Direktur | : dr. Nurlaela Harate, MPH |
| 4. Kelas Rumah Sakit | : B |
| 5. Nomor Registrasi RS | : 7271014 |
| 6. No. & Tanggal Izin Operasional RS | : 0220004261304 (10 Februari 2020) |
| 7. Luas Tanah | : 53.125,00 m ² |
| 8. Luas Bangunan | : 7.890,09 m ² |

9. Standar Kualitas Pelayanan RS : Akreditasi LAMKPRS 2022

10. Kapasitas Tempat Tidur

No	Tempat Tidur	Jumlah
1)	VVIP	4
2)	VIP	20
3)	Kelas 1	100
4)	Kelas 2	67
5)	Kelas 3	155
6)	Non Kelas	49
7)	Isolasi	2
Jumlah Total		397

Sumber Data : Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Nomor : 188.4/644/RSUD Undata

11. Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah sakit saat ini memiliki 1.488 orang tenaga tetap yang terdiri dari 119 orang tenaga medis, 1.043 orang tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan sebanyak 322 orang. Sedangkan jumlah dokter mitra sebanyak 14 orang. Adapun Profil ketenagaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata

a) TENAGA KESEHATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

1) Tenaga Medis

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
100	Dokter Umum	20	20	8	3	0	51
101	Dokter Spes Bedah	2	1	0	1	0	4
102	Dokter Spes Penyakit Dalam	5	1	2	1	0	9
103	Dokter Spes Kesehatan Anak	3	0	0	0	0	3
104	Dokter Spes Obsgin	4	0	0	1	0	5
105	Dokter Spes Radiologi	2	0	0	1	0	3

106	Dokter Spes Anesthesi	3	0	0	0	1	4
107	Dokter Spes Mikrobiologi	0	0	1	0	0	1
108	Dokter Spes Patologi Anatomi	1	0	0	0	2	3
109	Dokter Spes Patologi Klinik	1	0	0	2	0	3
110	Dokter Spes Jiwa	0	0	0	1	0	1
111	Dokter Spes Mata	2	0	0	1	0	3
112	Dokter Spes THT	2	0	0	0	0	2
113	Dokter Spes Kulit Kelamin	1	0	0	0	0	1
114	Dokter Spes Paru	1	0	0	0	0	1
115	Dokter Spes Saraf	2	0	0	0	1	3
116	Dokter Spes Bedah Anak	0	0	0	0	1	1
117	Dokter Spes Bedah Saraf	1	0	0	0	1	2
118	Dokter Spes Bedah Onkologi	1	0	0	0	0	1
119	Dokter Spes Bedah Orthopedi	1	0	0	0	0	1
120	Dokter Spes Urologi	0	0	0	0	1	1
121	Dokter Spes Gizi Klinik	1	0	0	0	0	1
122	Dokter Spes Rehab Medik	1	0	0	0	0	1
123	Dokter Spes Fisik & Rehabilitasi	1	0	0	0	0	1
124	Dokter Sub Spes Onkologi Radiasi	0	0	0	1	0	1
125	Dokter Spes Jantung	0	0	0	0	5	5
126	Dokter Spes Jantung Intervensi	1	0	0	0	0	1
127	Dokter Spes Bedah Toraks Vaskuler	0	0	0	0	1	1
128	Dokter Sub Spes Bedah Vaskuler	0	0	0	0	1	1
129	Dokter Sub Spes Kardiovaskuler	1	0	0	0	0	1
130	Dokter Sub Spes Onkologi Ginekologi	0	0	0	1	0	1
131	Dokter Sub Spes Anestesiologi	0	0	0	1	0	1
132	Dokter Sub Spes Digestif	0	0	0	1	0	1
133	Dokter Gigi	9	1	0	0	0	10
134	Dokter Spes Periodontik	1	0	0	0	0	1
135	Dokter Spes Bedah Mulut	0	0	0	1	0	1
136	Dokter Spes Konservasi Gigi Anak	0	0	0	1	0	1
137	Dokter Spes Konservasi Gigi	0	0	0	1	0	1
137	Total (100-137)	67	23	11	18	14	133

2) Tenaga Keperawatan

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
200	S3 Keperawatan & Lainnya	0	0	0	0	0	0

201	S3 Kesehatan Masyarakat & Lainnya	1	0	0	0	0	1
202	S2 Keperawatan	4	0	0	0	0	4
203	S2 Kesehatan Masyarakat & Lainnya	6	0	0	0	0	6
204	S1 Keperawatan + Ners	230	3	3	2	0	238
205	D4 Keperawatan + Ners & Lainnya	6	1	2	0	0	9
207	AKPER/D3 Perawatan	130	0	98	7	0	235
208	Perawat Kesehatan (SPK/SPR)	4	0	0	0	0	4
299	Total (200 - 208)	381	4	103	9	0	497

3) Tenaga Kebidanan

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
300	S2 Kesehatan Masyarakat & Lainnya	2	0	0	0	0	2
301	S1 Kebidanan	1	2	0	0	0	3
302	D4 Kebidanan/ S.Tr. Keb	46	0	24	1	0	71
303	AKBID/D3 Kebidanan	49	0	28	3	0	80
399	Total (300 - 304)	98	2	52	4	0	156

4) Tenaga Kefarmasian

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
400	Apoteker + S2/M Kes & Lainnya	6	0	0	0	0	6
401	Apoteker	16	2	7	0	0	25
402	Asisten Apoteker/S1 Farmasi	10	9	14	6	0	39
403	Asisten Apoteker/D3 Farmasi	17	2	9	2	0	30
499	Total (400 - 403)	49	13	30	8	0	100

5) Tenaga Gizi

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
500	S2 Gizi/Dietisien	1	0	0	0	0	1
501	D4/S1 Gizi/Dietisien	8	1	1	0	0	10
502	S1 Kesehatan Masyarakat/ Gizi Masy.	6	0	0	0	0	6
503	Akademi/D3-Gizi/Dietisien	4	1	5	1	0	11
599	Total (500 - 503)	19	2	6	1	0	28

6) Tenaga Psikologi Klinis

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
600	S2 Psikologi Klinis/ Psikolog	4	0	0	0	0	4
601	S1 Psikologi	4	0	0	2	0	6
699	Total (600 - 601)	8	0	0	2	0	10

7) Tenaga Keterampilan Fisik

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
700	S1 Fisioterapi/ Fisioterapis	2	0	0	0	0	2
701	D4 Fisioterapi/ Fisioterapis	2	0	1	0	0	3
702	Akademi/D3- Fisioterapi/Fisioterapis	7	3	0	0	0	10
703	Okupasi Terapi	1	0	0	0	0	1
704	Terapis Wicara	2	0	0	0	0	2
799	Total (700 - 704)	14	3	1	0	0	18

8) Tenaga Keteknisan Medis

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
800	Perekam Medis	2	0	1	2	0	5
801	Penata Anastesi	5	0	0	1	0	6
802	Asisten Penata Anastesi	1	0	2	0	0	3
899	Total (800 - 802)	8	0	3	3	0	14

9) Tenaga Teknik Biomedika

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
900	D4 Teknik Radiologi/ Radiografer	2	1	1	4	0	8
901	D3 Radiologi/ Radiografer	3	1	1	5	0	10
902	D3 Radiodiagnostik Dan Radioterapi	0	0	2	0	0	2
903	D3 Teknik Kardiovaskuler	0	0	0	1	0	1
904	S2 Fisika Medik/Fisikawan Medik	0	1	0	0	0	1
905	S1 Fisika Medik/Fisikawan Medik	2	1	0	0	0	3
906	D4 Ortotik Prostetik	0	0	0	0	0	0
907	D3 Ortotik Prostetik	1	0	0	0	0	1
908	S1 Sains Terapan/Pranata Elektro Medis	1	0	0	0	0	1
909	ATEM/D3 Teknik/ Elektro Medis	3	0	0	1	0	4

910	D3 Teknik Kesehatan Gigi/Teknisi Gigi	1	0	0	0	0	1
911	D4 Terapis Gigi dan Mulut	2	0	0	0	0	2
912	D3 Kesehatan Gigi	3	0	0	0	0	3
913	S1 Sains Terapan/Pranata LabKes	3	1	0	1	0	5
915	S1 Analis Kesehatan/Pranata LabKes	0	0	2	0	0	2
916	S1 Kimia	1	0	0	0	0	1
917	S1 Biologi	0	0	1	0	0	1
918	D4 Analis Kesehatan	0	0	1	2	0	3
919	AMAK/D3 Analis Kesehatan	8	0	2	0	0	10
920	D4 Tenaga Lab Medis	0	0	1	2	0	3
921	D3 Tenaga Lab Medis	0	0	3	2	0	5
922	D3 Teknisi Transfusi Darah	2	0	0	0	0	2
923	D1 Teknisi Transfusi Darah	3	0	0	0	0	3
924	D3 Teknologi Bank Darah	0	0	4	2	0	6
925	SPTG	1	0	0	0	0	1
999	Total (900 - 925)	36	5	18	20	0	79

10) Tenaga Kesehatan Masyarakat

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1000	S3 Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0	1
1001	S2 Kesehatan Masyarakat	8	1	0	0	0	9
1002	S2 Lainnya	3	0	0	0	0	3
1003	S1 Kesehatan Masyarakat/ Lainnya	19	22	50	10	0	101
1099	Total 1000-1003	31	23	50	10	0	114

11) Tenaga Kesehatan Lingkungan

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1100	S1 Kesehatan Masyarakat/ Sanitarian	7	0	0	0	0	7
1101	AKL/D3 Kesehatan Lingkungan	11	1	3	1	0	16
1102	SPPH	4	0	0	0	0	4
1199	Total (1100 - 1199)	22	1	3	1	0	27

b) TENAGA NON KESEHATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

1) Pascasarjana/ S2

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1200	S2 Administrasi Publik	6	0	0	0	0	6

1201	S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	1	0	0	0	0	1
1202	S2 Manajemen	1	0	0	0	0	1
1203	S2 Sains	2	0	0	0	0	2
1299	Total (1200-1299)	10	0	0	0	0	10

2) Sarjana/ D4

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1300	S1 Administrasi Publik/ Negara	5	0	10	1	0	16
1301	S1 Akuntansi	0	0	1	2	0	3
1302	S1 Akuntansi Perpajakan	0	2	0	0	0	2
1303	S1 Ekonomi	11	0	10	1	0	22
1304	S1 Hukum	0	0	0	0	0	0
1305	S1 Komputer	1	14	9	1	0	25
1306	S1 Manajemen	1	0	4	2	0	7
1307	S1 Komunikasi	0	0	0	0	0	0
1308	S1 Sosial	6	0	0	1	0	7
1309	S1 Lainnya	0	0	0	2	0	2
1310	D IV Teknik Listrik	0	5	0	0	0	5
1311	D IV Teknik Sipil Bangunan Gedung	0	1	0	0	0	1
1399	Total (1300-1399)	24	22	34	10	0	90

3) Sarjana Muda/D3

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1400	D3 Keuangan	0	0	0	1	0	1
1401	D3 Komputer	0	0	0	1	0	1
1402	D3 Manajemen Informatika	1	0	0	0	0	1
1499	Total (1400-1499)	1	0	0	2	0	3

4) Sekolah Menengah Tingkat Atas

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1500	SMA/SMU/SLTA	29	0	50	103	0	182
1501	SMEA/SMK	2	0	0	20	0	22
1502	STM/SMK Listrik	2	0	0	2	0	4
1503	SMKK	2	0	0	0	0	2
1504	SMTA Lainnya	2	0	0	3	0	5

1599	Total (1500 - 1599)	37	0	50	128	0	215
------	-----------------------	----	---	----	-----	---	-----

5) SLTP DAN SD ke bawah

NO KODE	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PNS DAERAH	CPNS	PPPK	BLUD	MITRA	TOTAL
1600	SMTP	2	0	0	0	0	2
1601	SD Kebawah	2	0	0	0	0	2
1699	Total (1600 - 1699)	4	0	0	0	0	4
JUMLAH TOTAL (100 - 1600)		799	98	361	216	14	1.488

Sumber Data : Bagian Kepegawaian update Desember 2025

12. Jenis Pelayanan

Pelayanan Unggulan yang ada di RSUD Undata sebagai berikut :

a) Pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik

- 1) Cardiac Centre
- 2) Subspesialis Obstetri Ginekology Konsultan Onkologi
- 3) Subspesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskuler
- 4) Subspesialis Bedah Digestif Konsultan
- 5) Subspesialis Bedah Onkologi
- 6) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi
- 7) Spesialis Bedah Saraf
- 8) Spesialis Bedah Urologi
- 9) Spesialis Bedah Mulut
- 10) Spesialis Prosthodonti
- 11) Spesialis Patologi Anatomi
- 12) Spesialis Mikrobiologi Klinik
- 13) Hemofilia
- 14) Radioterapi Onkologi

b) Pelayanan Medik Penunjang Klinik

- 1) Catheterisasi Jantung (Cath Lab)
- 2) Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- 3) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
- 4) Medical Dental Care

- 5) Hemodialisa
 - 6) CT Scan 128 slice
 - 7) Cytotoxic Cabinet
 - 8) Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi
 - 9) Endoscopy
 - 10) Panoramic
 - 11) Skin Center (Dermatology Laser Aesthetic)
 - 12) Apheresis Donor Plasma Konvalesen
 - 13) Apheresis Umum
 - 14) ABBOT
 - 15) Tes Cepat Molekuler (TCM)
 - 16) Tumor Marker
- c) Pelayanan Penunjang Lainnya
- Pelayanan Prioritas Tol Alima dan Tol Tina Ante Ngana Kodi

13. Sarana, Prasarana dan Peralatan

UPT. RSUD Undata terdiri dari bangunan/gedung dengan luas bangunan $\pm 14.890,33 \text{ m}^2$ di atas Luas Tanah 53.125 m^2 . Sebelah utara berbatasan dengan lokasi Perumahan Teluk Palu Permai, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Model Terpadu Madani dan sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Perikanan Dan Kelautan. Secara rinci penggunaan gedung seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD UNDATA Tahun 2026

Jenis Barang	Luas Tanah/ Bangunan	Jumlah	Satuan
Tanah di Jalan dr. Suharso No.14 Kota Palu Sulawesi Tengah	4.167,00 m ²	1	Bidang
Tanah di Jalan RE. Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah	53.125,00 m ²	1	Bidang

Bangunan/Gedung RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	14.890,33 m ²	1	Bidang
Tanah Lokasi Lahan Parkir di Jalan RE. Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah	14.044,00 m ²	1	Bidang

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas Lift : 7 unit
 Gedung A 2 unit
 Gedung B 2 unit
 Gedung Anggrek 1 unit
 Gedung Peristi 1 unit
 Gedung Flamboyan 1 unit
- b. Fasilitas Air Bersih : Sumur Artesis 10 sumur
 Bak Penampungan 16 bak penampungan
- c. Fasilitas Listrik : Gardu 1
 PLN 415 KVA
 Genset 810 KVA
 Gardu 2
 PLN 630 KVA
 Genset 700 KVA
 Gardu 3
 PLN 630 KVA
 Genset 750 KVA
 Gardu 4
 PLN 630 KVA
 Genset Belum Ada
- d. Gas Medis : Gedung A (Ruang Asoka, Edelweis)
 Gedung B (ICVCU, Cathlab, IBS)
 Gedung Dahlia dan Gedung Kemuning
 Gedung Catelia
 Gedung Ruang Seroja, Ruang Bogenvil, Ruang Melati, Ruang Flamboyan)
 Gedung Kandungan Kebidanan dan Peristi (Matahari, Kamar Bersalin, Kamar Bayi, NICU)
 Gedung Ruang Teratai, Ruang Aster dan Ruang Mawar
 Gedung Ruang Anggrek dan Kenanga (Kemoterapi)
 Gedung Hemodialisa

- e. AC Sentral : Gedung IGD Ponak Kebidanan
Gedung ICU dan PICU
Gedung A (Poliklinik, Ruang Edelweis, Ruang Asoka, Aula)
Gedung B (CSSD, Cardiac Center, IBS)
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Radiologi
- f. Telepon : 4131446 Hunting (2 Saluran)
- g. IPAL Cair : 1. Tangki Biofilter kapasitas :
a) 2 x 40 m³
b) 1 x 20 m³
2. Ring blower 4 buah
3. Tabung Reaktor 3 buah
4. Mesin AOP (*Advance Oxidation Process*) 9 buah
5. Pompa celup air limbah 13 buah
6. Pretreatment Limbah Laundry kapasitas 5 m³
7. Pretreatment Limbah Dapur kapasitas 5 m³

Sumber Data : Bidang Penunjang Medik

Tabel 1.3 Bak Air Bersih

No	Ruangan	Lokasi	Ukuran			Volume (m ³)
			Panjang (p)	Lebar (l)	Tinggi (t)	
1	Instalasi Laundry	Depan Ruangan Londry	3,1	2	1,65	10,23
2	Instalasi Gizi	Di Belakang Instalasi Gizi	3,3	2,2	1,65	11,98
3	Paviliun Catelya	Sebelah Selasar Paviliun Catelya	3,2	2,2	1,5	10,56
4	Paviliun Anggrek/Kenanga	Di Belakang Paviliun Kenanga	3,3	2,3	1,76	13,36
5	ICU	Di Belakang ICU	3,25	2,35	1,8	13,75
6	Instalasi Kebidanan	Di Samping Instalasi Kebidanan	3,2	2,3	1,75	12,88
7	Instalasi Radiologi	Di Belakang Instalasi Radiologi	3,2	2,3	1,67	12,29
8	Laboratorium	Di Depan Laboratorium	3,3	2,3	1,86	14,12
9	Poliklinik	Di Bagian Tengah Poliklinik	2,8	1,87	1,96	10,26
10	Mesjid	Di Samping Mesjid	3,35	2,35	1,8	14,17

11	Paviliun Teratai	Di Belakang Paviliun Teratai	3,3	2,56	1,75	14,78
12	Paviliun Seroja	Di Belakang Paviliun Flamboyan	3,6	2,7	1,77	17,2
13	Paviliun Kemuning	Di Samping Paviliun Kemuning				
		Bak Kiri	3	1,2	2	7,2
		Bak Kanan	4	0,8	2	6,4
14	Bak Induk Beton	Di Bagian Belakang Rumah Sakit	10,2	7,5	1,7	130,05
15	Bak Induk Fiber	Di Bagian Belakang Rumah Sakit	13	5	3	195

Sumber Data : Laporan Instalasi Sanitasi

14. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata. UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

➤ **Jabatan Struktural**

Tabel 1.4

Pejabat Struktural pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

No	N a m a	Jabatan
1	dr. Nurlaela Harate, M.PH	Plt. Direktur
2	dr. Nurlaela Harate, M.PH	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.BS	Wakil Direktur Pelayanan
4	Indrawati, SKM.,MM	Wakil Direktur Program dan Diklit
5	Nurdaeni, SE.,M.Si	Bagian Keuangan
6	Saftianingsih, SE.,MM	Bagian Perlengkapan dan Umum
7	Musdalifah Dj. Umar, S.STP.,MM	Bagian Kepegawaian
8	dr. Subhan Habibi	Bidang Pelayanan Medik
9	Lince, SKM.,M.A.P	Bidang Keperawatan
10	Deky Wotulo, SKM.,MPH	Bidang Penunjang Medik
11	Teguh Hidayat, SKM.,MPH	Bidang Program dan Evaluasi
12	Dr. Surianto, S.Kep.,Ns.,MPH	Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
13	dr. Grace Patricia Tampa'i	Bidang Rekam Medik dan Informasi

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

➤ **Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan Eselon IV**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Tabel 1.5
Pejabat Fungsional Penyetaraan Eselon IV
pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

No	N a m a	Jabatan
1	Rusmin, SH	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
2	Warsiyem, SE.,MM	Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
3	Jumiati, S.Kep.,M.AP	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4	Slamet Widodo, S.Sos	Administrator Kesehatan Ahli Muda
5	Monalisa Djanggola, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda
6	Aghita, S.Farm, Apt	Administrator Kesehatan Ahli Muda
7	Murniati, S.Kep.M.AP	Administrator Kesehatan Ahli Muda
8	Gazali, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda
9	Chandra, SE.,MPH	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

➤ STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD UNDATA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT RSUD Undata

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

ANWAR HAFID

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

1.2 Isu Strategis/ Permasalahan

Untuk meningkatkan kesinambungan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan strategi yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi utilisasi tempat tidur dengan peningkatan kualitas layanan klinis. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain :

- 1) Penguatan mutu pelayanan klinis, meningkatkan standar prosedur operasional penanganan kasus kritis melalui penerapan *clinical pathway* dan audit medis berkala serta memperkuat *system early warning score* untuk mendeteksi dini pasien dengan risiko tinggi mortalitas.
- 2) Peningkatan kompetensi tenaga medis dengan melaksanakan pelatihan berkelanjutan terkait tata laksana penyakit dengan risiko mortalitas tinggi (seperti jantung, stroke dan infeksi berat) dan memperkuat kolaborasi antar-spesialis untuk mempercepat pengambilan keputusan medis
- 3) Optimalisasi fasilitas dan peralatan medis melalui penambahan atau pembaharuan peralatan penunjang diagnosis dan terapi intensif (ICU, ventilator, monitoring pasien) serta menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan peralatan emergensi.
- 4) Manajemen risiko dan mutu layanan, mengembangkan *patient safety* program secara konsisten untuk menurunkan angka kejadian yang berkontribusi terhadap mortalitas dan melakukan evaluasi bulanan disertai analisis penyebab utama serta tindak lanjut perbaikan.
- 5) Penguatan rujukan dan sistem informasi, memperbaiki koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan primer agar pasien datang lebih awal, sebelum dalam kondisi kritis dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit untuk memantau secara *real-time*.
- 6) Penguatan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, mengembangkan program pembelajaran klinis bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa melalui praktik lapangan, workshop serta pembelajaran berbasis kasus untuk menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan responsif.

➤ **Ruang Lingkup**

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ini menjelaskan tentang program kegiatan dan pencapaian kinerja pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, keuangan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan manajerial rumah sakit. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja sebagai perbaikan terhadap kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan I tahun 2026 disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan Gambaran umum organisasi, seperti jumlah SDM, jumlah sarana prasarana pendukung, tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai peraturan yang berlaku, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah
- Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang IKU Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026, capaian kinerja strategis, kinerja program, kinerja kegiatan dan kinerja sub kegiatan Triwulan I
- Bab III. Penutup, menjelaskan Simpulan umum atas capaian atas capaian kinerja organisasi Triwulan I Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja Rumah Sakit berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029

Indikator kinerja RSUD Undata yang mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Undata
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan.

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Undata dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke :				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/Nilai)	93%	93%	94%	94%	94,5%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/Indeks)	80%	80%	81%	82%	83%

		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	70%	71%	72%	73%	74%
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
				2026	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/ Nilai)	93%	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/ Indeks)	80%	20%	20%	20%	20%
		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	71%	17,75%	17,75%	17,75%	17,75%

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Undata menunjukkan adanya penguatan arah kebijakan pengukuran kinerja yang lebih berfokus pada mutu pelayanan dan akuntabilitas organisasi. Jika sebelumnya indikator kinerja lebih berorientasi pada aspek operasional, maka dalam perencanaan saat ini IKU difokuskan pada capaian

strategis seperti predikat Akreditasi Rumah Sakit dengan target Paripurna secara berkelanjutan, peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah sakit yang dipertahankan dan ditingkatkan di atas standar minimal $\geq 80\%$ serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi yang ditargetkan meningkat dari $\geq 71\%$. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada kuantitas layanan, tetapi juga pada kualitas, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja yang terukur dan sistematis. Dengan penguatan IKU tersebut, RSUD Undata diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten, memperkuat tata kelola rumah sakit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai rumah sakit rujukan yang profesional dan berdaya saing.

2) Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja di RSUD Undata dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan meningkatnya tuntutan terhadap mutu layanan, keselamatan pasien, transparansi, dan akuntabilitas publik, rumah sakit dituntut memiliki sistem pengelolaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan IKU yang berfokus pada akreditasi, capaian indikator mutu nasional serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi menuntut komitmen yang terintegrasi dari seluruh unit kerja agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi hingga ke bidang dan bagian sebagai bentuk penjabaran target organisasi ke dalam target operasional yang lebih spesifik. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara tujuan strategis rumah sakit dengan pelaksanaan

tugas di setiap unit kerja, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki indikator dan target yang terukur sesuai kontribusinya terhadap pencapaian IKU rumah sakit. Berikut kami tampilkan Perjanjian Kinerja Direktur :

**Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh oleh
Direktur UPT. RSUD Undata
Tahun 2026**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	94%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien)	83%
3	Meningkatnya pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	73%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175.680.065.544,00	APBD/BLUD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.055.713.358,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
Plt. DIREKTUR RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. NURLAELA HARATE, M.PH

Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2001

1) Capaian Kinerja Strategis Triwulan I

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan I		
				2026	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/Nilai)	93,5%	23,38%	23,38%	25%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/Indeks)	80%	20%	20%	25%
		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	71%	17,75%	17,75%	25%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2026, sehingga dapat diketahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Pada capaian kinerja berdasarkan Renstra 2021–2026, indikator Akreditasi Rumah Sakit menunjukkan capaian yang optimal. Target yang ditetapkan sebesar 93,5% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 23,38%, sehingga tingkat capaian mencapai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Undata mampu mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan.

Selanjutnya pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit, target yang ditetapkan sebesar $\geq 80\%$, sementara realisasi yang dicapai sebesar 20% dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator mutu

pelayanan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penguatan implementasi indikator mutu, peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Sementara itu pada indikator Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi, kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 71%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 17,75% dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Undata secara massif berkomitmen dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian Triwulan I menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik didukung oleh capaian per indikator di atas dari target yang ditetapkan walaupun secara akumulasi masih rendah, olehnya masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek pengembangan SDM masih membutuhkan perhatian dan percepatan yang lebih serius agar selaras dengan peningkatan mutu layanan dan tuntutan standar akreditasi dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2) Capaian Kinerja Program

Tabel 2.4 Capaian kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan I

N O	SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		TARGET		REALISASI DAN CAPAIAN	
				TAHUNAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
				Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%
1	2	3	4	5		6		7	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	93,5	%	23,38	%	25	%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	%	20,3	%	25	%

Penyusunan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dalam Renstra RSUD Undata tahun 2025-2029 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada hasil pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penyesuaian nomenklatur dilakukan agar rencana program dan kegiatan rumah sakit dapat lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, program yang akan dilaksanakan RSUD Undata pada tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I kedua Program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 93,5%, sedangkan realisasi triwulan I yang dicapai mencapai 23,38% dengan tingkat capaian sebesar 25%. Hal ini pun berlaku untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 81% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 20,3%, sehingga tingkat capaian mencapai 25%.

3) Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I

Tabel 2.5 Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET		TARGET			REALISASI DAN CAPAIAN		
				TAHUNAN		TRIWULAN I			TRIWULAN I		
				K	Satuan	K	Satuan	%	K	Satuan	%
1	2	3	4	5		6			7		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	93,5	%			23%			23%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya laporan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12	Laporan	3	Laporan	25%	3	Laporan	27,81%
	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	3	Dokumen	25%	3	Dokumen	27,81%
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat							25%			28,57%
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Diploma (DIII)							25%			28,57%
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)							25%			28,57%

	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Jasa Konsultasi Lainnya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C)							25%			0,00%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Sewa IT/Jaringan Web Hosting Grade C)							25%			0,00%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2	Laporan	2	Laporan	25%	2	Laporan	0,00%
	1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket		Paket	25%		Paket	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik							25%			0,00%
	Lampu Jalan							25%			0,00%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket		Paket	25%		Paket	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			4	Paket			25%			0,00%
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop							25%			0,00%
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Bomba							25%			0,00%
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Subi							25%			0,00%
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop							25%			0,00%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor							25%			0,00%

	Nurse Station Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu							25%			0,00%
	Belanja Modal Mebel							25%			0,00%
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy 15mm difhinising HPL. Ukuran meja (Panjang 120cm, Lebar 60cm, Tinggi 75cm)							25%			0,00%
	Kursi Tunggu Pasien Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan Stainless sandaran dan dudukan Foam							25%			0,00%
	Belanja Modal Alat Pendingin							25%			0,00%
	AC Standing Floor Spesifikasi : 5 PK							25%			0,00%
	AC 1/2 PK (DAK) Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H							25%			0,00%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	Laporan	25%	1	Laporan	28,46%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	6	Laporan	25%	6	Laporan	28,46%
	Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik Spesifikasi : R-3/TR (6.600 VA ke atas)							25%			28,46%
4	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator SPM yang memenuhi target	80	%	25, 09	%	25%	25, 09	%	25,09%
	1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		Unit Kerja	25%		Unit Kerja	25,09%

		<i>dan Penunjang Pelayanan</i>									
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			0,00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			24,19%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			0,00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			33,43%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			8,79%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			0,08%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			0,00%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			4,78%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							25%			11,34%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	%			20,3 %			20,3%
1	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	7	Paket		Paket	25%		Paket	0,00%
	<i>1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>							25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			1	Dokumen			25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			1	Dokumen			25%			0,00%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kesehatan				M2			25%			0,00%

	2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1	Unit		Unit	25%		Unit	0,00%
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural							25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya							25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi							25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan							25%			0,00%
	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan							25%			0,00%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor							25%			0,00%
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				Dokumen			25%			0,00%
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	100	Unit		Unit	25%		Unit	0,00%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi							25%			0,00%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah							25%			0,00%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung							25%			0,00%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung							25%			0,00%

Sedangkan rencana kegiatan yang sesuai dengan kewenangan RSUD Undata serta selaras dengan RPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Tahun 2026 mencakup kegiatan antara lain :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Peningkatan Pelayanan BLUD
- 5) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Berdasarkan data capaian kinerja awal tahun, secara umum rendahnya capaian indikator kinerja pada triwulan I kinerja RSUD Undata pada sebagian besar indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses penyesuaian perencanaan kegiatan dan administrasi pelaksanaan anggaran sehingga beberapa program belum dapat berjalan optimal. Beberapa kegiatan belum mencapai target karena proses pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pada awal tahun anggaran. Capaian indikator pada Triwulan I masih relatif rendah karena target kinerja bersifat kumulatif dan diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring optimalisasi pelaksanaan kegiatan, adaptasi perubahan sistem pelaporan, form monitoring dan evaluasi menyebabkan proses input dan validasi data belum optimal.

4) Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

➤ Analisa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada perangkat daerah rumah sakit dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a) Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan capaian indikator kinerja didukung oleh meningkatnya kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan pelayanan kesehatan, penguatan manajemen rumah sakit dan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pelaksanaan pelatihan, workshop dan pembinaan teknis kepada tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program.

b) Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai turut mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya capaian indikator pelayanan rumah sakit melalui pengadaan alat kesehatan, perbaikan ruang pelayanan, serta peningkatan fasilitas penunjang mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan.

c) Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Dukungan anggaran dan kebijakan daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan regulasi memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.

d) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi data pelayanan melalui penerapan sistem digital seperti Rekam Medis Elektronik (RME), SIMRS dan layanan online dalam mewujudkan efisiensi pelayanan.

- e) Meningkatnya Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan rumah sakit berdampak pada peningkatan kunjungan pasien dan pemanfaatan layanan.

➤ Analisa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja

Penurunan atau belum tercapainya target kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

a) Keterbatasan SDM

Belum optimalnya capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan sehingga pelaksanaan program belum berjalan maksimal karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan tertentu, tingginya beban kerja atau mutasi pegawai mempengaruhi pelayanan.

b) Keterbatasan Anggaran

Penurunan capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan pendukung pelayanan rumah sakit dan efisiensi atau keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program tidak dapat terlaksana dengan optimal.

c) Kerusakan atau Keterbatasan Sarana Prasarana

Alat kesehatan yang rusak atau fasilitas yang belum memadai menghambat pelayanan.

d) Kendali Sistem dan Teknologi

Implementasi sistem digital belum berjalan optimal akibat kendala jaringan dan kemampuan adaptasi pengguna yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, selain itu gangguan jaringan, belum optimalnya penerapan aplikasi atau adaptasi pegawai terhadap sistem baru dapat mempengaruhi kinerja.

e) Tingginya Beban Pelayanan

Peningkatan jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan dapat menyebabkan keterlambatan layanan dan penurunan mutu pelayanan

f) Faktor Eksternal

Kebijakan nasional, perubahan regulasi BPJS, kondisi wabah atau kondisi sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian indikator.

➤ Analisa Efisiensi dan Upaya Perbaikan

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan
- b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan RME
- c) Penguatan monitoring dan evaluasi program
- d) Peningkatan koordinasi lintas bidang/ unit
- e) Pengusulan tambahan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan
- f) Peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

2.3 Capaian Anggaran

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran Triwulan I

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

NO	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Sasaran Kinerja/ Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi Keuangan
					Kinerja TW I	Anggaran	
	TOTAL ANGGARAN				20,28	Rp. 218.235.778.901	Rp 44.260.669.863
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%				Rp. 98.339.555.608	Rp 26.973.584.011
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	93,5%	27,43	Rp 2.071.000.000	Rp 576.000.000
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp 2.071.000.000	Rp 576.000.000
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat					Rp 1.719.900.000	Rp 491.400.000
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Diploma (DIII)					Rp 94.500.000	Rp 27.000.000
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)					Rp 201.600.000	Rp 57.600.000
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Jasa Konsultasi Lainnya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C)					Rp 50.000.000	Rp -

5.1.02.02.001.000 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Sewa IT/Jaringan Web Hosting Grade C)					Rp 5.000.000	Rp -
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 589.792.960	Rp -
5.1.02.01.001.000 31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp 47.439.000	Rp -
1.02.01.1.06.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					Rp 47.439.000	Rp -
	Lampu Jalan					Rp 47.439.000	Rp -
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp 542.353.960	Rp -
5.1.02.01.001.000 32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas					Rp 51.545.000	Rp -
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop					Rp 24.284.000	Rp -
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Bomba					Rp 9.221.400	Rp -
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Subi					Rp 18.039.600	Rp -
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop					Rp -	Rp -
5.1.02.03.003.000 01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp 101.383.868	Rp -

	Nurse Station Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu					Rp 101.383.868	Rp -
5.2.02.05.002.000 01	Belanja Modal Mebel					Rp 247.465.092	Rp -
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy 15mm difhinising HPL. Ukuran meja (Panjang 120cm, Lebar 60cm, Tinggi 75cm)					Rp 54.750.000	Rp -
	Kursi Tunggu Pasien Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan Stainless sandaran dan dudukan Foam					Rp 192.715.092	Rp -
5.2.02.05.002.000 01	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp 141.960.000	Rp -
	AC Standing Floor Spesifikasi : 5 PK					Rp 56.960.000	Rp -
	AC 1/2 PK (DAK) Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H					Rp 85.000.000	Rp -
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 3.456.941.401	Rp 983.781.237
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 3.456.941.401	Rp 983.781.237
5.1.02.02.001.000 61	Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik Spesifikasi : R-3/TR (6.600 VA ke atas)					Rp 3.456.941.401	Rp 983.781.237
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 92.221.821.247	Rp 25.413.802.774

1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Rp 92.221.821.247	Rp 25.413.802.774
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Rp 117.148.758.493	Rp 17.226.585.852
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 75.190.399.096	Rp 17.226.585.852
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Rp 75.190.399.096	Rp 17.226.585.852
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Rp 41.958.359.397	Rp -
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien) (Indeks)	82%	14,70	Rp 41.958.359.397	Rp -
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Rp 13.012.807.000	Rp -
5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp 350.000.000	Rp -
5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp 260.000.000	Rp -
5.2.03.01.001.000 06	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp 12.402.807.000	Rp -
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Rp 20.562.747.457	Rp -

	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp -	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp 8.262.747.457	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp 500.000.000	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp 800.000.000	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan					Rp 7.000.000.000	Rp -
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp -	Rp -
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp 4.000.000.000	Rp -
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					Rp 8.382.804.940	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					Rp 1.705.126.500	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					Rp 4.480.158.900	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung					Rp 1.810.415.600	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung					Rp 387.103.940	Rp -
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	72%	2,20	Rp 2.747.464.800	Rp 60.500.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 2.747.464.800	Rp 60.500.000,00

1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		yang tersertifikasi			Rp 2.747.464.800	Rp 60.500.000,00
-------------------	--	--	------------------------	--	--	------------------	------------------

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Undata telah mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di triwulan I tahun 2026. Seluruh capaian indikator RSUD Undata Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan. Keberhasilan yang dicapai tahun 2026 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya. Dengan tetap melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar dan indikator serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan di tahun mendatang.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan I tahun 2026 ini memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja utama (IKU), yang telah ditetapkan, disertai dengan target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran pada periode triwulan berjalan. Laporan ini menjadi instrument penting dalam menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan strategis rumah sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rencana aksi di lingkungan RSUD Undata secara umum telah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada indikator akreditasi rumah sakit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan capaian dalam kategori baik. Hal ini didukung oleh komitmen manajemen, dukungan sistem, serta keterlibatan seluruh unit kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja, terutama pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah sakit yang masih berada dalam kategori kurang. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya implementasi indikator mutu di seluruh unit pelayanan, keterbatasan pemahaman SDM terhadap indikator mutu, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada awal tahun.

3.2 Tindak Lanjut

Sehubungan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada seluruh unit kerja, termasuk Direksi, Bidang, dan Bagian di RSUD Undata untuk:

- 1) Mengoptimalkan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit melalui percepatan penyelesaian dokumen, penguatan sosialisasi dan pendampingan standar

akreditasi, serta peningkatan pemanfaatan rekam medis elektronik (e-RM) di seluruh unit pelayanan;

- 2) Mempercepat implementasi Indikator Nasional Mutu (INM) melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM, penguatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu secara berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pencapaian pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi melalui pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit.
- 4) Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara lebih terencana dan tepat waktu guna mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala guna memastikan seluruh unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis rumah sakit.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan I tahun 2026 ini kami sampaikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. mampu mendorong peningkatan komitmen seluruh jajaran RSUD Undata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendukung terwujudnya rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan selanjutnya,

Plt. DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT, RSUD UNDATA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Nurfaela Harate, MPH
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurfaela Harate, MPH
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paku,
Pihak Kedua

dr. Nurfaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,
Pihak Pertama

dr. Nurfaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA			
Jl. RE. Marudata Kel Tondo Kec. Maebikawu Pulu-94116 Telp. (0431) 4231445-4121446 Fax (0431) 4012995 website: www.rsudundata.sulawesiprov.go.id Email: dr_undata@yahoo.com			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi rumah sakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	Kelengkapan dokumen pemenuhan standar elemen penilaian akreditasi di bagian umum: perlengkapan, keuangan dan kepegawaian	100%
		Cakupan pemenuhan SPM di Rumah Sakit	≥95%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan manajemen resiko di bagian umum/perengkapan, keuangan dan kepegawaian	100%
		Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan	100%
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran	≥90%
		Cost Recovery Rate	100%
		Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	100%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,863,439,000.00	APBD
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,063,439,000.00	
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3,456,941,400.94	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 3,456,941,400.94	
III	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 92,221,821,247.28	BLUD
-	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp 2,784,726,220.00	
-	Pelayanan Nonmedik	Rp 9,001,870,000.00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah Dan/Atas BLUD	Rp 4,580,866,850.00	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 40,000,000.00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,565,000,000.00	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,512,424,120.00	

-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	69,686,934,057.20	
-	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	50,000,000.00	
TOTAL		Rp	97,742,201,648.14	

Plt. Direktur UPT RSUD Undata


dr. Nurfaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Umum dan Keuangan


dr. Nurfaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdaeni, SE.,M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurfaola Harato, MPH
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

dr. Nurfaola Harato, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Pihak Pertama

Nurdaeni, SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19700911 200012 2 003

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan	Tingkat pencapaian anggaran rumah sakit	100%
2		Ketepatan waktu penyajian laporan realisasi belanja dan realisasi pendapatan setiap bulan	100%
3		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan	≥100%
4		Ketepatan Waktu Pembayaran Hak Pegawai Setiap Bulan	100%
5		Persentase Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah	100%
6		Persentase pemenuhan piutang tidak terutang	5%
7		Persentase klaim Penjamin yang dibayarkan tepat waktu tanpa sengketa	≥ 90%
8		Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di bagian keuangan	100%

9	Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang disusun di bagian keuangan	100%
10	Dibayarnya Terhadap Percepatan SPM Rumah Sakit Bidang Keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REK
1	Peningkatan Perekonomian BLEUD	Rp. 69.736.934.057	REK-UB
1.1	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 69.686.934.057	
-	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 69.680.934.057	
-	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 6.000.000	
1.2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 50.000.000	
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN BOKSISAR REALISASI BLEUD	Rp. 50.000.000	
	TOTAL	Rp. 69.736.934.057	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

dr. Nurfaola Harato, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Kepala Bagian Keuangan

Nurdaeni, SE.,M.Si
NIP. 19700911 200012 2 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saftianingsi, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurtala Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Solaku itasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paiki,

dr. Nurtala Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Saftianingsi, SE, MM
Pembina
NIP. 19720116 200701 2 014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana rumah sakit sesuai standar akreditasi serta mutu layanan umum sebagaimana Rencana Kerja	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana rumah tangga Yang Memenuhi Standar	100%
		Kelengkapan dokumen pemenuhan standar dalam penilaian akreditasi di bagian umum perlengkapan	100%
		Persentase area pelayanan yang memenuhi standar	≥90%
		Persentase pemenuhan standar KURS (APAR, jalan evakuasi, signage, APD)	100%
		Kelengkapan dokumen pelaporan manajemen resiko di bagian umum perlengkapan	100%
		Persentase Keterperluan Pemantauan Logistik Non Medis	≥95%
		Persentase penulisan dan verifikasi data administrasi	100%
		Persentase update data ASPAK (aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan)	100%

		Persentase pengolahan limbah sesuai SOP PPI dan lingkungan	100%
		Persentase area terpasang CCTV aktif	≥90%
		Persentase pelayanan tata usaha, hukum dan rumah sakit	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	100.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Rp	150.000.000,00
TOTAL	Rp	214.363.479,94

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

dr. Nurtala Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Saftianingsi, SE, MM
NIP. 19720116 200701 2 014

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 5.594.350.400,94	APBD
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 47.419.000,00	
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga	Rp 47.419.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.456.941.400,94	
1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 5.436.941.400,94	
1.2.2	Pemeliharaan Peralatan BLUD	Rp 17.932.463.979,00	BLUD
1.2.3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.784.726.220,00	
1.2.3.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 2.784.726.220,00	
1.2.3.1.1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atas Penguasaan Lainya	Rp 9.001.870.000,00	
1.2.3.1.2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 8.996.870.000,00	
1.2.3.1.3	Pengadaan Dan Pengawasan Serta Tidak Lagi Pengawasan Perumahan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp 5.000.000,00	
1.2.3.2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 4.590.866.950,00	
1.2.3.2.1	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Rp 575.800.000,00	
1.2.3.2.2	Pengelolaan Ruang Koordinasi Dan Komunikasi Siged Dan Atas Bawah	Rp 1.615.884.000,00	
1.2.3.2.3	Pengadaan Bahan / Material	Rp 437.550.000,00	
1.2.3.2.4	Pengadaan Pelayanan Rumah Tangga	Rp 72.688.000,00	
1.2.3.2.5	Pengadaan Perlengkapan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.776.632.450,00	
1.2.3.2.6	Pengadaan Jasa Komunikasi	Rp 100.690.000,00	
1.2.3.3	PEMERINTAHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1.565.000.000,00	
1.2.3.3.1	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Penguasaan Lainya	Rp 740.000.000,00	
1.2.3.3.2	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atas Penguasaan Lainya	Rp 575.000.000,00	



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,
Pihak Pertama

Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
Pembina
NIP. 19860923 200412 2 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Terpenuhinya rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	75%
		2. Persentase inputting data SISKANIS (Sistem Informasi Sistem Daya Kesehatan)	100%
		3. Persentase Pemenuhan SDA Kepegawaian rumah sakit sesuai peraturan kepegawaian	20%
		4. Persentase Kehadiran Pegawai > 95% / bulan	20%
		5. Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di bagian kepegawaian	100%
		6. Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang disusun dibagian kepegawaian	100%
		7. Waktu Pemrosesan Administrasi Kepegawaian	≤ 3 Hari Kerja

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 2,016,000,000.00	APBD
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2,016,000,000.00	
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2,016,000,000.00	
II	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 4,552,424,120.00	BLUD
II.1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 40,000,000.00	
-	Pengadaan Paksa Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 40,000,000.00	
II.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 4,512,424,120.00	
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Non Asn	Rp. 3,927,800,000.00	
-	Penyediaan Jasa Asuransi	Rp. 584,624,120.00	
	TOTAL	Rp. 6,568,424,120.00	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Kepala Bagian Kepegawaian

Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
NIP. 19860923 200412 2 001



PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH

Jabatan : Plt. Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,

Pihak Pertama

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. RE. Martadinata Kel Tondo Kec. Mantikore Palu 94116 Telp. (0451) 4131445-4121446
Fax (0451) 4012995 website : www.rsudundata.sultengprov.go.id Email: dr_undata@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terwujudnya peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Medik di RS	100%
		2. Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Non-Medik di RS	100%
		3. Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan di Rumah Sakit	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 31,055,713,358	APBD
I.a	Kep. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM DAN UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 31,055,713,358	
	Pengembangan dan pemeliharaan / atau Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Rp 4,480,158,900	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,562,747,458	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,012,807,000	
II	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 75,190,399,096	BLUD
II.a	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2,545,547,671	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2,045,547,671	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 500,000,000	
	II.b Kegiatan Pelayanan Non Medik	Rp 70,425,730,175	
	Pelayanan Non Medik lainnya	Rp 375,000,000	
	Pelayanan Farmasi	Rp 19,500,000,000	
	Pelayanan Laundry/Binatu	Rp 250,000,000	
	Pengadaan bahan Habis pakai	Rp 35,819,007,575	
	Pengolahan Makanan/Gizi	Rp 6,491,880,000	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 7,989,842,600	

II.c	Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Rp 1,754,121,250	
	Asuhan Keperawatan Generalis	Rp 1,754,121,250	
II.d	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	Rp 465,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 165,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 300,000,000	
TOTAL		Rp 106,246,112,453.80	

Plt Direktur UPT RSUD Undata

dr. Nurlaela Harate
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN MEDIK UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Subhan Habibi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada,

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005

Pihak Pertama

dr. Subhan Habibi
Pembina Tingkat I
NIP. 19780823 201101 1 004

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 18,042,906,358	APBD
I.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rajakan, UKM dan UKM Rajakan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 18,042,906,358	
-	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 4.480.158.900	
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13.562.747.458	
II	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 2,210,547,671	BLUD
II.1	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 2,045,547,671	
-	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.045.547.670.50	
II.2	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 165,000,000	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000.00	
TOTAL		20,253,454,028.50	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Pelayanan Medik

dr. Subhan Habibi
NIP. 19780823 201101 1 004

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Waktu tunggu rawat jalan ≥90 Menit	≥80% Pasien
		BOR (Bed Occupancy Rate)	60-85%
		Persentase Pasien IGD yang di tangani <5 Menit	≥90%
		Persentase kematian Neonatal di Rumah Sakit	≤5%
		Waktu Pelayanan awal IGD (triage) sesuai Standar	≥95%
		Jumlah audit rekam medis dengan kelengkapan 100%	≥95% lengkap
		Persentase ketepatan waktu operasi	≥90% tepat waktu
1	Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Medik	Kepuasan terhadap clinical pathway (CP)	≥80%
		Persentase DPT mengikuti pelatihan klinis dan kredensial	≥90%
		Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di area pelayanan	100%
		Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang disusun di area pelayanan	1 Dokumen
		Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan dokter	≥80% puas



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENUNJANG MEDIK UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dehy Wotulo, SKM, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Borkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19650621 201001 1 005

Palu,

Pihak Pertama

Dehy Wotulo, SKM, MM
Pembina
NIP. 19781224 199703 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Mutu Penunjang Medik	Ketepatan Waktu Radiologi berbasis digitalisasi	≥90%
		Ketepatan Waktu Layanan Laboratorium berbasis digitalisasi	≥95%
		Ketepatan Waktu Penyediaan Darah (Diluar Kejadian TLR)	≥95%
		Waktu Tunggu Hasil Radiologi < 3 Jam	≥90%
		Waktu Tunggu Hasil Laboratorium <2 Jam	≥90%
		Ketersediaan Darah Sesuai Permintaan	≥90%
		Jumlah Kesalahan hasil lab-radiologi/turnas	0 insiden
		Persentase Tenaga penunjang medik mengikuti pelatihan kompetensi	≥90%
		Ketepatan laporan stok obat dan logistik farmasi yang berbasis digitalisasi	≥95%

	Kepatuhan diet pasien sesuai instruksi gizi	≥95%
	Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di area penunjang medik	≥95%
	Jumlah Dokumen Manajemen risiko yang dianalisis di area penunjang medik	1 dokumen
	Kepuasan Pengguna Layanan Penunjang Medik	≥85%
	Persentase alat bertingkat baik dan siap pakai	≥95%

2	Menjamin Aksesibilitas dan Kesiapan Layanan	Waktu Respon Layanan Penunjang Gawat Darurat	≤10 Menit
		Ketersediaan Reagen Dan Bahan Habis Pakai	≥95%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 13,012,807,000	APBD
I.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM DAN UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 13,012,807,000	
-	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,012,807,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp 71,228,730,175	BLUD
II.1	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 70,425,730,175	
-	Pelayanan Non Medik lainnya	Rp 375,000,000	
-	Pelayanan Farmasi	Rp 19,500,000,000	
-	Pengelolaan Makanan-Gizi	Rp 6,391,880,000	
-	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 7,989,842,600	
-	Pelayanan Lowtek/Bimati	Rp 250,000,000	
-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 35,819,007,575	
II.2	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 500,000,000	
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 500,000,000	
II.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 300,000,000	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 300,000,000	
TOTAL		Rp 84,238,537,175	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinamu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Penunjang Medik

Deky Wotulo, SKM, MM
NIP. 19761224 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEPERAWATAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lince, SKM,MAP

Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005

Pihak Pertama

Lince, SKM,MAP
Pembina
NIP. 19690603 198902 2 002

		Persentase pemenuhan ratio perawat sesuai standar	≥90%
--	--	---	------

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp 1,754,121,250	BLUD
II	PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	Rp 1,754,121,250	
-	ASUHAN KEPERAWATAN GENERALIS	Rp 1,754,121,250	
	TOTAL	Rp 1,754,121,250	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Keperawatan

Lince, SKM,MAP
NIP. 19690603 198902 2 002

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keperawatan yang terakreditasi dan layak pakai sesuai standar pelayanan keperawatan	≥90%
		Evaluasi mutu pelayanan keperawatan	≥95%
		Evaluasi / Survey kepuasan pasien pada aspek pelayanan perawat	≥85%
		Jumlah Insiden keselamatan pasien terkait tindakan keperawatan	0 Insiden
		Pelaksanaan Aspek Keperawatan Klinis	≥2 kali/Tahun
		Kelengkapan dokumentasi ADPIE dan asuhan keperawatan	≥95%

1	Peningkatan mutu pelayanan keperawatan Rawat Inap	Persentase pemenuhan standar pelayanan wajib (SKP, PPI, PMKP, Kode Etik, K3, BHD)	≥90%
		Kepatuhan Penggunaan APD	≥95%
		Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
		Persentase Kepatuhan Tindakan Jaga (Dinas)	100%
		Persentase pemenuhan standar klasifikasi pelayanan (Akreditasi) di area keperawatan	100%
		Jumlah Tindakan Manajemen risiko yang diberikan di area keperawatan	100%

PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrawati, SKM, MM
Jabatan : Wakil Direktur Program, Pendidikan dan Penelitian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH
Jabatan : Ptl. Direktur Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Seleku atas langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Pada,
Pihak Pertama

Indrawati, SKM, MM
Pemimpin
NIP. 19810404 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. RE Martadinata Kai Tendo Kec. Mantikore-Pole-Pole (0451) 433445-4121448
Fax (0451) 4212995 website : www.mufundata.sultengprov.go.id Email: dir_undata @ yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, Latihan dan penelitian	1. Persentase Nakes/Named yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan rumah sakit 2. Jumlah pelatihan intelektual/eksternal yang diselenggarakan 3. Jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan 4. Persentase tenaga pembimbing yang telah tersertifikasi	≥ 85% ≥ 25 Kegiatan ≥ 3 MoU ≥ 80%
2	Meningkatkan kelengkapan dokumen perencanaan dan evaluasi	1. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 2. Kelengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit 3. Kelengkapan dokumen pelaporan manajemen resiko Rumah sakit	100% 100% 100%
3	Meningkatkan pelayanan rekam medik, IT, Informasi dan pemasaran	1. Terselenggaranya pelayanan rekam medik, IT, Informasi dan pemasaran	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 2,747,464,800.00	BLUD
1a	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,125,000,000.00	BLUD
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1,125,000,000.00	
1b	Program Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah	Rp 992,920,000.00	
-	Pelayanan Nonmedik	Rp 992,920,000.00	
1c	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 629,544,800.00	
-	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 629,544,800.00	
	TOTAL	Rp 2,747,464,800.00	

Ptl. Direktur UPT RSUD Undata

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Program dan Diklit

Indrawati, SKM, MM
NIP. 19810404 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrawati, SKM, MM

Jabatan : Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

Indrawati, SKM, MM

Pembina

NIP. 19810404 200904 2 002

Pihak Pertama

Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Pembina

NIP. 19740318 199303 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja RS	100%
		Tingkat efisiensi penyusunan anggaran rumah sakit	3%
2	Terwujudnya dokumen perencanaan Rumah Sakit	Kelengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit	100%
		Kelengkapan Dokumen laporan manajemen resiko RS	100%
3	Monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit	Laporan evaluasi program	35 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp. 629.544.800	BLUD
11	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 629.544.800	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 66.600.000	

-	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	Rp	308.133.100
-	Evaluasi Kinerja BLUD	Rp	254.811.700
TOTAL		Rp	629.544.800

Wakil Direktur Program dan Diklit

Indrawati, SKM, MM

NIP. 19810404 200904 2 002

Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

NIP. 19740318 199303 1 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PENELITIAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Suriyanto, S.Kep.NS, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrawati, SKM, MM
Jabatan : Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Indrawati, SKM, MM
Pembina
NIP. 19810404 200904 2 002

Palu,

Dr. Suriyanto, S.Kep.NS, MPH
Pembina
NIP. 19760205 200312 1 011

Indikator di Bidang Pendidikan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Mutu Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Edukatif yang terakreditasi yang mencakup akreditasi	≥ 25 Kegiatan
		Jumlah Penelitian yang dilaksanakan pertama	3 Penelitian
		Jumlah Publikasi ilmiah Rumah Sakit	2 Publikasi
		Penyelesaian Kerja Sama yang di review dan aktif	100%
		Jumlah pendamping Klinik terakreditasi (Clinical Instruction)	≥ 70%
		Persentase pemantauan standar klinis penilaian akreditasi di rumah sakit	90%

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun di rumah sakit	1 dokumen
Jumlah Kegiatan Promosi kesehatan (pencegahan penyakit dan kecelakaan)	≥ 80
Persentase penyelesaian indikator UPTD rumah	100%
Minimalkan Waktu Pelaksanaan dan penyelesaian masalah	4 hari selama setahun
Tingkat kepuasan peserta didik (siswa) yang telah selesai	≥ 85%

NO	REKAPITULASI	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PERANGKAT DAN PELAYANAN KEPERAWATAN	Rp. 3.055.000.000	REKAPITULASI
A.1	ANGKUTAN DAN KEPERAWATAN	Rp. 3.055.000.000	
	Perawatan dan Keperawatan	Rp. 3.055.000.000	
A.2	PELAYANAN NON MEDIS	Rp. 100.000.000	
	Pelayanan dan Keperawatan	Rp. 100.000.000	
	TOTAL	Rp. 3.055.000.000	

Wakil Direktur Program dan Diklat

Indrawati, SKM, MM
NIP. 19810404 200904 2 002

Kepala Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian

Dr. Suriyanto, S.Kep.NS, MPH
NIP. 19760205 200312 1 011

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrawati, SKM, MM

Jabatan : Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian,

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paku,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Indrawati, SKM, MM
Pembina

NIP. 19810404 200904 2 002

Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H
Pembina

NIP. 19740318 199303 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Keleengkapan laporan akuntabilitas kinerja RS	100%
		Tingkat efisiensi penyerapan anggaran rumah sakit	3%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan Rumah Sakit	Keleengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit	100%
		Keleengkapan Dokumen laporan manajemen resiko RS	100%
3	Monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit	Laporan evaluasi program	35 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp. 629,544,800	BLUD
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 629,544,800	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 66.600,000	



LAKIP TW II

RSUD UNDUTA PALU 2026



E-mail : uptrsudundata@gmail.com
Website : rsudundata.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar oleh Tim Penyusun. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen yang memuat hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran kegiatan UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2026 sebagai evaluasi terhadap pencapaiannya serta masalah dan kendala-kendala yang dihadapi dan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tahun mendatang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026, telah melibatkan seluruh komponen unit kerja yang terkait. Masih banyak kekurangan dalam susunan dokumen Laporan Kinerja ini, namun saran dan masukan dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga dapat tersaji dengan lebih baik dan lebih sempurna. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen “Laporan Kinerja UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026” ini. Semoga dokumen ini bermanfaat.

DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Jumriani, M.H.
NIP. 19730914 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah 1

1.2 Isu Strategis/ Permasalahan Utama 14

BAB II PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA 16

2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja 16

2.2 Capaian Kinerja 22

2.3 Capaian Anggaran 34

BAB III PENUTUP 40

3.1 Kesimpulan 40

3.2 Tindak Lanjut 40

LAMPIRAN 42

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata2

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD Undata8

Tabel 1.3 Bak Air Bersih10

Tabel 1.4 Pejabat Struktural di UPT. RSUD Undata12

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 2025-202916

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra BLUD Tahun 202617

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan I.....20

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan I.....22

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I.....24

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan I.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT. RSUD Undata13

Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh Direktur UPT. RSUD Undata19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Undata merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit maka RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik. Rumah Sakit Kelas B harus mempunyai 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 22 (dua puluh dua) Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 5 (lima) Pelayanan Medik Sub Spesialis. RSUD Undata juga merupakan rumah sakit pendidikan yang memberikan pendidikan di bidang kedokteran, farmasi dan keperawatan. Berikut gambaran umum RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama Rumah Sakit | : RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah |
| 2. Alamat | : Jl. R. E. Martadinata Kel. Tondo |
| Telepon | : (0451) 4131445-4131446 |
| Whatsapp | : 082290762667 |
| Website | : rsundundata.sultengprov.go.id |
| Email | : rsundundata@sultengprov.go.id |
| Instagram | : rsundundataprovsulteng |
| 3. Nama Plt. Direktur | : dr. Nurlaela Harate, MPH |
| 4. Kelas Rumah Sakit | : B |
| 5. Nomor Registrasi RS | : 7271014 |
| 6. No. & Tanggal Izin Operasional RS | : 0220004261304 (10 Februari 2020) |

7. Luas Tanah : 53.125,00 m²
8. Luas Bangunan : 7.890,09 m²
9. Standar Kualitas Pelayanan RS : Akreditasi LAMKPRS 2022
10. Kapasitas Tempat Tidur

No	Tempat Tidur	Jumlah
1)	VVIP	4
2)	VIP	20
3)	Kelas 1	100
4)	Kelas 2	67
5)	Kelas 3	155
6)	Non Kelas	49
7)	Isolasi	2
Jumlah Total		397

Sumber Data : Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Nomor : 188.4/644/RSUD Undata

11. Sumber Daya Manusia

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah sakit saat ini memiliki 1.488 orang tenaga tetap yang terdiri dari 119 orang tenaga medis, 1.043 orang tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan sebanyak 322 orang. Sedangkan jumlah dokter mitra sebanyak 14 orang. Adapun Profil ketenagaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia di UPT. RSUD Undata

a. Pegawai Negeri Sipil

Jabatan	Sebutan Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	2	3	4	5
STUKTURAL	: 13 Orang			

	Terdiri Dari				
	Eselon : II :	1	0	1	
	Eselon : III.A :	3	1	2	
	Eselon : III.B :	9	4	5	
	Jumlah I	13	5	8	
Fungsional Tertentu	: 681 Orang		L	P	
	Terdiri Dari				
	Dokter Gigi :	9	0	9	
	Dokter Umum :	35	9	26	
	Dokter spesialis :	42	18	24	
	Perawat Ahli :	111	22	89	
	Perawat Terampil :	183	35	148	
	Terapis Gigi :	5	4	1	
	Teknisi Gigi :	2	0	2	
	Bidan Ahli :	44	0	44	
	Bidan Terampil :	54	0	54	
	Apoteker :	22	5	17	
	Asisten Apoteker :	28	6	22	
	Nutrisiologis :	20	0	20	
	Administrator kesehatan :	21	5	16	
	Epidemiologi :	9	2	7	
	Promkes :	6	1	5	
	Sanitarian :	22	6	16	
	Ortotik Prostetik :	1	1	0	
	Pranata Lab Kes :	14	6	8	
	Fisioterapis :	14	3	11	
	Okupasi Terapis :	1	0	1	
	Terapis Wicara :	2	0	2	
	Radiografer :	7	5	2	
	Fisikawan Medik :	4	1	3	
	Teknisi Elektro Medis :	4	3	1	
	Perekam Medis :	2	0	2	
	Arsiparis :	0	0	0	
	Pranata Komputer :	2	0	2	
	Psikologi :	4	2	2	
	Analisis SDM Aparatur :	2	0	2	
	Teknisi Transfusi Darah :	5	2	3	
	Perencana :	0	0	0	
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah :	2	1	1	
	Pengelola Pengadaan Barang Jasa :	1	1	0	

	Pranata Anestesi :	3	2	1
	Jumlah II :	681	140	541
Pelaksana			L	P
	Penelaah Teknis Kebijakan	32	7	25
	Penata Kelola Layanan Kesehatan	25	2	23
	Penata Layanan Operasional	2	2	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	15	6	9
	Operator Layanan Operasional	15	5	10
	Pengelola Data Dan Informasi	3	0	3
	Pengadministrasi Perkantoran	17	8	9
	Operator Umum Operasional	2	1	1
	Operator Layanan Kesehatan	6	2	4
	Teknisi Sarana Dan Prasarana	6	4	2
	Jumlah III	123	37	86
PPPK	Dokter Spesialis :	3	3	0
	Dokter Umum :	8	3	5
	Perawat Ahli :	67	18	49
	Perawat Terampil :	98	36	62
	Apoteker :	6	1	5
	Asisten Apoteker :	9	1	8
	Pranata Lab Kes Ahli :	5	1	4
	Pranata Lab Kes Terampil :	5	1	4
	Bidan Ahli :	22	0	22
	Bidan Terampil :	28	0	28
	Asisten Penata Anestesi :	2	1	1
	Teknisi Transfusi Darah Terampil :	4	1	3
	Radiografer Ahli :	1	1	0
	Radiografer Terampil :	3	2	1
	Promkes :	2	0	2
	Rekam Medis Terampil :	1	1	0
	Fisioterapis Ahli :	1	0	1
	Epidemiologi :	12	1	11
	Nutrisi Terampil :	5	2	3
	Nutrisi Ahli :	1	0	1
	Administrator Kesehatan :	37	5	32
	Pengelola Umum Operasional :	1	1	0
	Penata Layanan Operasional :	44	7	37
	Operator Layanan Operasional :	28	17	11
	Pengadministrasi Perkantoran :	22	10	12
PPPK PW	Administrasi Kesehatan Ahli Pertama :	4	1	3

	Pranata Lankes Ahli	:	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	:	4	2	2
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	:	2	2	0
	Pengelola Layanan Operasional	:	12	5	7
	Operator Layanan Operasional	:	82	54	28
	Jumlah IV	:	520	177	343
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)			1337	359	978

b. Pegawai Kontrak

Jabatan	Sebutan Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	2	3	4	5
Tenaga Non ASN Tenaga Medik	: 112		L	P
	Terdiri Dari			
	Perawat NERS :	17	4	13
	S1/DIV Perawat :	3	1	2
	DIII Perawat :	6	2	4
	S1/DIV Bidan :	1	0	1
	D III Bidan :	3	0	3
	Apoteker :	1	0	1
	S1 Farmasi :	4	0	4
	D III Farmasi :	2	0	2
	S1 Kesehatan Masyarakat :	8	2	6
	S1 Psikologi :	2	0	2
	S1 Sains :	1	0	1
	DIV Anestesiologi :	1	0	1
	DIV Radiologi :	4	3	1
	DIV Teg. Lab. Medis :	1	0	1
	DIV Analis Kesehatan :	2	0	2
	DIII Rekam Medik :	2	0	2
	DIII Kesehatan Lingkungan :	1	1	0
	DIII Radiologi :	5	3	2
	DIII Gizi :	1	0	1
	DIII Teknisi Elektro Medik :	1	0	1
	DIII Tekni Kardiovaskuler :	1	0	1
	DIII LAB :	1	0	1

	DIII Teg. Lab. Medik :	2	0	2
	DIII Tek.Bank Darah :	2	0	2
	Jumlah I :	72	16	56
Tenaga Non Medik			L	P
	Terdiri Dari			
	S1 Ekonomi :	1	0	1
	S1 Adm.Publik (S.AP) :	1	1	0
	S1 Akuntansi :	2	0	2
	S1 Perbankan :	1	0	1
	SMA :	34	19	15
	Jumlah II :	39	20	19
	Jumlah Keseluruhan (I + II) :	111	36	75

c. Pegawai Mitra Kerja

	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	2	3	4	5
Mitra Kerja	:	22	L	P
	Terdiri Dari			
	Dokter Sub Spesialis :	1	1	0
	Dokter Spesialis :	11	7	4
	Dokter Umum :	4	3	1
	DIV Radiologi :	1	1	0
	DIV Penata Anestesi :	3	0	3
	S1 Komputer :	2	2	0
	Jumlah :	22	14	8

d. Dokter Part Time

	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	2	3	4	5
PART TIME	:	18	L	P
	Terdiri Dari			
	Dokter Sub Spesialis :	1	1	0
	Dokter Spesialis :	17	6	11
	Jumlah :	18	7	11

12. Jenis Pelayanan

Pelayanan Unggulan yang ada di RSUD Undata sebagai berikut :

- a) Pelayanan Spesialistik dan Sub Spesialistik
 - 1) Cardiac Centre
 - 2) Subspesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiovaskuler-Intervensi Kardiovaskuler Tingkat Lanjut
 - 3) Subspesialis Bedah Onkologi
 - 4) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi
 - 5) Spesialis Bedah Saraf
 - 6) Spesialis Bedah Urologi
 - 7) Spesialis Bedah Mulut
 - 8) Spesialis Patologi Anatomi
 - 9) Spesialis Mikrobiologi Klinik
 - 10) Hemofilia
 - 11) Radioterapi Onkologi
 - 12) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi
 - 13) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Kardiologi dan Perawatan Intensif dan Kegawatan Kardiovaskuler
 - 14) Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik
 - 15) Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan - Bedah Kepala dan Leher
 - 16) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Aritmia
- b) Pelayanan Medik Penunjang Klinik
 - 1) Catheterisasi Jantung (Cath Lab)
 - 2) Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 - 3) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
 - 4) Medical Dental Care

- 5) Hemodialisa
 - 6) CT Scan 128 slice
 - 7) Cytotoxic Cabinet
 - 8) Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi
 - 9) Endoscopy
 - 10) Panoramic
 - 11) Skin Center (Dermatology Laser Aesthetic)
 - 12) Apheresis Donor Plasma Konvalesen
 - 13) Apheresis Umum
 - 14) ABBOT
 - 15) Tes Cepat Molekuler (TCM)
 - 16) Tumor Marker
- c) Pelayanan Penunjang Lainnya
- Pelayanan Prioritas Tol Alima dan Tol Tina Ante Ngana Kodi

13. Sarana, Prasarana dan Peralatan

UPT. RSUD Undata terdiri dari bangunan/gedung dengan luas bangunan $\pm 14.890,33 \text{ m}^2$ di atas Luas Tanah 53.125 m^2 . Sebelah utara berbatasan dengan lokasi Perumahan Teluk Palu Permai, sebelah selatan berbatasan dengan Sekolah Model Terpadu Madani dan sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Perikanan Dan Kelautan. Secara rinci penggunaan gedung seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana UPT. RSUD UNDATA Tahun 2026

Jenis Barang	Luas Tanah/ Bangunan	Jumlah	Satuan
Tanah di Jalan dr. Suharso No.14 Kota Palu Sulawesi Tengah	4.167,00 m ²	1	Bidang
Tanah di Jalan RE. Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah	53.125,00 m ²	1	Bidang

Bangunan/Gedung RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah	14.890,33 m ²	1	Bidang
Tanah Lokasi Lahan Parkir di Jalan RE. Martadinata Tondo, Kel. Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah	14.044,00 m ²	1	Bidang

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas Lift : 7 unit
 Gedung A 2 unit
 Gedung B 2 unit
 Gedung Anggrek 1 unit
 Gedung Peristi 1 unit
 Gedung Flamboyan 1 unit
- b. Fasilitas Air Bersih : Sumur Artesis 10 sumur
 Bak Penampungan 16 bak penampungan
- c. Fasilitas Listrik : Gardu 1
 PLN 415 KVA
 Genset 810 KVA
 Gardu 2
 PLN 630 KVA
 Genset 700 KVA
 Gardu 3
 PLN 630 KVA
 Genset 750 KVA
 Gardu 4
 PLN 630 KVA
 Genset Belum Ada
- d. Gas Medis : Gedung A (Ruang Asoka, Edelweis)
 Gedung B (ICVCU, Cathlab, IBS)
 Gedung Dahlia dan Gedung Kemuning
 Gedung Catelia
 Gedung Ruang Seroja, Ruang Bogenvil, Ruang Melati, Ruang Flamboyan)
 Gedung Kandungan Kebidanan dan Peristi (Matahari, Kamar Bersalin, Kamar Bayi, NICU)
 Gedung Ruang Teratai, Ruang Aster dan Ruang Mawar

- Gedung Ruang Anggrek dan Kenanga (Kemoterapi)
 Gedung Hemodialisa
 Gedung IGD Ponak Kebidanan
 Gedung ICU dan PICU
- e. AC Sentral : Gedung A (Poliklinik, Ruang Edelweis, Ruang Asoka, Aula)
 Gedung B (CSSD, Cardiac Center, IBS)
 Instalasi Gawat Darurat
 Instalasi Radiologi
- f. Telepon : 4131446 Hunting (2 Saluran)
- g. IPAL Cair : 1. Tangki Biofilter kapasitas :
 a) 2 x 40 m³
 b) 1 x 20 m³
 2. Ring blower 4 buah
 3. Tabung Reaktor 3 buah
 4. Mesin AOP (*Advance Oxidation Process*) 9 buah
 5. Pompa celup air limbah 13 buah
 6. Pretreatment Limbah Laundry kapasitas 5 m³
 7. Pretreatment Limbah Dapur kapasitas 5 m³

Sumber Data : Bidang Penunjang Medik

Tabel 1.3 Bak Air Bersih

No	Ruangan	Lokasi	Ukuran			Volume (m3)
			Panjang (p)	Lebar (l)	Tinggi (t)	
1	Instalasi Laundry	Depan Ruangan Londry	3,1	2	1,65	10,23
2	Instalasi Gizi	Di Belakang Instalasi Gizi	3,3	2,2	1,65	11,98
3	Paviliun Catelya	Sebelah Selasar Paviliun Catelya	3,2	2,2	1,5	10,56
4	Paviliun Anggrek/Kenanga	Di Belakang Paviliun Kenanga	3,3	2,3	1,76	13,36
5	ICU	Di Belakang ICU	3,25	2,35	1,8	13,75
6	Instalasi Kebidanan	Di Samping Instalasi Kebidanan	3,2	2,3	1,75	12,88
7	Instalasi Radiologi	Di Belakang Instalasi Radiologi	3,2	2,3	1,67	12,29

8	Laboratorium	Di Depan Laboratorium	3,3	2,3	1,86	14,12
9	Poliklinik	Di Bagian Tengah Poliklinik	2,8	1,87	1,96	10,26
10	Mesjid	Di Samping Mesjid	3,35	2,35	1,8	14,17
11	Paviliun Teratai	Di Belakang Paviliun Teratai	3,3	2,56	1,75	14,78
12	Paviliun Seroja	Di Belakang Paviliun Flamboyan	3,6	2,7	1,77	17,2
13	Paviliun Kemuning	Di Samping Paviliun Kemuning				
		Bak Kiri	3	1,2	2	7,2
		Bak Kanan	4	0,8	2	6,4
14	Bak Induk Beton	Di Bagian Belakang Rumah Sakit	10,2	7,5	1,7	130,05
15	Bak Induk Fiber	Di Bagian Belakang Rumah Sakit	13	5	3	195

Sumber Data : Laporan Instalasi Sanitasi

14. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata. UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah. UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

➤ **Jabatan Struktural**

Tabel 1.4

Pejabat Struktural pada UPT RSUD Undata Palu Tahun 2026

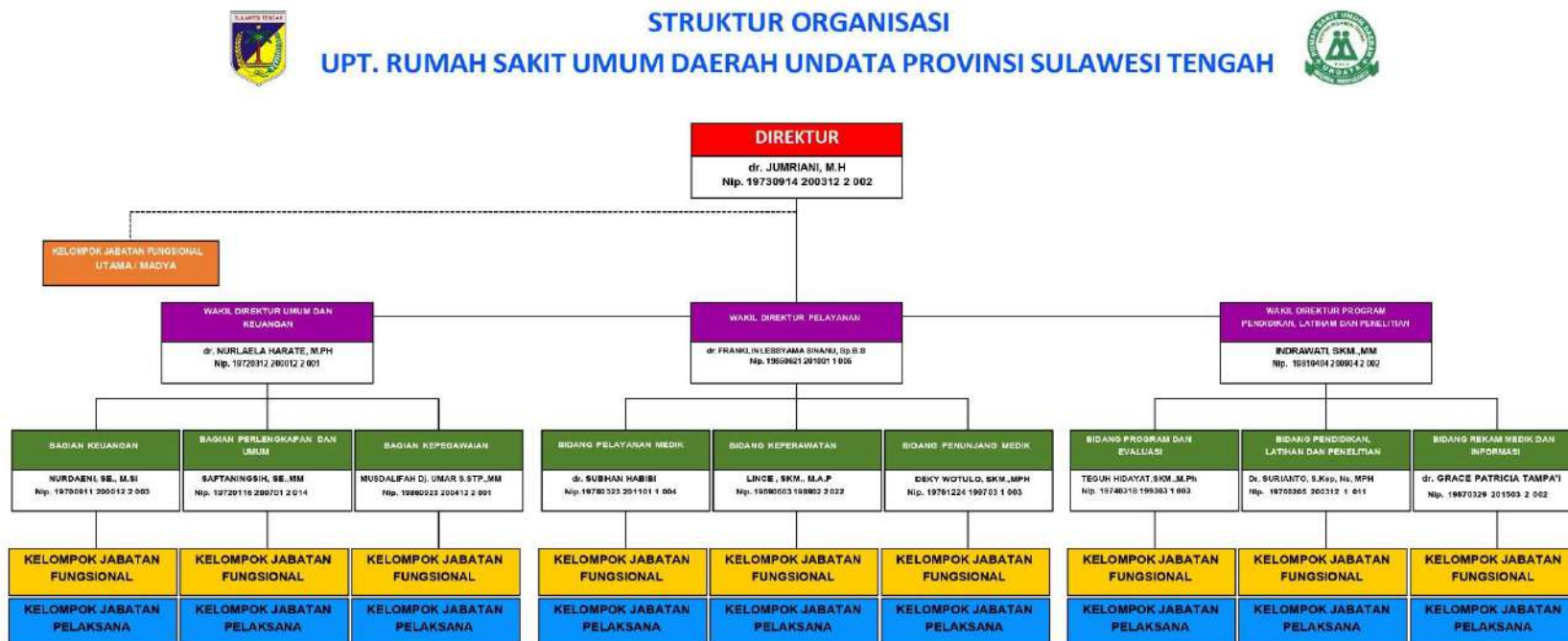
No	N a m a	Jabatan
1	dr. Jumriani, M.H	Direktur
2	dr. Nurlaela Harate, M.PH	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.BS	Wakil Direktur Pelayanan
4	Indrawati, SKM.,MM	Wakil Direktur Program dan Diklit
5	Nurdaeni, SE.,M.Si	Bagian Keuangan
6	Saftianingsih, SE.,MM	Bagian Perlengkapan dan Umum
7	Musdalifah Dj. Umar, S.STP.,MM	Bagian Kepegawaian
8	dr. Subhan Habibi	Bidang Pelayanan Medik
9	Lince, SKM.,M.A.P	Bidang Keperawatan
10	Deky Wotulo, SKM.,MPH	Bidang Penunjang Medik
11	Teguh Hidayat, SKM.,MPH	Bidang Program dan Evaluasi
12	Dr. Surianto, S.Kep.,Ns.,MPH	Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian
13	dr. Grace Patricia Tampa'i	Bidang Rekam Medik dan Informasi

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

➤ STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD UNDATA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT RSUD Undata

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

ANWAR HARID

Sumber Data : Bagian Kepegawaian

1.2 Isu Strategis/ Permasalahan

Untuk meningkatkan kesinambungan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan strategi yang dapat menyeimbangkan antara efisiensi utilisasi tempat tidur dengan peningkatan kualitas layanan klinis. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain :

- 1) Penguatan mutu pelayanan klinis, meningkatkan standar prosedur operasional penanganan kasus kritis melalui penerapan *clinical pathway* dan audit medis berkala serta memperkuat *system early warning score* untuk mendeteksi dini pasien dengan risiko tinggi mortalitas.
- 2) Peningkatan kompetensi tenaga medis dengan melaksanakan pelatihan berkelanjutan terkait tata laksana penyakit dengan risiko mortalitas tinggi (seperti jantung, stroke dan infeksi berat) dan memperkuat kolaborasi antar-spesialis untuk mempercepat pengambilan keputusan medis
- 3) Optimalisasi fasilitas dan peralatan medis melalui penambahan atau pembaharuan peralatan penunjang diagnosis dan terapi intensif (ICU, ventilator, monitoring pasien) serta menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan peralatan emergensi.
- 4) Manajemen risiko dan mutu layanan, mengembangkan *patient safety* program secara konsisten untuk menurunkan angka kejadian yang berkontribusi terhadap mortalitas dan melakukan evaluasi bulanan disertai analisis penyebab utama serta tindak lanjut perbaikan.
- 5) Penguatan rujukan dan sistem informasi, memperbaiki koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan primer agar pasien datang lebih awal, sebelum dalam kondisi kritis dan mengoptimalkan sistem informasi rumah sakit untuk memantau secara *real-time*.
- 6) Penguatan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, mengembangkan program pembelajaran klinis bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa melalui praktik lapangan, workshop serta pembelajaran berbasis kasus untuk menghasilkan tenaga medis yang kompeten dan responsif.

➤ **Ruang Lingkup**

Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ini menjelaskan tentang program kegiatan dan pencapaian kinerja pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, keuangan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan manajerial rumah sakit. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja sebagai perbaikan terhadap kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan II tahun 2026 disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan Gambaran umum organisasi, seperti jumlah SDM, jumlah sarana prasarana pendukung, tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai peraturan yang berlaku, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah
- Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang IKU Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026, capaian kinerja strategis, kinerja program, kinerja kegiatan dan kinerja sub kegiatan Triwulan II
- Bab III. Penutup, menjelaskan Simpulan umum atas capaian atas capaian kinerja organisasi Triwulan II Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja

1) Indikator Kinerja Rumah Sakit berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029

Indikator kinerja RSUD Undata yang mengacu pada Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Undata
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan.

Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Undata dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke :				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/Nilai)	93%	93%	94%	94%	94,5%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/Indeks)	80%	80%	81%	82%	83%

		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	70%	71%	72%	73%	74%
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Indikator
RENSTRA BLUD UPT. RSUD Undata
Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
				2026	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/ Nilai)	93%	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/ Indeks)	80%	20%	20%	20%	20%
		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	71%	17,75%	17,75%	17,75%	17,75%

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Undata menunjukkan adanya penguatan arah kebijakan pengukuran kinerja yang lebih berfokus pada mutu pelayanan dan akuntabilitas organisasi. Jika sebelumnya indikator kinerja lebih berorientasi pada aspek operasional, maka dalam perencanaan saat ini IKU difokuskan pada capaian

strategis seperti predikat Akreditasi Rumah Sakit dengan target Paripurna secara berkelanjutan, peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah sakit yang dipertahankan dan ditingkatkan di atas standar minimal $\geq 80\%$ serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi yang ditargetkan meningkat dari $\geq 71\%$. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada kuantitas layanan, tetapi juga pada kualitas, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja yang terukur dan sistematis. Dengan penguatan IKU tersebut, RSUD Undata diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten, memperkuat tata kelola rumah sakit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai rumah sakit rujukan yang profesional dan berdaya saing.

2) Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja di RSUD Undata dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan meningkatnya tuntutan terhadap mutu layanan, keselamatan pasien, transparansi, dan akuntabilitas publik, rumah sakit dituntut memiliki sistem pengelolaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan IKU yang berfokus pada akreditasi, capaian indikator mutu nasional serta persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi menuntut komitmen yang terintegrasi dari seluruh unit kerja agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi hingga ke bidang dan bagian sebagai bentuk penjabaran target organisasi ke dalam target operasional yang lebih spesifik. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara tujuan strategis rumah sakit dengan pelaksanaan

tugas di setiap unit kerja, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki indikator dan target yang terukur sesuai kontribusinya terhadap pencapaian IKU rumah sakit. Berikut kami tampilkan Perjanjian Kinerja Direktur :

**Gambar 2.1 Sasaran dan Indikator yang diampuh oleh
Direktur UPT. RSUD Undata Tahun 2026**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	94%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien)	83%
3	Meningkatnya pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	73%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175.680.065.544,00	APBD/BLUD
2 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.055.713.358,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026
Pihak Pertama,
Plt. DIREKTUR RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. NURLAELA HARATE, M.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2001

2.2 Capaian Kinerja

1) Capaian Kinerja Strategis Triwulan II

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Strategis Triwulan II

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Triwulan I			Triwulan II		
				2026	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional	Meningkatnya tata kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi Rumah Sakit (Paripurna/Nilai)	93,5%	23,38%	27,23%	29,12%	23,38%	21,62%	52,25%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien/Indeks)	80%	20%	14,70%	18,38%	20%	22,30%	46,25%
		Meningkatnya pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi	71%	17,75%	2,20%	3,10%	17,75%	2,17%	6,15%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2026, sehingga dapat diketahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Pada capaian kinerja berdasarkan Renstra 2025–2029, indikator Akreditasi Rumah Sakit menunjukkan capaian yang optimal. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 93,5% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 21,62%, sehingga tingkat capaian hingga dengan triwulan II mencapai 52,25%.

Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Undata mampu mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan.

Selanjutnya pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Rumah Sakit, target tahunan yang ditetapkan sebesar $\geq 80\%$, sementara realisasi yang dicapai sebesar 22,30% dengan tingkat capaian hingga dengan triwulan II sebesar 46,25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator mutu pelayanan masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan melalui penguatan implementasi indikator mutu, peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Sementara itu pada indikator Persentase pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi, kinerja menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 17,75% sedangkan realisasi yang dicapai hanya mencapai 2,17% dengan tingkat capaian sampai dengan triwulan II sebesar 6,15%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Undata secara massif berkomitmen dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian Triwulan II menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik didukung oleh capaian per indikator di atas dari target yang ditetapkan walaupun secara akumulasi masih rendah, olehnya masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek pengembangan SDM masih membutuhkan perhatian dan percepatan yang lebih serius agar selaras dengan peningkatan mutu layanan dan tuntutan standar akreditasi dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi guna memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2) Capaian Kinerja Program

Tabel 2.4 Capaian kinerja Program Teknis dan Program Penunjang Triwulan II

No	Sasaran Program	Target Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Target		Target		Realisasi Dan Capaian		Target		Realisasi Dan Capaian	
				Tahunan		Triwulan I		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan II	
				Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%	Satuan	%
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	93,5	%	23,38	%	25	%	23,38	%	52,17	%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	%	20,3	%	20,3	%	20,3	%	13,86	%

Penyusunan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dalam Renstra RSUD Undata tahun 2025-2029 merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada hasil pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Penyesuaian nomenklatur dilakukan agar rencana program dan kegiatan rumah sakit dapat lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, program yang akan dilaksanakan RSUD Undata pada tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan II, kedua Program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa hasil yang cukup baik dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 93,5%, sedangkan realisasi triwulan II yang dicapai mencapai 52,17% dengan tingkat capaian sebesar 55,80%. Hal ini pun berlaku untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Target yang ditetapkan tahun 2026 sebesar 81% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 13,86%, sehingga tingkat capaian mencapai 17,11%.

3) Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II

Tabel 2.5 Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II

NO	SASARAN PROGRAM	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN		REALISASI TRIWULAN II		
				K	SATUAN	K	SATUAN	KEU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	93,5	%	52,17	%	Rp 91.745.435.447
1	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya laporan pertanggung jawaban keuangan</i>	<i>Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan</i>	12	<i>Laporan 100%</i>	55,63	%	Rp 1.152.000.000
	<i>1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12	<i>Dokumen</i>	55,63	%	Rp 1.152.000.000
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat			91 x 14	Org/Bln	57,14	%	Rp 982.800.000
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Diploma (DIII)			5 x 14	Org/Bln	57,14	%	Rp 54.000.000

	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)			9 x 14	Org/Bln	57,14	%	Rp 115.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Jasa Konsultasi Lainnya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C)			1	Kegiatan	0,00	%	Rp -
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Sewa IT/Jaringan Web Hosting Grade C)			1	Tahun	0,00	%	Rp -
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2	Laporan 100%	45,05	%	Rp 27.005.400
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	0,00	%	Rp -
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00	%	Rp -
	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya All In One Spesifikasi : all in one, Tiang 7 M, Lampu 60 Watt			3	Unit	0,00	%	Rp -

	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket			Rp	27.005.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					49,69	%	Rp	27.005.400
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop			58	Buah	0,00	%	Rp	-
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Bomba			18	Lembar	98,58	%	Rp	9.090.000
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Subi			12	Lembar	99,31	%	Rp	17.915.400
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop			0	Buah	0,00	%	Rp	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0,00	%	Rp	-
	Nurse Station Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu			60.342152784	M2	0,00	%	Rp	-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					99,68	%	Rp	-

Mesin Absensi Pegawai Spesifikasi: Scan Wajah, dan Telapak Tangan (Tanpa Sentuh) 1.000 Telapak Tangan 1.000 Wajah 10.000 Sidik Jari 2.000 Kartu RFID 200.000 Data Absensi Sampai 22 Digit ID/PIN Karyawan			15	Unit	99,68	%	Rp	-
Belanja Modal Mebel					0,00	%	Rp	-
Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy 15mm difhinising HPL. Ukuran meja (Panjang 120cm, Lebar 60cm, Tinggi 75cm)			15	Unit	0,00	%	Rp	-
Kursi Tunggu Pasien Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan Stainless sandaran dan dudukan Foam			29	Unit	0,00	%	Rp	-
Belanja Modal Alat Pendingin					94,18	%	Rp	-
AC Standing Floor Spesifikasi : 5 PK			2	Unit	86,43	%	Rp	-
AC 1/2 PK (DAK) Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H			20	Unit	99,38	%	Rp	-
Belanja Modal Personal Computer					98,73	%	Rp	-
Komputer Spesifikasi: Personal Computer Intel Core 15,NVIDIA Geforce RTX RAM 16 GB,SSD 512 GB,Monitor 24 Inch			4	Unit	99,07	%	Rp	-
Laptop Spesifikasi: Zenbook UP3404VA-OLED712, Proc.			1	Unit	97,71	%	Rp	-

	C17-1360P/DDR5 16 GB/SSD 1 TB/Display 14 inchi OLED (Touch+flip)							
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					97,50	%	Rp -
	printer Spesifikasi: Printer,Scan,Copy,Color (Cyan,Mugenta,Yellow,Black) Resolusi 57Go X 1440 dpi			5	Unit	97,50	%	Rp -
3	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	<i>Laporan 100%</i>	58,36	%	Rp 2.017.433.620
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	Dokumen	58,36	%	Rp 2.017.433.620
	Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik Spesifikasi : R-3/TR (6.600 VA ke atas)			1864651,781	Kwh	58,36	%	Rp 2.017.433.620
4	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Persentase indikator SPM yang memenuhi target</i>	100	%	52,04	%	Rp 88.548.996.427
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1	Unit Kerja	52,04	%	Rp 88.548.996.427
	BELANJA OPERASI					53,97	%	Rp 87.903.101.248

	Belanja Pegawai BLUD			1	Tahun	93,88	%	Rp 38.531.149.980
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			1	Tahun	40,53	%	Rp 49.371.951.268
	BELANJA MODAL					8,85	%	Rp 645.895.179
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			1	Tahun	13,80	%	Rp 645.895.179
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			1	Tahun	0,00	%	Rp -
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD			1	Tahun	0,00	%	Rp -
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	%	13,86	%	Rp -
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7	Paket100%	13,86	%	Rp -
	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2	Unit	0,00	%	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					0,00	%	Rp -
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Gedung SPECT di RSUD Undata			1	Dokumen	0,00	%	Rp -

	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					0,00	%	Rp -
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Gedung SPECT di RSUD Undata			1	Dokumen	0,00	%	Rp -
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					0,00	%	Rp -
	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit			1189.943130713	M2	0,00	%	Rp -
	<i>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit</i>	2	Unit	0,00	%	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					0,00	%	Rp -
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Gedung SPECT di RSUD Undata			0	Dokumen	0,00	%	Rp -
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					0,00	%	Rp -
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Perencanaan DED Gedung RSUD Undata			1	Dokumen	0,00	%	Rp -

	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					0,00	%	Rp	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Lalu Lintas Gedung RSUD Undata			1 Dokumen	Dokumen	0,00	%	Rp	-
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					0,00	%	Rp	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Review AMDAL RSUD Undata			1	Dokumen	0,00	%	Rp	-
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan					0,00	%	Rp	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Manajemen Konstruksi Bangunan RSUD Undata			1	Dokumen	0,00	%	Rp	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0,00	%	Rp	-
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu			0	M2	0,00	%	Rp	-
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					0,00	%	Rp	-

	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Bangunan Gedung Kesehatan / Rumah Sakit			383.765749387	M2	0,00	%	Rp -
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	100	Unit	69,73	%	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					98,38	%	Rp -
	Dental Panoramik Spesifikasi : Panoramic and cephalometric x-ray system 3D			1	Set	98,38	%	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					57,80	%	Rp -
	Lampu Operasi Spesifikasi : Lampu operasi adalah lampu medis berintensitas tin...			1	Unit	96,12	%	Rp -
	Meja Operasi Spesifikasi : meja operasi untuk semua tindakan, posisi meja dap...			1	Set	96,43	%	Rp -
	Mesin Anestesi Spesifikasi : perangkat medis vital di ruang operasi yang menyal...		1 Unit	1	Unit	0,00	%	Rp -
	Elektrocouter Spesifikasi : prosedur medis yang menggunakan arus listrik freku...		1 Unit	1	Unit	98,78	%	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung					64,13	%	Rp -

	USG Vaskular Spesifikasi : USG doppler 2D portable for cardiology		1 Unit	1	Unit	64,13	%	Rp -
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung					100	%	Rp -
	Cimino Set Spesifikasi : AV Shunt Set		1 Set	1	Set	100	%	Rp -

Sedangkan rencana kegiatan yang sesuai dengan kewenangan RSUD Undata serta selaras dengan RPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Tahun 2026 mencakup kegiatan antara lain :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Peningkatan Pelayanan BLUD
- 5) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Berdasarkan data capaian kinerja awal tahun, secara umum rendahnya capaian indikator kinerja pada triwulan I kinerja RSUD Undata pada sebagian besar indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses penyesuaian perencanaan kegiatan dan administrasi pelaksanaan anggaran sehingga beberapa program belum dapat berjalan optimal. Beberapa kegiatan belum mencapai target karena proses pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.

Capaian indikator pada Triwulan II masih relatif rendah karena target kinerja bersifat kumulatif dan diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring optimalisasi pelaksanaan kegiatan, adaptasi perubahan sistem pelaporan, form monitoring dan evaluasi menyebabkan proses input dan validasi data belum optimal.

4) Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

➤ Analisa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada perangkat daerah rumah sakit dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

a) Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan capaian indikator kinerja didukung oleh meningkatnya kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan pelayanan kesehatan, penguatan manajemen rumah sakit dan peningkatan kedisiplinan pegawai melalui pelaksanaan pelatihan, workshop dan pembinaan teknis kepada tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program.

b) Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai turut mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya capaian indikator pelayanan rumah sakit melalui pengadaan alat kesehatan, perbaikan ruang pelayanan, serta peningkatan fasilitas penunjang mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan.

c) Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Dukungan anggaran dan kebijakan daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan regulasi memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.

d) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi data pelayanan melalui penerapan sistem digital seperti Rekam Medis Elektronik (RME), SIMRS dan layanan online dalam mewujudkan efisiensi pelayanan.

e) Meningkatnya Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan rumah sakit berdampak pada peningkatan kunjungan pasien dan pemanfaatan layanan.

➤ Analisa penyebab kegagalan/ penurunan kinerja

Penurunan atau belum tercapainya target kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

a) Keterbatasan SDM

Belum optimalnya capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan tingginya beban pelayanan sehingga pelaksanaan program belum berjalan maksimal karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan tertentu, tingginya beban kerja atau mutasi pegawai mempengaruhi pelayanan.

b) Keterbatasan Anggaran

Penurunan capaian kinerja dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan pendukung pelayanan rumah sakit dan efisiensi atau keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program tidak dapat terlaksana dengan optimal.

c) Kerusakan atau Keterbatasan Sarana Prasarana

Alat kesehatan yang rusak atau fasilitas yang belum memadai menghambat pelayanan.

d) Kendali Sistem dan Teknologi

Implementasi sistem digital belum berjalan optimal akibat kendala jaringan dan kemampuan adaptasi pengguna yang masih memerlukan pendampingan lebih

lanjut, selain itu gangguan jaringan, belum optimalnya penerapan aplikasi atau adaptasi pegawai terhadap sistem baru dapat mempengaruhi kinerja.

e) Tingginya Beban Pelayanan

Peningkatan jumlah pasien yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan dapat menyebabkan keterlambatan layanan dan penurunan mutu pelayanan

f) Faktor Eksternal

Kebijakan nasional, perubahan regulasi BPJS, kondisi wabah atau kondisi sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian indikator.

➤ Analisa Efisiensi dan Upaya Perbaikan

a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan

b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan RME

c) Penguatan monitoring dan evaluasi program

d) Peningkatan koordinasi lintas bidang/ unit

e) Pengusulan tambahan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan

f) Peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

2.3 Capaian Anggaran

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran Triwulan II

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja/ Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi Keuangan	Kinerja TW I	Realisasi Keuangan	Kinerja TW II	Realisasi Keuangan
					Kinerja	Anggaran					
	TOTAL ANGGARAN				41,92	Rp 218.435.655. 901	Rp 91.574.43 1.227	20,20	Rp 44.116.669. 863	21,74	Rp 47.484.766.7 64
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% 									

5.1.02.02.001.00 090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Spesifikasi : Pendidikan Sarjana (S1)				Rp 201.600.000	Rp 100.800.000		Rp 43.200.000		Rp 57.600.000
5.1.02.02.001.00 039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Jasa Konsultasi Lainnya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Grade C)				Rp 50.000.000					
5.1.02.02.001.00 063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Sewa IT/Jaringan Web Hosting Grade C)				Rp 5.000.000					
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 789.669.960	Rp -				-
5.1.02.01.001.00 031	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Rp 47.439.000					
1.02.01.1.06.000 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp 47.439.000			0		0
	Lampu Jalan				Rp 47.439.000	Rp -				
1.02.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 742.230.960	Rp 27.005.400				Rp 27.005.400
5.1.02.01.001.00 032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp 54.347.000	Rp 27.005.400				Rp 27.005.400
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop				Rp 27.086.000	Rp -				

	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Bomba				Rp 9.221.400	Rp 9.090.000			Rp 9.090.000
	KAIN BATIK Spesifikasi : Kain Subi				Rp 18.039.600	Rp 17.915.400			Rp 17.915.400
	Baju Kemeja Spesifikasi : Bahan Cotto Baby Canvas, oxford, drill, ribstop				Rp -				
5.1.02.03.003.00 001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor				Rp 101.383.868	Rp -			Rp -
	Nurse Station Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Lapisan HPL + Rangka Kayu				Rp 101.383.868		-		
5.2.02.05.001.00 005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Rp 72.375.000				
	Mesin Absensi Pegawai Spesifikasi: Scan Wajah, dan Telapak Tangan (Tanpa Sentuh) 1.000 Telapak Tangan 1.000 Wajah 10.000 Sidik Jari 2.000 Kartu RFID 200.000 Data Absensi Sampai 22 Digit ID/PIN Karyawan				Rp 72.375.000				
5.2.02.05.002.00 004	Belanja Modal Alat Pendingin				Rp 141.960.000				

	AC Standing Floor Spesifikasi : 5 PK					Rp 56.960.000					
	AC 1/2 PK (DAK) Spesifikasi : AC 1/2 PK, 5000 BTU/H					Rp 85.000.000					
5.2.02.05.002.00 001	Belanja Modal Mebel					Rp 247.465.092					
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Bahan : Papan multiplek mercy 15mm difhinising HPL. Ukuran meja (Panjang 120cm, Lebar 60cm, Tinggi 75cm)					Rp 54.750.000					
	Kursi Tunggu Pasien Spesifikasi : Model Gandeng 4 Bahan Stainless sandaran dan dudukan Foam					Rp 192.715.092					
5.2.02.10.001.00 002	Belanja Modal Personal Computer					Rp 106.200.000					
	Komputer Spesifikasi: Personal Computer Intel Core 15,NVIDIA Geforce RTX RAM 16 GB,SSD 512 GB,Monitor 24 Inch					Rp 80.000.000					
	Laptop Spesifikasi: Zenbook UP3404VA-OLED712, Proc. C17- 1360P/DDR5 16 GB/SSD 1 TB/Display 14 inchi OLED (Touch+flip)					Rp 26.200.000					
5.2.02.10.002.00 003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp 18.500.000					

	printer Spesifikasi: Printer, Scan, Copy, Color (Cyan,Magenta,Yellow ,Black) Resolusi 57Go X 1440 dpi					Rp 18.500.000					
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 3.456.941.40 1	Rp 2.017.433. 800		Rp 983.781.23 7		Rp 1.033.652.56 3
1.02.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 3.456.941.40 1	Rp 2.017.433. 800		Rp 983.781.23 7		Rp 1.033.652.56 3
5.1.02.02.001.00 061	Belanja Tagihan Listrik Satuan Biaya Listrik Spesifikasi : R- 3/TR (6.600 VA ke atas)					Rp 3.456.941.40 1	Rp 2.017.433. 800		983.781.23 7		Rp 1.033.652.56 3
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 92.221.821.2 47	Rp 45.082.34 1.248		Rp 25.413.802. 774		Rp 19.668.538.4 74
1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Rp 92.221.821.2 47	Rp 45.082.34 1.248		Rp 25.413.802. 774		Rp 19.668.538.4 74
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Rp 117.148.758. 493	Rp 43.346.40 1.045		Rp 17.226.585. 852		Rp 26.119.815.1 93
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 75.190.399.0 96	Rp 43.346.40 1.045		Rp 17.226.585. 852		Rp 26.119.815.1 93
1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien) (Indeks)	82%	37,00	Rp 75.190.399.0 96	Rp 43.346.40 1.045	14,70	Rp 17.226.585. 852	22,30	Rp 26.119.815.1 93
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Rp 41.958.359.3 97	Rp -				

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp 41.958.359.397	Rp -				
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Rp 13.012.807.000					
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural				Rp 350.000.000					
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur				Rp 260.000.000					
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				Rp 12.402.807.000					
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				Rp 20.562.747.457					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural				-					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya				Rp 8.262.747.457					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi				Rp 500.000.000					
	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan				Rp 800.000.000					

	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan					Rp 7.000.000.00 0					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor					-					
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp 4.000.000.00 0					
1.02.02.1.01.001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					Rp 8.382.804.94 0					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					Rp 1.705.126.50 0					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					Rp 4.480.158.90 0					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung					Rp 1.810.415.60 0					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung					Rp 387.103.940					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatn ya pemenuhan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit	Presentase Pemenuhan Komptenten si SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikas i	72%	4,38	Rp 2.747.464.80 0	Rp 120.255.1 34	2,20	Rp 60.500.000	2,17	Rp 59.755.134
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Rp 2.747.464.80 0	Rp 120.255.1 34		Rp 60.500.000		Rp 59.755.134
1.02.01.1.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Rp 2.747.464.80 0	Rp 120.255.1 34		Rp 60.500.000		Rp 59.755.134

Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUD Undata telah mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di triwulan II tahun 2026. Seluruh capaian indikator RSUD Undata Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan. Keberhasilan yang dicapai tahun 2026 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya. Dengan tetap melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar dan indikator serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan di tahun mendatang.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan II tahun 2026 ini memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja utama (IKU), yang telah ditetapkan, disertai dengan target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran pada periode triwulan berjalan. Laporan ini menjadi instrument penting dalam menilai tingkat pencapaian kinerja serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan strategis rumah sakit.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rencana aksi di lingkungan RSUD Undata secara umum telah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada indikator akreditasi rumah sakit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan capaian dalam kategori baik. Hal ini didukung oleh komitmen manajemen, dukungan sistem, serta keterlibatan seluruh unit kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja, terutama pada indikator Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan rumah sakit yang masih berada dalam kategori kurang. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya implementasi indikator mutu di seluruh unit pelayanan, keterbatasan pemahaman SDM terhadap indikator mutu, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada awal tahun.

3.2 Tindak Lanjut

Sehubungan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan kepada seluruh unit kerja, termasuk Direksi, Bidang, dan Bagian di RSUD Undata untuk:

- 1) Mengoptimalkan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit melalui percepatan penyelesaian dokumen, penguatan sosialisasi dan pendampingan standar

akreditasi, serta peningkatan pemanfaatan rekam medis elektronik (e-RM) di seluruh unit pelayanan;

- 2) Mempercepat implementasi Indikator Nasional Mutu (INM) melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM, penguatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu secara berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pencapaian pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit yang tersertifikasi melalui pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit.
- 4) Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara lebih terencana dan tepat waktu guna mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala guna memastikan seluruh unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis rumah sakit.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit UPT. RSUD Undata, Triwulan I tahun 2026 ini kami sampaikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. mampu mendorong peningkatan komitmen seluruh jajaran RSUD Undata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendukung terwujudnya rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan yang unggul di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan selanjutnya,

DIREKTUR
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Jumriani, M.H
NIP. 19730914 200312 2 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT, RSUD UNDATA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Nurfaela Harate, MPH
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurfaela Harate, MPH
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paku,
Pihak Kedua

dr. Nurfaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,
Pihak Pertama

dr. Nurfaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA			
Jl. RE. Marudatata Kel Tondok Kec. Maebikawu Pulu-94116 Telp. (0431) 4231445-4121446 Fax (0431) 4012995 website: www.rsudundata.sulawesiprov.go.id Email: dr_undata@yahoo.com			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi rumah sakit, Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	Kelengkapan dokumen pemenuhan standar elemen penilaian akreditasi di bagian umum: perlengkapan, keuangan dan kepegawaian	100%
		Cakupan pemenuhan SPM di Rumah Sakit	≥95%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan manajemen resiko di bagian umum/perengkapan, keuangan dan kepegawaian	100%
		Terpenuhinya Sumber daya Manusia Kesehatan	100%
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran	≥90%
		Cost Recovery Rate	100%
		Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	100%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,863,439,000.00	APBD
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,063,439,000.00	
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3,456,941,400.94	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 3,456,941,400.94	
III	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 92,221,821,247.28	BLUD
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,784,726,220.00	
-	Pelayanan Nonmedik	Rp 9,001,870,000.00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah Dan/Atas BLUD	Rp 4,580,866,850.00	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 40,000,000.00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,565,000,000.00	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,512,424,120.00	

-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	69,686,934,057.20	
-	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	50,000,000.00	
TOTAL		Rp	97,742,201,648.14	

Plt. Direktur UPT RSUD Undata



dr. Nurfaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Umum dan Keuangan



dr. Nurfaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEUANGAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdaeni, SE.,M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurfaola Harato, MPH
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

dr. Nurfaola Harato, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Pihak Pertama

Nurdaeni, SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19700911 200012 2 003

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan	Tingkat pencapaian anggaran rumah sakit	100%
2		Ketepatan waktu penyajian laporan realisasi belanja dan realisasi pendapatan setiap bulan	100%
3		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan	≥100%
4		Ketepatan Waktu Pembayaran Hak Pegawai Setiap Bulan	100%
5		Persentase Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah	100%
6		Persentase pemenuhan piutang tidak terutang	5%
7		Persentase klaim Penjamin yang dibayarkan tepat waktu tanpa sengketa	≥ 90%
8		Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di bagian keuangan	100%

9	Jumlah Dokumen Manajemen risiko yang disusun di bagian keuangan	100%
10	Dibayarnya Terhadap Percepatan SPM Rumah Sakit Bidang Keuangan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REVISI
1	Peningkatan Penerimaan BLUD	Rp. 69.736.934.057	REVISI
1.1	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 69.686.934.057	
-	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 69.680.934.057	
-	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp. 6.000.000	
1.2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 50.000.000	
-	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN BOKSIR REALISASI BLUD	Rp. 50.000.000	
	TOTAL	Rp. 69.736.934.057	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

dr. Nurfaola Harato, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Kepala Bagian Keuangan

Nurdaeni, SE.,M.Si
NIP. 19700911 200012 2 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saftianingsi, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nuriela Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Solaku itasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada,

Pihak Kedua

dr. Nuriela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Pihak Pertama

Saftianingsi, SE, MM
Pembina
NIP. 19720116 200701 2 014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana rumah sakit sesuai standar akreditasi serta mutu layanan umum dan kesehatan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana rumah tangga Yang Memenuhi Standar	100%
		Kelengkapan dokumen pemenuhan standar dalam penilaian akreditasi di bagian umum perlengkapan	100%
		Persentase area pelayanan yang memenuhi standar	≥90%
		Persentase pemenuhan standar KURS (APAR, jalan evakuasi, signage, APD)	100%
		Kelengkapan dokumen pelaporan manajemen resiko di bagian umum perlengkapan	100%
		Persentase Keterperintahan Pemerintahan Logistik Non Medis	≥95%
		Persentase pemeliharaan dan verifikasi data inventaris	100%
		Persentase updating data ASPAK (aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan)	100%

	Persentase pengolahan limbah sesuai SOP PPI dan lingkungan	100%
	Persentase area terpasang CCTV aktif	≥90%
	Persentase pelayanan tata usaha, hukum dan rumah sakit	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 5.594.350.400,94	APBD
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 47.419.000,00	
	- Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga	Rp 47.419.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.456.941.400,94	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 5.436.941.400,94	
11	Pemeliharaan Pelayanan BLUD	Rp 17.932.463.979,00	BLUD
11.1	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2.784.726.220,00	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atas Pungutan Lainnya	Rp 2.784.726.220,00	
11.2	PELAYANAN NONMEDIS	Rp 9.001.870.000,00	
	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 8.996.870.000,00	
	- Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp 5.000.000,00	
11.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 4.590.866.850,00	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 575.800.000,00	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Siged Dan Atas Bawah	Rp 1.615.884.000,00	
	- Penyediaan Bahan / Material	Rp 437.550.000,00	
	- Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga	Rp 72.688.000,00	
	- Penyediaan Perlengkapan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.776.632.430,00	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi	Rp 100.690.000,00	
11.4	PEMERINTAHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1.565.000.000,00	
	- Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Dan Pungutan Lainnya	Rp 740.000.000,00	
	- Pemeliharaan Kebersihan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atas Pungutan Lainnya	Rp 825.000.000,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	100.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Rp	150.000.000,00
TOTAL	Rp	21.436.843.479,94

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

dr. Nuriela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Saftianingsi, SE, MM
NIP. 19720116 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KEPEGAWAIAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH

Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,
Pihak Pertama

Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
Pembina
NIP. 19860923 200412 2 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Terpenuhinya rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	75%
		2. Persentase inputting data SUDSAR (Sistem Informasi Sistem Daya Kesehatan)	100%
		3. Realisasi Pemenuhan SDM Kepegawaian rumah sakit sesuai peraturan kepegawaian	20%
		4. Persentase Kehadiran Pegawai 2 95% / bulan	20%
		5. Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di bagian kepegawaian	100%
		6. Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang disusun dibagian kepegawaian	100%
		7. Waktu Pemrosesan Administrasi Kepegawaian	≤ 3 Hari Kerja

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 2,016,000,000.00	APBD
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,016,000,000.00	
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2,016,000,000.00	
II	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 4,552,424,120.00	BLUD
II.1	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 40,000,000.00	
-	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 40,000,000.00	
II.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 4,512,424,120.00	
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Non Asn	Rp 3,927,800,000.00	
-	Penyediaan Jasa Asuransi	Rp 584,624,120.00	
	TOTAL	Rp 6,568,424,120.00	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Kepala Bagian Kepegawaian

Musdalifah Dj Umar, SSTP, MM
NIP. 19860923 200412 2 001



PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH

Jabatan : Plt. Direktur RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

- Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Paku,

Pihak Pertama

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. RE. Martadinata Kel Tondo Kec. Mantikore Palu 94116 Telp. (0451) 4131445-4121446
Fax (0451) 4012995 website : www.rsudundata.sultengprov.go.id Email: dr_undata@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terwujudnya peningkatan mutu Pelayanan Rumah Sakit	1. Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Medik di RS	100%
		2. Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Non-Medik di RS	100%
		3. Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan di Rumah Sakit	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 31,055,713,358	APBD
La	Kep. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM DAN UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 31,055,713,358	
	Pengembangan dan pemeliharaan / atau Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Rp 4,480,158,900	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,562,747,458	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,012,807,000	
	II Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 75,190,399,096	BLUD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2,545,547,671	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2,045,547,671	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 500,000,000	
	II.b Kegiatan Pelayanan Non Medik	Rp 70,425,730,175	
	Pelayanan Non Medik lainnya	Rp 375,000,000	
	Pelayanan Farmasi	Rp 19,500,000,000	
	Pelayanan Laundry/Binatu	Rp 250,000,000	
	Pengadaan bahan Habis pakai	Rp 35,819,007,575	
	Pengolahan Makanan/Gizi	Rp 6,491,880,000	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 7,989,842,600	

II.c	Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Rp 1,754,121,250	
	Asuhan Keperawatan Generalis	Rp 1,754,121,250	
II.d	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD	Rp 465,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 165,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 300,000,000	
TOTAL		Rp 106,246,112,453.80	

Plt Direktur UPT RSUD Undata

dr. Nurlaela Harate
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN MEDIK UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Subhan Habibi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada,

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005

Pihak Pertama

dr. Subhan Habibi
Pembina Tingkat I
NIP. 19780823 201101 1 004

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 18,042,906,358	APBD
I.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rajakan, UKM dan UKM Rajakan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 18,042,906,358	
-	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 4.480.158.900	
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13.562.747.458	
II	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 2,210,547,671	BLUD
II.1	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 2,045,547,671	
-	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.045.547.670.50	
II.2	ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 165,000,000	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000.00	
TOTAL		20,253,454,028.50	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Pelayanan Medik

dr. Subhan Habibi
NIP. 19780823 201101 1 004

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Waktu tunggu rawat jalan >90 Menit	≥80% Pasien
		BOR (Bed Occupancy Rate)	60-85%
		Persentase Pasien IGD yang di tangani <5 Menit	≥90%
		Persentase kematian Neonatal di Rumah Sakit	≤5%
		Waktu Pelayanan awal IGD (triage) sesuai Standar	≥95%
		Jumlah audit rekam medis dengan kelengkapan 100%	≥95% lengkap
		Persentase ketepatan waktu operasi	≥90% tepat waktu
1	Peningkatan Mutu Layanan Pelayanan Medik	Kepuasan terhadap clinical pathway (CP)	≥80%
		Persentase DPTP mengikuti pelatihan klinis dan kredensial	≥90%
		Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di area pelayanan	100%
		Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang disusun di area pelayanan	1 Dokumen
		Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan dokter	≥80% puas



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENUNJANG MEDIK UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deby Wotulo, SKM, MM

Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Borkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19650621 201001 1 005

Palu,

Pihak Pertama

Deby Wotulo, SKM, MM
Pembina
NIP. 19781224 199703 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Mutu Penunjang Medik	Ketepatan Waktu Radiologi berbasis digitalisasi	≥90%
		Ketepatan Waktu Layanan Laboratorium berbasis digitalisasi	≥95%
		Ketepatan Waktu Penyediaan Darah (Diluar Kejadian TLR)	≥95%
		Waktu Tunggu Hasil Radiologi < 3 Jam	≥90%
		Waktu Tunggu Hasil Laboratorium <2 Jam	≥90%
		Ketersediaan Darah Sesuai Permintaan	≥90%
		Jumlah Kesalahan hasil lab-radiologi/turnas	0 insiden
		Persentase Tenaga penunjang medik mengikuti pelatihan kompetensi	≥90%
		Ketepatan laporan stok obat dan logistik farmasi yang berbasis digitalisasi	≥95%

	Kepatuhan diet pasien sesuai instruksi gizi	≥95%
	Persentase pemenuhan standar elemen penilaian Akreditasi di area penunjang medik	≥95%
	Jumlah Dokumen Manajemen resiko yang dianalisis di area penunjang medik	1 dokumen
	Kepuasan Pengguna Layanan Penunjang Medik	≥85%
	Persentase alat bertingkat baik dan siap pakai	≥95%

2	Menjamin Aksesibilitas dan Kesiapan Layanan	Waktu Respon Layanan Penunjang Gawat Darurat	≤10 Menit
		Ketersediaan Reagen Dan Bahan Habis Pakai	≥95%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 13,012,807,000	APBD
I.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM DAN UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 13,012,807,000	
-	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 13,012,807,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp 71,228,730,175	BLUD
II.1	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 70,425,730,175	
-	Pelayanan Non Medik lainnya	Rp 375,000,000	
-	Pelayanan Farmasi	Rp 19,500,000,000	
-	Pengelolaan Makanan-Gizi	Rp 6,391,880,000	
-	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Rp 7,989,842,600	
-	Pelayanan Lowtek/Bimati	Rp 250,000,000	
-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 35,819,007,575	
II.2	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 500,000,000	
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 500,000,000	
II.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU BLUD	Rp 300,000,000	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 300,000,000	
TOTAL		Rp 84,238,537,175	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinamu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Penunjang Medik

Deky Wotulo, SKM, MM
NIP. 19761224 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEPERAWATAN UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lince, SKM,MAP

Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS

Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
Pembina Tingkat I
NIP. 19850621 201001 1 005

Pihak Pertama

Lince, SKM,MAP
Pembina
NIP. 19690603 198902 2 002

		Persentase pemenuhan ratio perawat sesuai standar	≥90%
--	--	---	------

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp 1,754,121,250	BLUD
II	PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	Rp 1,754,121,250	
-	ASUHAN KEPERAWATAN GENERALIS	Rp 1,754,121,250	
	TOTAL	Rp 1,754,121,250	

Wakil Direktur Pelayanan

dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp. BS
NIP. 19850621 201001 1 005

Kepala Bidang Keperawatan

Lince, SKM,MAP
NIP. 19690603 198902 2 002

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keperawatan yang terdida dan layak pakai sesuai standar pelayanan keperawatan	≥90%
		Evaluasi mutu pelayanan keperawatan	≥95%
		Evaluasi / Survey kepuasan pasien pada aspek pelayanan perawat	≥85%
		Jumlah Insiden keselamatan pasien terkait tindakan keperawatan	0 Insiden
		Pelaksanaan Aspek Keperawatan Klinis	≥2 kali/Tahun
		Kelengkapan dokumentasi ADPIE dan asuhan keperawatan	≥95%

1	Peningkatan mutu pelayanan keperawatan Rawat Inap	Persentase pemenuhan standar pelayanan wajib (SKP, PPI, PMKP, Kode Etik, K3, BHD)	≥90%
		Kepatuhan Penggunaan APD	≥95%
		Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
		Persentase Kepatuhan Tindakan Jaga (Dinas)	100%
		Persentase pemenuhan standar klasifikasi penyakit (Morbidity) di area keperawatan	100%
		Jumlah Tindakan Manajemen risiko yang diberikan di area keperawatan	100%

PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrawati, SKM, MM
Jabatan : Wakil Direktur Program, Pendidikan dan Penelitian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Nurlaela Harate, MPH
Jabatan : Ptl. Direktur Rsud Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Seleku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

dr. Nurlaela Harate, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19720312 200012 2 001

Palu,
Pihak Pertama

Indrawati, SKM, MM
Pembina
NIP. 19810404 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. RE Martaditata Kai Tendo Kec. Mantikore-Pole-Pole (0451) 433445-4121448
Fax (0451) 4212995 website : www.mufundata.sulthengprov.go.id Email: dir_undata @ yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 WAKIL DIREKTUR PROGRAM DAN DIKLIT UPT RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, Latihan dan penelitian	1. Persentase Nakes/Named yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan rumah sakit 2. Jumlah pelatihan intelektual/eksternal yang diselenggarakan 3. Jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan 4. Persentase tenaga pembimbing yang telah tersertifikasi	≥ 85% ≥ 25 Kegiatan ≥ 3 MoU ≥ 80%
2	Meningkatkan kelengkapan dokumen perencanaan dan evaluasi	1. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 2. Kelengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit 3. Kelengkapan dokumen pelaporan manajemen resiko Rumah sakit	100% 100% 100%
3	Meningkatkan pelayanan rekam medik, IT, Informasi dan pemasaran	1. Terselenggaranya pelayanan rekam medik, IT, Informasi dan pemasaran	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 2,747,464,800.00	BLUD
1a	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,125,000,000.00	BLUD
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1,125,000,000.00	
1b	Program Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah	Rp 992,920,000.00	
-	Pelayanan Nonmedik	Rp 992,920,000.00	
1c	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 629,544,800.00	
-	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 629,544,800.00	
	TOTAL	Rp 2,747,464,800.00	

Ptl. Direktur UPT RSUD Undata

dr. Nurlaela Harate, MPH
NIP. 19720312 200012 2 001

Wakil Direktur Program dan Diklit

Indrawati, SKM, MM
NIP. 19810404 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrawati, SKM, MM

Jabatan : Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

Pihak Kedua

Indrawati, SKM, MM

Pembina

NIP. 19810404 200904 2 002

Pihak Pertama

Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Pembina

NIP. 19740318 199303 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja RS	100%
		Tingkat efisiensi penyusunan anggaran rumah sakit	3%
2	Terwujudnya dokumen perencanaan Rumah Sakit	Kelengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit	100%
		Kelengkapan Dokumen laporan manajemen resiko RS	100%
3	Monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit	Laporan evaluasi program	35 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp. 629.544.800	BLUD
11	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 629.544.800	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 66.600.000	

-	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	Rp	308.133.100
-	Evaluasi Kinerja BLUD	Rp	254.811.700
TOTAL		Rp	629.544.800

Wakil Direktur Program dan Diklit

Indrawati, SKM, MM

NIP. 19810404 200904 2 002

Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

NIP. 19740318 199303 1 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG REKAM MEDIK DAN INFORMASI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI UPT. RSUD UNDATA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H

Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrawati, SKM, MM

Jabatan : Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian,

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paku,

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Indrawati, SKM, MM
Pembina

NIP. 19810404 200904 2 002


Teguh Hidayat, S.K.M., M.P.H
Pembina

NIP. 19740318 199303 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Keleengkapan laporan akuntabilitas kinerja RS	100%
		Tingkat efisiensi penyerapan anggaran rumah sakit	3%
2	Tersusunnya dokumen perencanaan Rumah Sakit	Keleengkapan dokumen perencanaan Rumah Sakit	100%
		Keleengkapan Dokumen laporan manajemen resiko RS	100%
3	Monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit	Laporan evaluasi program	35 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Rp. 629,544,800	BLUD
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 629,544,800	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 66.600,000	